

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM
PENGELOLAAN DANA BLOCK GRANT MELALUI PROGRAM
P2KP DI KELURAHAN TUATUNU INDAH KECAMATAN
GERUNGANG KOTA PANGKALPINANG**
“Studi Tentang Perencanaan dan Implementasi”



TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

SAHIRMAN

NIM. 015551391

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2010**

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TPAM yang berjudul Penerapan Prinsip- Prinsip Good Governanace dalam Pengelolaan Dana Block Grant melalui Program P2KP di Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang “Study Perencanaan dan Implementasi” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun di rujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pangkalpinang, 17 September 2010
Yang Menyatakan



(Sahirman)
NIM. 015551391

INTISARI

PENERAPAN PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA BLOK GRANT MELALUI PROGRAM P2KP DI KELURAHAN TUATUNU INDAH KECAMATAN GERUNGANG KOTA PANGKAL PINANG Studi Perencanaan dan Implementasi

Sahirman
Universitas Terbuka

Kata Kunci : Interaksi, *good governance* dan pengelolaan dana *blok grant*

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan prinsip prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana *blok grant* di tingkat kelurahan. Banyak studi menunjukkan bahwa selama ini tokoh masyarakat hanya menjadi penonton pembangunan di wilayahnya. Melalui program ini , masyarakat di kelurahan Tua Tunu Indah semakin mudah mengakses dan terlibat langsung dalam pengelolaan dana blok grant. Hal ini telah di tunjukkan dengan besarnya swadaya masyarakat berkontribusi dalam tenaga, material apabila di hitung kontribusinya dapat sampai 300 % dari nilai proyek kegiatan tertentu yang di berikan kepada pemerintah.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menekankan pada pengungkapan fakta untuk memberi gambaran yang obyektif tentang keadaan sebenarnya, melalui observasi, wawancara mendalam dengan responden dan dokumentasi . Data penelitian berupa data primer yang di dapat dari informan langsung yaitu ; perangkat kelurahan, pengurus BKM, Ketua RT/RW, pengusaha local dan masyarakat yang ada di kelurahan Tua Tunu Indah dan data sekunder yang berasal dari dokumen, arsip, laporan dan peraturan yang terkait kegiatan ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa , interaksi dalam pengelolaan dana blok grant dalam partisipasi oleh stake holder telah menunjukkan kualifikasi yang tinggi, dalam transparansi pengelolaan kegiatan telah di lakukan dengan baik, dalam penerapan akuntabilitas secara umum telah di lakukan dengan baik walaupun masih ada salah satu kegiatan yaitu simpan pinjam kurang baik, dalam responsibilitas telah berjalan dengan baik serta dalam penerapan *rule of law* telah di tingkat kegiatan berjalan baik, namun masih ada kelemahan dari sisi pelaporan yang belum maksimal.

Hasil yang baik di tingkat pelaksanaan lebih di sebabkan karena karakteristik masyarakat kelurahan Tuatunu Indah sampai saat ini memiliki karakter paternalistic dengan masyarakat tingkat homogen yang tinggi dan memiliki kesadaran yang baik dalam memandang kegiatan yang menyangkut kepentingan bersama. Sebagai contoh dalam pembangunan fasilitas umum berupa jalan dan jembatan menuju akses kebun.

Abstract

THE IMPLEMENTATION of THE PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE IN MANAGING (P2KP)
BLOCK GRANT IN TUA TANU VILLAGE, GERUNGANG SUB DISTRICT, PANGKALPINANG CITY

(STUDY ON THE PLANNING AND THE IMPLEMENTATION OF BLOCK GRANT)

Sahirman

Universitas Terbuka

Keywords: good governance, block grant subsidy, P2KP, community empowerment, participation

The research aims at evaluating the implementation of the principle of good government in managing the block grant program of the P2KP at the village level. Many studies showed that local elite did not involved during the development as well as the implementation processes. This program gives opportunities to villagers to directly access the program. This is shown by the contribution of community that is accounted for almost triple of the amount of project.

Research used qualitative research to describe and examine the benefits and the problems of program by collecting data through observation, interview and secondary data analysis. Primary data were collected by in depth interview of village functionaries, BKM functionaries, the head of community livelihood (RT/RW), village entrepreneurs and the member of community. The secondary data of village statistics and annual reports were also collected to support the analysis.

Research findings showed that the level of stakeholders' participation is high. The level of management transparency is also satisfactory however public accountability revealed a less satisfactory especially in financial sector and reporting. The success of the implementation may be attributed to the cultural characteristics of the society which presents more paternalistic value and communality.

LEMBAR PERSETUJUAN

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TPAM)

Judul TPAM : Penerapan Prinsip- Prinsip Good Governanance dalam Pengelolaan Dana Block Grant melalui Program P2KP di Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang “Study Perencanaan dan Implementasi”

Penyusun : SAHIRMAN

NIM : 015551391

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. HM. Aries Djaenuri, MA
NIP. 640004740

Dr. Daryono, MA,

Menyetujui:

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Politik,
Program Magister Sains

Dra. Susanti, M.Si

Nip. 19671214 199303 2 002

Direktur Program Pascasarjana

Suciati, Ph.D

Nip. 19520213 198503 2 001



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Sahirman
NIM : 015551391
Program Studi : PASCASARJANA
Judul Tesis : Penerapan Prinsip- Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana Block Grant melalui Program P2KP di Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang “Study Perencanaan dan Implementasi”

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/ Tanggal : Minggu/ 29 Agustus 2010
Waktu : 09.00 WIB

Dan telah di nyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Dr. Maman Rnumanta

Penguji Ahli : Prof. Dr. Asep Kartiwa, M.Si

Pembimbing I : Prof. Dr. HM. Aries Djaenuri, MA
NIP. 640004740

Pembimbing II : Dr. Daryono, MA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana *Blok Grant* Melalui Program P2KP Di Kelurahan Tuatunu Indah Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang” ini.

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi Administrasi Publik PASCASARJANA Universitas Terbuka. Dalam penyusunan tesis ini, berbagai pihak telah banyak memberikandorong, bantuan serta masukan sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Susanti, M.Si Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Politik Program Magister Sains,
2. Suciati, Ph.D Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka,
3. Dr. Maman Ruumanta selaku Ketua Komisi Penguji,
4. Prof. Dr. Asep Kartiwa, M.Si, selaku Penguji Ahli
5. Prof, Dr. HM. Aries Djaenuri, M.A, selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan pengetahuan, bimbingan dan doa restunya.
6. Dr. Daryono, MA, selaku pembimbing yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingannya yang sangat bermanfaat bagi penyusunan tesis ini.
7. Ibu, Istri dan Anak saya tercinta, yang selalu memberikan dukungan moril dan materil atas segala jerih payah, dorongan, kesabaran dan perhatiannya selama

ini serta yang terpenting kebersamaan yang terbaik dalam situasi yang paling buruk yang pernah dihadapi sehingga tesis ini dapat terlaksana dengan baik.

8. Sahabat dan teman-temanku yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, atas segala dukungan, bantuan dan sarannya sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Kepada semua pihak yang membantu terlaksananya tesis ini, terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan guna menyempurnakan penulisan ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini dapat berguna bagi kita semua.

Pangkalpinang, 29 Agustus 2010

PENULIS,

SAHIRMAN

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	
Lembar Persetujuan	
Lembar Pengesahan	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	i
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Good Governance	10
B. Interaksi Aktor Governance	15
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Teknik Pengumpulan Data	36
C. Sumber Data	36
D. Metode Analisis Data	38
E. Analisis	39

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Daerah Penelitian	41
B. Kebijakan Blok Grant di Kota Pangkalpinang	54
C. Wujud Program Blok Grant.....	58
D. Sarana dan Ruang Lingkup.....	62
E. Pengalokasian Dana Blok Grant.....	62
F. Hasil Penelitian.....	65
G. Implementasi Proyek Blok Grant	97

BAB IV KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan	124
B. Saran dan Rokemendasi.....	127
Daftar Pustaka.....	130
Lampiran.....	132

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lingkaran Hubungan Antar Pilar governance	11
Gambar 2.2 Alur Pemikiran.....	24
Gambar 4.1 Stuktur Organisasi	54

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Tua Tunu Indah berdasarkan kelompok umur.....	41
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Warga Negara Asing Kelurahan Tua Tunu Indah berdasarkan kelompok umur	41
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kelurahan Tua Tunu Indah berdasarkan Pendidikan	43
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kelurahan Tua Tunu Indah berdasarkan Mata pencaharian.....	44
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Kelurahan Tua Tunu Indah berdasarkan Pemeluk Agama.....	44
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Kelurahan Tua Tunu Indah berdasarkan Kewarganegaraan Indonesia.....	45
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Kelurahan Tua Tunu Indah berdasarkan Kewarganegaraan Asing.....	45
Tabel 4.8 Jumlah Lembaga Perekonomian.....	48
Tabel 4.9 Jumlah Sarana Jalan	46
Tabel 4.10 Jumlah Rumah Ibadah.....	46
Tabel 4.11 Jumlah Prasarana Kesehatan	47
Tabel 4.12 Jumlah Prasarana Pendidikan	47
Tabel 4.13 Jumlah Prasarana Hiburan	48
Tabel 4.14 Jumlah Alat Penerangan.....	48
Tabel 4.15 Jumlah Sarana Perhubungan.....	48
Tabel 4.16 Jumlah Rumah	49
Tabel 4.17 Jumlah Alat Komunikasi	49
Tabel 4.18 Jumlah Ternak di usahakan	49
Tabel 4.19 Jumlah Kelembagaan.....	50

Tabel 4.20 Jumlah eks Napi	50
Tabel 4.21 Jumlah Ormas	51
Tabel 4.22 Jumlah Data Klasifikasi Keluarga Sejahtera	51
Tabel 4.23 Daftar Perangkat RT/RW di Kelurahan	52
Tabel 4.24 Alokasi Dana Blok Grant	63
Tabel 4.25 Jumlah Pembagian Alokasi Yang di Setujui	68
Tabel 4.26 Pemilik BKM.....	73
Tabel 4.27 Tingkat Kehadiran Rapat.....	76
Tabel 4.2.8 Prioritas Proyek Blok Grant	84
Tabel 4.29 Rekapitulasi Partisipasi masyarakat	104
Tabel 4.30 Perbandingan antara Pagu Dana dengan SM.....	106

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan pemberlakuan otonomi daerah peran dan fungsi pemerintah daerah memiliki nilai tawar yang tinggi baik dari segi administrasi, politik maupun keuangan sebagai konsekuensi dari implementasi kebijakan otonomi daerah semenjak diundangkannya UU No. 22 dan UU No 25 tahun 1999 dengan direvisi menjadi UU No. 32 dan UU No 33 tentang pemerintah daerah dan keuangan daerah.

Berdasarkan kedua undang-undang ini, daerah dapat mengatur urusannya sendiri sesuai dengan keinginan daerah dan masyarakat itu sendiri, tanpa harus menunggu petunjuk dari pusat. Sehingga semakin besar peluang implementasi kebijakan otonomi daerah, sehingga semakin besar pula kewenangan yang di miliki oleh daerah.

Karena tujuan utama kebijakan ini adalah di satu pihak membebaskan pemerintah pusat dari beban beban yang tidak perlu dalam menangani urusan lokal, sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespon, berbagai kecenderungan *global* dan mengambil manfaat dari padanya. Pada saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro yang bersifat strategis. Dilain pihak dengan *desentralisasi* kewenangan kepada daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang nyata. Salah satu bentuk penerapan kebijakan

otonomi daerah adalah adanya perubahan dan pergeseran pola pengaturan sistem pemerintah daerah di dalam pengembangan swakarsa dan swadaya masyarakat untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) yang bersifat nasional menjadi pola pengaturan yang lebih bersifat lokal di tingkat kabupaten/kota.

Bentuk dari pola pengaturan ini adalah pelaksanaan otonomi daerah yang lebih kongkrit melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat yang bersifat *Block Grant* dengan titik berat pada keleluasaan daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya pembangunan yang ada. Kata kunci keleluasaan daerah adalah bahwa pemerintah daerah dalam mengambil suatu kebijakan tertentu termasuk di dalamnya masalah pembangunan tidak ada keharusan lagi untuk selalu meminta petunjuk dahulu ke pusat baru di laksanakan namun penekanannya lebih di dasarkan pada aspirasi masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Oleh karena itu pelaksanaan otonomi daerah akan membawa proses pendelegasian sejumlah kewenangan, terutama di dalam perencanaan pembangunan kepada pejabat di daerah, karena pejabat daerahlah yang selama ini bekerja di lapangan dan lebih tahu permasalahan yang di hadapi oleh masyarakatnya, sehingga perencanaan dapat di lakukan sesuai dengan keinginan masyarakat di wilayahnya. Selain itu, dengan otonomi daerah dapat menghantarkan perubahan administrasi pemerintahan yang mudah di sesuaikan, inovatif dan kreatif, sehingga pemerintah daerah memiliki peluang untuk menguji inovasi serta bereksperimen dengan kebijakan baru di daerahnya, tanpa harus

menjustifikasikannya kepada pusat. Ini mengandung pengertian bahwasanya tidak ada lagi istilah, pemerintah daerah belum mendapatkan petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat, tetapi daerah betul-betul memiliki keleluasaan untuk mencoba terhadap sesuatu kebijakan tersebut seperti yang di kehendaki oleh aspirasi masyarakat itu sendiri.

Pemerintah bukan bertindak sebagai satu satunya “agent” yang menentukan segalanya dalam pengelolaan kepentingan publik, masyarakat (*Civil Society*) sudah seharusnya mendapat diskresi untuk ikut menentukan pelayanannya sendiri (*Self Governing*), dengan asumsi bahwa masyarakatlah yang paling mengerti dengan apa yang mereka butuhkan. Disamping itu, peran swasta daerah baik perusahaan, asosiasi pengusaha maupun pelaku ekonomi di daerah, seharusnya di beri kesempatan yang sama dalam pembangunan daerahnya. Dengan interaksi ketiga pilar tersebut merupakan modal untuk mengelola potensi daerah, guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah, sebagaimana yang di ungkapkan oleh *Acher* menyatakan bahwa pemerintahan yang baik cenderung di dasarkan pada beroperasinya tiga kekuatan, yaitu negara (*state*) yang kuat, pasar (*private sector*) yang kompetitif dan masyarakat (*Civil Society*) yang mandiri.

Mencermati perubahan paradigma ini, melalui penerapan konsep *governance* dengan ketiga pilarnya tersebut, di harapkan dapat menjadi solusi konseptual dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Oleh karena itu pada tataran praktis, penulis mencoba meneliti konsep ini, khususnya interaksi ketiga pilar *governance* dalam mengelola dana *block grant* di kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang.

Hal ini sejalan dengan, adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan anggaran secara mandiri kepada pemerintahan kelurahan yang berbentuk dana *Blok Grant* artinya mulai tahun anggaran 2007 sampai dengan 2008 pemerintahan kota Pangkalpinang mengalokasikan dana blok grant melalui kegiatan P2KP, Melalui kebijakan ini di harapkan akan terjadi interaksi yang bersifat kemitraan, adanya jejaring/ *net working* dan kolaborasi antara pemerintah kelurahan dengan masyarakatnya. Sehingga akan terjadi pengembangan swakarsa dan swadaya masyarakat untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, dalam rangka pemenuhan kebutuhannya, menuju perwujudan *good governance* sebagaimana tujuan awal di luncurkannya program ini.

Dengan berasumsi, pertama apabila tugas tugas di kelurahan dapat di laksanakan dengan baik, maka segala permasalahan dapat di selesaikan, sehingga pekerjaan pemerintahan kota akan semakin ringan. Kedua yang paling tahu kebutuhan *rirel* dan cara pemecahan masalah yang khas dan unik adalah masyarakat setempat yaitu (Kelurahan dan Kecamatan). Ketiga, untuk dapat melayani masyarakat dengan baik, maka aparat di Kecamatan dan Kelurahan harus mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai.

Apalagi semangat otonomi daerah, yang menempatkan masyarakat tidak hanya menempati sebagai obyek pembangunan saja, tetapi lebih dari itu keterlibatan sejak awal perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan lebih di tonjolkan dan di berdayakan. Melalui pola seperti ini, akan memberi kesempatan yang seluas luasnya kepada potensi masyarakat kelurahan, untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di

daerahnya, sehingga tidak ada lagi istilah bolak balik rembug kelurahan, RT/RW dimintai usulannya proyek, hanya usul usul saja, tidak pernah turun proyeknya.

Persoalannya adalah pertama dari sisi pemerintahan Kelurahan, selama ini belum pernah terlibat secara langsung dalam proses pembangunan, sekalipun pembangunan itu di Kelurahan. Walaupun terlibat baru sebatas mengusulkan kepada pemerintahan daerah, pembangunan apa yang di butuhkan masyarakatnya melalui mekanisme pembangunan yang sudah ada yaitu Musrenbang Kelurahan. Dari hasil Musrenbang, selanjutnya di bawa ke rapat pembangunan Kecamatan atau UDKP (Unit Daerah Kerja Pembangunan). Untuk menentukan skala prioritas masing-masing, Kelurahan melalui forum ini akan diseleksi program-program yang akan di usulkan menjadi prioritas pembangunan yang akan di biayai oleh APBD atau melalui lembaga-lembaga tertentu.

Sementara dalam program P2KP ini, keterlibatan pemerintah Kelurahan mulai dari mekanisme perencanaan, implementasi dan pengawasan sampai dengan hasil program ini di serahkan kepada masyarakat, Bahkan sebagai institusi pelaksananya adalah LPMK berupa Badan Keswadayaan Masyarakat (KSM).

KSM di beri tanggung jawab besar melaksanakan program pembangunan ini, sehingga akan menjadi pengalaman yang berharga. Kedua dari *civil society* yang ada di Kelurahan seperti kelompok pengajian, koperasi simpan pinjam, rukun kematian, kelompok tani dan lain-lain selama ini perannya belum maksimal, artinya keberadaan kelompok ini masih terbatas pada permasalahan anggotanya sendiri, belum banyak terlibat dalam dinamika pemerintahan Kelurahan, karena para pengurusnya juga menjadi pengurusnya juga pengurus RT/RW dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sehingga apabila sudah

melibatkan kedua institusi ini dianggap sudah melibatkan *civil society*. Sementara salah satu indikator terwujudnya *good governance* sebagaimana tujuan program ini adalah bekerjanya *civil society* secara sinergis dengan pemerintah Kelurahan dan sektor swasta.

Ketiga dari sektor swasta, dalam hal ini diwakili oleh para pelaku ekonomi yang berada di Kelurahan, seperti penyedia jasa konstruksi, bahan material bangunan, jasa tenaga kerja dan lain lain hampir semuanya masuk dalam katagori ekonomi lemah. Sebagai kelompok pelaku ekonomi keberadaannya selama ini sangat tergantung dari para rekanan, sehingga kalau mereka langsung terlibat dalam pelaksanaan program P2KP ini, maka akan menjadi pengalaman baru yang menarik untuk di teliti.

Melihat dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti interaksi antara BKM, pemerintah kelurahan RT/RW, *civil society*, dan pelaku ekonomi kelurahan sebagai aplikasi dari konsep *good governance* dalam pengelolaan *block grant* dengan mengambil judul penelitian : **PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA BLOCK GRANT MELALUI PROGRAM P2KP DI TINGKAT KELURAHAN** "Study tentang *Good Governance* di Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang".

B. Rumusan Masalah

Melihat dari uraian di latar belakang maka penulis membatasi rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah: Bagaimana interaksi antara aktor pada tahap perencanaan dan implementasinya, dalam mengelola dana *Blok Grandt*

untuk mewujudkan *good governance* di kelurahan Tuatunu Indah Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, dan selanjutnya rumusan masalah tersebut diidentifikasi kedalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *good governance* dilihat dari sisi aktor yang terlibat serta interaksinya dalam prinsip partisipasi, transparansi, *rule of law* dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan *block grant* program P2KP di Kelurahan Tua Tunu Indah?
2. Apakah dalam interaksi tersebut terdapat partisipasi, transparansi, *rule of law* dan akuntabilitas?
3. Faktor-faktor apa yang menghambat dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana *block grant*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Mengetahui penerapan *good governance* dilihat dari sisi *actor* yang terlibat serta interaksinya dalam penerapan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, *rule of law* dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan *block grant* program P2KP di kelurahan Tua Tunu Indah?
 - b. Untuk mengetahui apakah dalam interaksi tersebut terdapat partisipasi transparansi, *rule of law* dan akuntabilitas?
 - c. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat dalam penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana *block grant*?

2. Kegunaan penelitian

a. Manfaat teoritis.

- 1) Menjadi masukan bagi pengembangan konsep *good governance*, khususnya perencanaan dan implementasi pengelolaan dana *block grant*;
- 2) Memacu riset lebih lanjut tentang *good governance*, khususnya dalam melihat interaksi antara aktor-aktor yang terlibat dalam dan implementasi pengelolaan dana *block grant*.

b. Manfaat praktis.

- 1) Bagi peneliti, sebagai wahana untuk melatih kemampuan berfikir dan bersikap ilmiah dalam mencari penjelasan terhadap suatu fenomena politik di tingkat lokal, dalam hal ini adalah *good governance* dalam pengelolaan dana *block grant* di Kelurahan Tuatunu Indah.
- 2) Bagi institusi yang terkait (pemerintahan Kelurahan, LPMK, BKM, RT/RW, *civil society* dan pelaku ekonomi di Kelurahan), hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan dalam mewujudkan *good governance*.

BAB II

KERANGKA TEORI

Pada bagian ini akan di uraikan skema konseptual berupa teori-teori yang relevan dan memiliki hubungan dengan *variable-variable* dari obyek penelitian yang akan dijadikan landasan teori dalam pembahasan, sehingga mampu menggunkapan gejala-gejala dan apa-apa saja yang berhubungan dengan *variable* penelitian ini. Adapun teori-teori ini meliputi *Good Governance*, Interaksi Aktor *Governance*, Anggaran Kelurahan dan selanjutnya dapat di jelaskan sebagai berikut:

A. *Good Governance*

Salah satu tuntutan reformasi yang di perjuangkan adalah upaya mewujudkan *good governance* dalam sistem pemerintahan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Konsep ini berasal dari kata *governance*, yang lebih mengarah pada kegiatan, proses atau kualitas pemerintah. Artinya bahwa sebagai fungsi pengelolaan masyarakat yang komplek, *governance* melibatkan koordinasi banyak pihak di *sector public* dan swasta, jadi dengan kata lain pemerintah bukan satu-satunya aktor dan tidak selalu menjadi pelopor.

Oleh Karena itu pemerintah hanya menjadi salah satu aktor yang bekerjasama dengan aktor - aktor lain di luar pemerintah. Dalam setiap rezim yang berkuasa, meskipun sampai saat ini (menurut pengamatan) lebih merupakan retorika politik untuk menarik simpati semata.

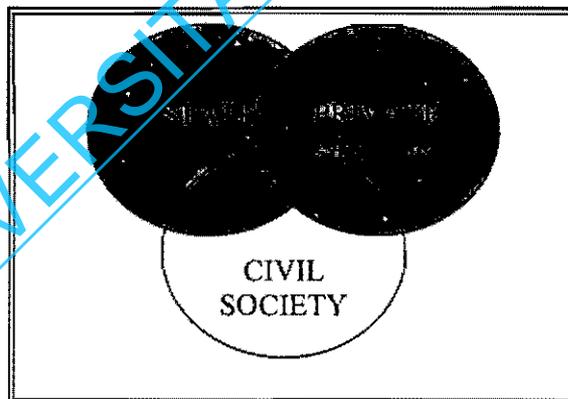
Bagi Indonesia sendiri *good governance* di maknai sebagai sebuah tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu *good governance* akan menelorkan nilai-nilai demokrasi dan sikap keterbukaan. Kejujuran (*Honesty*) perkembangannya, kata ini bergeser menjadi *good governance*, yang berarti cara mengelola urusan-urusan publik .

Secara lebih spesifik lagi, bahwa institusi *governance* sendiri meliputi tiga pilar/domain, yaitu *state* (Negara / pemerintah), *private* sektor (sektor swasta atau pelaku ekonomi) dan *Civil society* (masyarakat sipil).

Ketiga aktor tersebut saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, sehingga terjalin kerjasama (*networking* atau kolaborasi) untuk memberikan pelayanan publik.

Untuk melihat pola hubungan antara aktor-aktor *governance* tersebut dapat di lihat dalam gambar di bawah ini :

HUBUNGAN ANTAR PILAR GOVERNANCE



Gambar 2.1 Lingkaran Hubungan Antar Pilar *Governance*

Adanya lingkaran yang di biarkan *over laping*, menggambarkan adanya jejaring/ *networking*. Artinya bahwa ada urusan urusan yang hanya menjadi tanggung jawab *state. Private sector* atau *civil society* sendiri, tetapi di lain pihak

ada juga urusan urusan publik tersebut harus melibatkan diantara ketiganya. Boleh jadi keterlibatan tersebut, antara *state* dengan *private sektor*, *state* dengan *civil society* atau hanya *private sektor* dengan *civil society* saja.

Karena ada urusan urusan publik yang hanya dapat di kerjakan oleh pemerintah sendiri, tanpa melibatkan para pelaku bisnis dan masyarakat sipil atau bahkan tanpa campur tangan keduanya. Pada sisi lain masyarakat sendiripun juga mampu menyelesaikan masalah masalahnya. Namun demikian, yang lebih di fokuskan dalam *good governance* adanya interaksi secara sinergis di antara *state*, *private sektor*, *civil society* dalam mengurus kepentingan publik. Dalam pengertian bahwa Negara tetap menjadi pemain kunci, bukan dalam pengertian dominasi dan hegemoni, tetapi Negara adalah aktor setara yang mempunyai kapasitas memadai untuk memobilisasi aktor -aktor dalam masyarakat untuk tujuan bersama. Sementara masyarakat sipil dan pelaku bisnis juga memiliki kesempatan dan tanggung jawab yang seimbang untuk mengelola kepentingan publik tersebut.

Relevansi *good governance* di tingkat Kelurahan di pahami juga sebagai Desa sebagaimana di kemukakan oleh Ari Dwipayana dan Sutoro Eko sebagai berikut. Bahwa *good governance* adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa atau Kelurahan. Karena secara substantive desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antara level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa Negara lebih dekat kepada masyarakat.

Oleh karena itu, *good governance* sebagai basis penyelenggaraan otonomi lokal harus mampu memberikan makna dan bermanfaat bagi masyarakat

lokal sendiri. Lebih jauh dalam buku ini di jelaskan bahwa untuk dapat memberikan makna dan kemanfaatan tersebut, di perlukan pemerintahan lokal yang kuat, di topang oleh transparansi, akuntabilitas, responsifitas dan partisipasi masyarakat.

Perhatian khusus dalam penerapan *good governance* di tingkat desa adalah hubungan antara elemen *governance* di Kelurahan yang di dasarkan pada prinsip kesetaraan, keseimbangan dan kepercayaan (*trust*). Pola hubungan ini dapat tercapai, apabila pemerintahan kelurahan di kelola secara partisipatif, transparan, *akuntable* dan *responsive* dan sebaliknya, pemerintahan desa yang demokratis (*partisipatif, akuntable, transparan dan responsive*) dapat semakin kokoh, *legitimate* dan mampu bekerja secara efektif apabila di topang dengan kesejajaran, keseimbangan dan kepercayaan antar elemen *governance* di Kelurahan.

Untuk membangun kondisi tersebut di butuhkan sebuah proses perluasan ruang publik melalui dialog-dialog (forum keluarga atau rembug Kelurahan yang semakin dinamis dan berkelanjutan. Karena melalui forum-forum seperti ini akan terjadi proses permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan kebaikan bersama, yang hasilnya di pergunakan sebagai aturan main dalam pengelolaan kepentingan publik di Desa.

Sementara dari sisi aktornya elemen *governance* sendiri, baik pemerintah kelurahan *state*, sektor swasta (*private sector*), maupun organisasi masyarakat sipil (*civil society*) memiliki keterbatasan. Posisi dan eksistensi pemerintah Kelurahan tidak memiliki otonomi yang memadai, karena di kendalikan secara terpusat dan hierarkis dengan regulasi pemerintah supra desa. Konsekuensinya,

pemerintah desa (Kepala Desa/ Lurah) mempunyai akuntabilitas hukum dan politik kepada pemerintah supra Desa/ Kecamatan/ Kota.

Sebagai organisasi yang berbasis partisipasi masyarakat dalam praktek pemerintahan Kelurahan sehari-hari, masyarakat sipil (*civil society*) selayaknya tidak eksploif dan aksesibel bagi seluruh masyarakat dan terbuka terhadap pertimbangan publik. Bagaimana organisasi sosial yang ada mampu mengakomodasi dan penyaluran aspirasi anggotanya kepada pemerintah Kelurahan selaku pembuat kebijakan lokal, sementara keberadaan mereka lebih banyak karena di bentuk oleh pemerintah Desa sendiri. Mereka harus bisa memainkan peran penting sebagai intermediary dan arena kemitraan antara masyarakat dan Negara.

Kalau *civil society* berbicara tentang organisasi yang sukarela dan *non profit*, maka *private sector* (pelaku ekonomi) bagaimana mencari dari keuntungan melalui proses produksi, distribusi pasar merupakan arena paling dekat dan nyata bagi pelaku ekonomi untuk melakukan pertukaran dan pencarian keuntungan. Sementara *good governance* menganjurkan demokrasi ekonomi , pasar yang kompetitif secara sehat dan *coorporate governance* sebagai ciri khas ideal (baik) masyarakat ekonomi artinya bagaimana para pelaku ekonomi Kelurahan tersebut mampu berelasi dengan pasar, sumber permodalan dan pemerintah Desa.

Kesempatan dan akses pelaku dan organisasi ekonomi kelurahan terhadap sumber permodalan yang disediakan Negara, akses terhadap kebijakan pemerintah Kelurahan dan akses masuk pada dunia pasar. Sementara dari hasil penelitian IRE menyebutkan sejumlah masalah yang menjadi hambatan terwujudnya *governance*

dibidang ekonomi, antara lain kuatnya intervensi Negara yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan lemahnya organisasi ekonomi dan modal sosial yang ada.

B. Interaksi Aktor Governance

Hasil Penelitian IRE menyebutkan bahwa *governance* atau dalam perkembangan sekarang disebut *good governance* (tata pemerintahan yang baik) adalah sebuah model yang relevan untuk membingkai pembaharuan pemerintah Desa, karena didalamnya melibatkan pemerintah dan bukan pemerintah. Pemerintah Kelurahan di maknai sebagai institusi pemerintahan terendah menurut Undang-undang No.22 tahun 1999, termasuk dalam pengertian disini adalah Desa. Jadi *governance* memandang Negara/ pemerintah dan masyarakat berada dalam posisi sejajar yang bersama sama dan belajar mengelola pemerintahan. Perspektif baru tentang pemerintahan dan perubahan perannya dalam masyarakat, merupakan jantung *governance*, oleh karena itu perlu adanya identifikasi siapa saja yang termasuk pemerintahan dan bukan pemerintahan tersebut.

1. Identifikasi aktor.

a) *State/* pemerintah

Sebagai pilar pertama *governance*, *state* di maknai sebagai Negara maupun pemerintah (termasuk di dalamnya lembaga eksekutif dan legislatif). Kata Negara menurut Maknus Suseno, mempunyai dua pengertian yaitu pertama Negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politik, kedua Negara sebagai lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis, kedua negara sebagai lembaga pusat

yang menjamin kesatuan politis, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Artinya Negara di maknai sebagai pusat pemersatuan masyarakat atau warganegaranya serta memiliki fungsi dasar dan hakiki sebagai pembuat ketetapan, aturan-aturan kelakuan yang mengikat warga masyarakatnya.

Oleh karena itu salah satu tugas utama Negara di masa datang yang paling penting adalah penciptaan suatu lingkungan politik yang kondusif bagi *sustainable human development* dengan meredefinisi peranan pemerintah di dalam integrasi sosial, ekonomi serta proteksi lingkungannya. Sementara itu dalam posisi lain, *state* menjalankan fungsi-fungsi utama pemerintahan yaitu pelayanan (*service*), pengaturan (*regulating*) bagaimana cara melayani masyarakat dan fungsi pengajaran supaya masyarakat berdaya (*Empowering*).

b) *Private sector*.

Private sector atau pihak swasta, selama ini telah memainkan peran yang penting dalam pembangunan melalui pendekatan pasar. Pendekatan ini berkaitan dengan penciptaan kondisi dimana produksi barang dan jasa berjalan dengan baik dengan dukungan lingkungan yang mapan untuk melakukan aktifitas sektor swasta dalam suatu bingkai kerja “ *incentive and reward* “ secara ekonomi bagi individu maupun organisasi. Sementara dalam perspektif ekonomi seperti yang dikemukakan oleh WJ Stanton, pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya.

Dalam interaksinya sebagai pilar governance, sektor ini menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- (1) Keberhasilan kegiatan usaha di dasarkan pada keunggulan dari operasi yang efektif, efisien, kreatif dan inovatif dalam iklim ekonomi dan keinginan pasar yang terus berubah.
- (2) Setiap individu atau badan yang terlibat dalam usaha mempunyai tanggung jawab moral untuk menolak praktek-praktek yang bertentangan dengan persaingan tidak adil.
- (3) Setiap individu atau badan yang terlibat dalam usaha harus mematuhi asas-asas untuk melindungi kepentingan semua *stakeholders* perusahaan, termasuk pemilik/ pemegang saham, karyawan, pelanggan dan masyarakat umum.
- (4) Setiap individu atau badan yang terlibat dalam usaha akan mematuhi asas dan praktek dari *Good Corporate Citizenship*, antara lain dengan melindungi lingkungan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan masyarakat di sekitarnya.

c. *Civil society*.

Istilah *civil society* yang kini di terjemahkan dengan masyarakat kewarganegaraan atau masyarakat madani, tampaknya semakin mendapat tempat dalam wacana politik Indonesia. Diakui bahwa pemahaman atas *terminology* tersebut masih terus berkembang dan karenanya persilangan pendapat menjadi tidak terelakkan. Situasi ini merupakan sebuah kewajaran, karena kondisi ini juga terjadi di Negara Negara yang notabenehnya sudah mengenal *terminology* ini, baik dalam

wacana ilmiah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang di sampaikan oleh Hikam, bahwa dengan keragaman dalam pemahaman ini, sintesa-sintesa baru dan gagasan-gagasan yang masih orisinal di harapkan muncul, sehingga bisa menyumbangkan pemahaman yang lebih baik untuk konteks Indonesia, sedangkan menurut Heningsen, *civil society* secara institusional diartikan sebagai pengelompokan dari anggota-anggota masyarakat sebagai warganegara mandiri yang dapat dengan bebas dan egaliter bertindak aktif dalam wacana dan praktis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kemasyarakatan pada umumnya. Sependapat dengan ini, menurut Moehtar Mas'ood bahwa NGO sebagai salah satu bentuk *civil society* merupakan pengelompokan masyarakat secara mandiri untuk mengatasi suatu masalah sosial yang dihadapi, dimulai dari aktifitasnya secara mandiri dan spesifik.

Kondisi ini sebagai isyarat keharusan adanya kebebasan dan keterbukaan untuk berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat serta kesempatan yang sama dalam mempertahankan kepentingan di depan umum. Dalam diri *civil society* telah menyiratkan kemandirian dan kematangan politis, sehingga ia tidak perlu sepenuhnya tunduk kepada Negara atau hanya sebagai alat bagi kelas tertentu. Justru *civil society* dalam pengertian ini merupakan suatu entitas yang keberadaannya menerobos batas-batas kelas serta memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang (*balancing force*) dari kecenderungan intervensi Negara.

Pada saat yang sama mampu melahirkan kekuatan kritis reflektif (*reflectif forces*) dalam masyarakat yang dapat mencegah atau mengurangi derajat konflik-konflik internal sebagai akibat dari proses formasi *social modern*. Dengan demikian, *civil society* mengandaikan pula sebuah *political society* didalamnya. Oleh karena itu, menurut pandangan filosofis Hannah Arendt *civil society* yang reflektif tersebut mengisyaratkan pentingnya wacana publik dan keberadaan ruang publik yang bebas (*a free public sphere*).

Kedua elemen inilah, esensi dari *civil society*, karena disanalah tindakan politik yang sebenarnya dan bermakna dapat benar-benar terwujud. Pada ruang publik yang bebaslah secara normatif, individu-individu dalam posisinya yang setara dapat melakukan interaksi wacana (*discursive transaction*) dan praktis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran. Secara teoritis, ia dapat diartikan sebagai ruang dimana anggota masyarakat sebagai warga Negara mempunyai akses sepenuhnya terhadap semua kegiatan publik.

Dalam konteks Kelurahan, berbicara *civil society* sebenarnya dapat dikenali dari banyak sekali organisasi sosial yang hidup di Desa. Baik yang bersifat korporatis (bentukan Negara dari atas, seperti RT/RW, PKK, LKMD dan lain-lain), maupun partisipatoris (bentukan dari masyarakat-masyarakat dari bawah, seperti kelompok arisan, kelompok pengajian, keagamaan dan lain-lain). Mereka berhak melakukan kegiatan-kegiatan secara merdeka, tidak ada tekanan atau intervensi dari pihak luar, didalamnya terdapat forum untuk

menyampaikan pendapat secara lisan atau tertulis, lebih lanjut menurut Habermas, secara institusional ruang publik disini termasuk media massa, tempat tempat pertemuan umum, parlemen dan sekolah-sekolah. Melihat konsep-konsep tentang *civil society* sebagaimana disampaikan oleh para pelopornya, setidaknya ada tiga ciri utamanya yaitu :

- (1) Adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan Negara (*State*).
- (2) Adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga Negara melalui wacana dan fraksis politik yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- (3) Adanya kemampuan membatasi kekuasaan negara agar ia tidak interfensionis.

2. Identifikasi pola interaksi *governance*

Good governance menekankan adanya interaksi yang intensif dan baik. Menurut Muhadjir Darwin, *Good Governance* dikatakan berhasil apabila otoritas terdesentralisasi pada pusat pusat kekuasaan yang banyak (tidak terkonsentrasi disatu tangan) yang satu dengan yang lainnya saling mengontrol (*cheks and balance*). Hal ini berarti seluruh komponen masyarakat memiliki akses dan keberdayaan yang kurang lebih sebanding, lalu membangun kolaborasi/ kerjasama sehingga membentuk suatu jaringan yang saling mendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakatnya.

Adanya posisi yang seimbang antara aktor, dimaksudkan agar kolaborasi tersebut tidak berat sebelah sehingga dapat tercipta *chek and balance*. Selain itu, agar dapat terwujud jaringan yang kokoh antar komponen masyarakat di perlukan kepercayaan yang bersifat timbal balik (*mutual trust*). Kepercayaan merupakan salah satu modal sosial (*Social capital*) yang diperlukan demi tegaknya tertib sosial. Dengan adanya kepercayaan (tidak ada yang saling curiga) terhadap apa yang di kerjakan salah satu atau beberapa diantara aktor-aktor yang terlibat, maka akan semakin memudahkan pencapaian tujuan. Karena diantara aktor tersebut akan memunculkan kreatifitas dan inovasi baru guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugasnya.

3. Karakteristik interaksi *governance*

Kata kunci lain dari *good governance* adalah mampu melahirkan transparansi dan akuntabilitas. Tidak mungkin jejaring/ *net working* terbangun dengan kuat jika tidak ada keduanya. Transparansi diperlukan agar aksi oleh satu pihak dapat dikontrol oleh aktor lainnya, dan akuntabilitas merupakan konsekuensi yang harus ada agar transparansi menjadi bermakna, karena masing-masing aktor dituntut untuk dapat bertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat kepada masyarakat.

Sementara menurut tim asistensi AKIP LAN dan BPKP menyatakan bahwa interaksi ketiga aktor *governance* tersebut akan memunculkan atau memiliki sembilan karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut selanjutnya di sebut *Good Governance* yang meliputi:

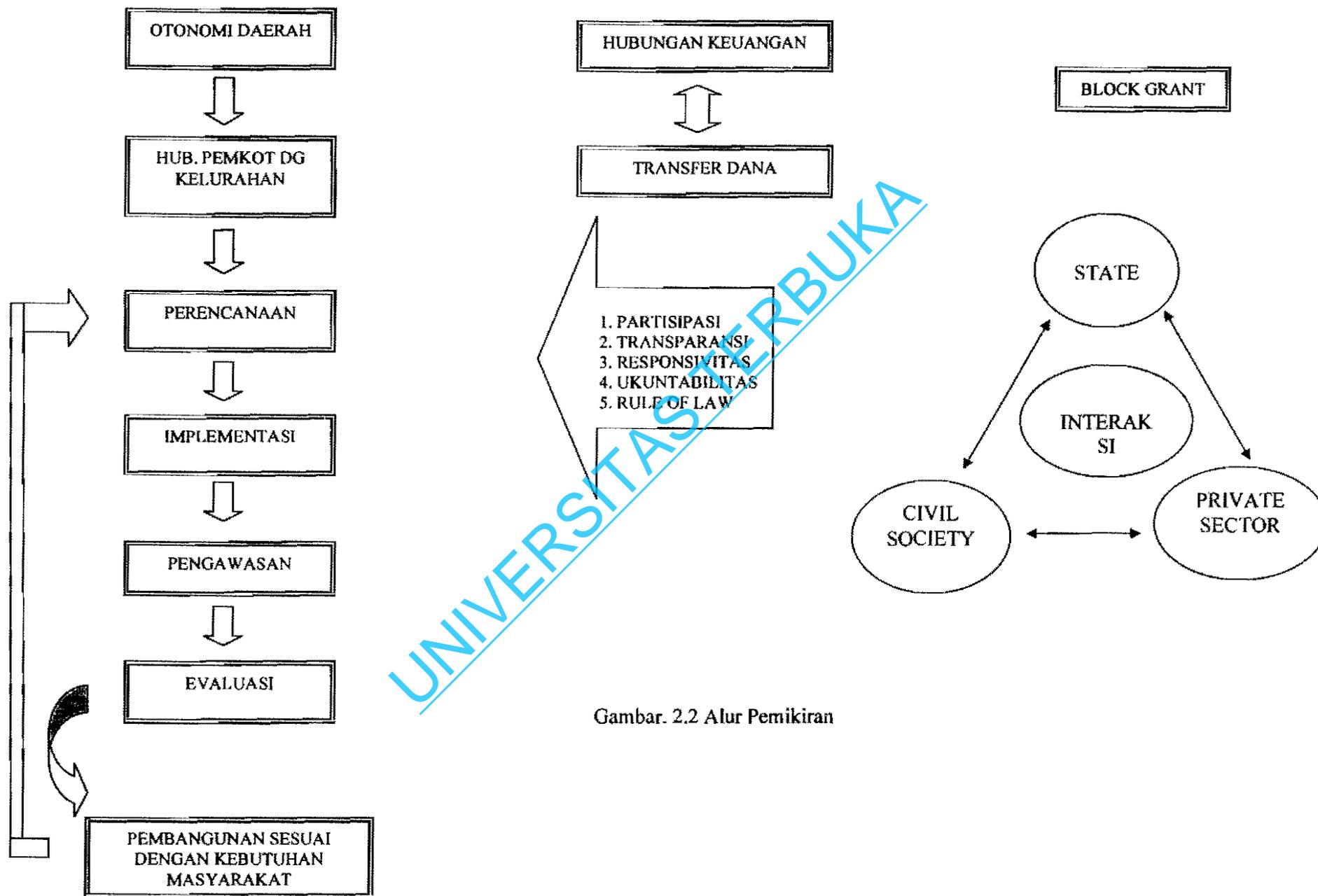
- a. *Participation* (Partisipasi masyarakat);
- b. *Rule of Law* (Penegakan dan kepastian hukum);
- c. *Transparency* (Keterbukaan);
- d. *Responsiveness* (responsive);
- e. *Consensus orientation* (Berorientasi pada kesepakatan)
- f. *Equity* (keadilan atau kesetaraan)
- g. *Efficiency dan Effectiveness* (efektif dan efisien);
- h. *Accountability* (akuntabilitas)
- i. *Strategic Vision* (Mempunyai visi yang strategis).

Dalam perkembangan selanjutnya, Bangsa Dunia lebih menekankan pada empat prinsip penting *good governance* sebagai hasil interaksi antara aktor tersebut, yaitu *accountability, participation, rule of law* dan *transparency*.

Mengingat lokasi penelitian ini terbatas pada tingkat Kelurahan, sehingga yang perlu mendapat perhatian bahwa menyusun daftar panjang sebagai bukti adanya keanekaragaman prinsip yang dihasilkan tetapi tidak dapat dilaksanakan, tetapi lebih baik memfokuskan yang paling utama, tetapi dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Bukan berarti karakteristik yang lain tidak penting. Oleh karena itu, focus penelitian diarahkan pada lima karakteristik yang muncul sebagai *values* yang diperjuangkan dalam interaksi antara aktor-aktor yang terlibat di dalam pengelolaan dana *block grant* tersebut, yaitu :

x

- 1) Partisipasi, sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik langsung maupun tak langsung atas dasar kebebasan berasosiasi, berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif.
- 2) Transparansi, yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- 3) Responsivitas, yaitu kemampuan untuk meningkatkan kepekaan atau daya tanggap para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali.
- 4) Akuntabilitas, yaitu adanya pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktifitas yang dilakukan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
- 5) Rule of Law, yaitu adanya komitmen yang kuat untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.



Gambar. 2.2 Alur Pemikiran

Arah penelitian ini di tujukan pada :

1. Bagaimana interaksi / kerjasama antara *state- private sector- civil society* (aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan dana *blok grandt*), khususnya pada tahap perencanaan dan implementasi (sebagai fokus penelitian);
2. Apakah dalam interaksi tersebut terdapat partisipasi, transparansi, responsivitas, akuntabilitas dan *rule of law* (semuanya adalah *values* atau karakteristik *good governance*);

4. Anggaran Kelurahan

a. Konsep Anggaran Kelurahan

Pada hakekatnya anggaran adalah sebuah pernyataan tentang perkiraan penerimaan dan pengeluaran terjadi dalam sebuah rentang waktu tertentu di masa yang akan datang serta realisasinya dimasa yang lalu. Oleh karena itu, anggaran harus dapat mencerminkan kebutuhan *real* masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, karena anggaran ini merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah Daerah, didalamnya merupakan muara dari tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit kerja.

Pada tingkat kelurahan, yang dimaksud anggaran Kelurahan adalah pernyataan tentang perkiraan penerimaan dan pengeluaran keuangan Kelurahan dalam satu tahun, sebagai penjabaran dari tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Pada sisi penerimaan, anggaran Kelurahan berasal dari; pertama bantuan/ subsidi pemerintah kota; kedua swadaya masyarakat. Sementara pada sisi pengeluaran, dicantumkan program/ kegiatan yang

berupa proyek pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka satu tahun. Satu satuan proyek pembangunan ini membuat batas tertinggi nilai proyek dalam bentuk rupiah.

b. *Blok Grandt* Kelurahan

Sebagai salah satu sumber penerimaan anggaran Kelurahan, bantuan atau subsidi (*grandt*) ini memiliki sifat umum dan fleksibel. Bersifat umum, karena tidak ada syarat khusus bagi daerah penerima untuk mendapatkan bantuan/ subsidi ini, dengan kata lain semua Kelurahan yang berada diwilayah kota tentu akan mendapatkannya. Sedangkan fleksibel, mengandung pengertian bahwa daerah penerima (Kelurahan) mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana ini, walaupun ada aturan penggunaan dari pemerintah, sifatnya fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Oleh karena itu, yang terpenting dalam dana ini adalah tidak adanya “Kekakuan” aturan penggunaan dari pemerintah pemberi.

Senada dengan pengertian tersebut, Davey memberikan pengertian *grant* sebagai alokasi dana bantuan atau subsidi (kedua kata ini saling menggantikan) kepada pemerintah daerah yang mandiri (*devolved*) seperti pemerintah Negara bagian di Negara vederal atau pemerintah daerah otonom. Alokasi dana ini dapat di berikan dalam bentuk yang paling lazim berupa hibah (dalam terjemahan digunakan istilah “bantuan”), subsidi, kontribusi. Namanya berbeda, tetapi pada hakekatnya sama yaitu, transfer dana dari anggaran dan pembukuan pemerintah pusat kepada pemerintahan regional yang mandiri pembukuannya.

c) Mekanisme anggaran kelurahan.

Kejelasan formula alokasi anggaran kelurahan dari pemerintah daerah, akan memberikan kontribusi berupa kemudahan bagi kelurahan untuk menyusun anggarannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu mekanisme penataan dan pengelolaan keuangan yang bersandar pada prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu :

1. Mengutamakan tujuan pemerataan dan keadilan dalam formula anggaran keuangan kelurahan,
2. Memungkinkan proses penyusunan anggaran yang bersifat *bottom up* dan *participatory budget*,
3. Memberi ruang pengelolaan dana yang partisipatif, kemitraan dan kesejajaran antara pemerintah dengan lembaga lain di kelurahan,
4. Masyarakat dilibatkan mulai dari sosialisasi anggaran, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang mampu menjamin transparansi, Dalam menjalankan anggaran harus sesuai dengan aturan main, sehingga menjamin adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan;
5. Proses pengelolaan keuangan yang konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin keberlanjutan program,
6. Memungkinkan pengawasan yang efektif oleh lembaga perwakilan dan masyarakat kelurahan melalui forum warga yang tersedia.

d) Siklus Anggaran

(1) Perencanaan

Sebagai tahap awal pelaksanaan proyek, proses yang dilaksanakan meliputi pengumpulan data melalui penjangkauan aspirasi

dari masing- masing wilayah RT/RW sebagai bahan acuan rencana kegiatan. Data yang digali dapat berupa rencana kegiatan sebelumnya yang belum dapat di kerjakan atau memang benar-benar belum pernah dikerjakan. Seluruh rekapitulasi data pada tahap pertama disusun , untuk dibahas menjadi skala prioritas proyek dengan asumsi adanya keterbatasan sumber dana.

Proses selanjutnya adalah pembahasan plafon anggaran dari masing-masing prioritas proyek yang telah ditetapkan. Dengan memperhitungkan prioritas serta efektivitas volume kegiatan, penetapan plafon anggaran dilakukan, setelah memperoleh gambaran yang jelas mengenai sumber pembiayaan yang dapat diperkirakan untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh karena itu Plafon anggaran harus terperinci dalam kegiatannya.

(2). Implementasi

Anggaran yang telah di rencanakan harus dapat dilaksanakan dengan baik, artinya pelaksanaannya harus tertib dan disiplin, sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai secara berdaya guna dan hasil guna. Oleh karena itu, di perlukan keterlibatan seluruh potensi masyarakat setempat agar pelaksanaan proyek berjalan lancar. Bentuk-bentuk keterlibatan potensi masyarakat tersebut, tidak terbatas pada material yang diberikan, tetapi lebih dari itu sumbangan pemikiran, tenaga, konsumsi, dan lain-lain yang ditujukan agar keberhasilan proyek merupakan wujud nyatanya.

(3). Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan atau proses untuk menyakinkan, bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan rencananya. Sedangkan menurut Manullang, pengawasan merupakan suatu proses yang menetapkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan apa yang direncanakan, sependapat Siagian, pengawasan diarahkan pada proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya. Hal ini mengandung maksud agar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan beerjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sedangkan fungsinya adalah mencegah kebocoran dan keborosan, serta memperlancar pelaksanaan pekerjaan.

(4) Evaluasi

Sebagai umpan balik dari pelaksanaan pengawasan adalah adanya tindakan evaluasi yang diikuti dengan rencana tindak lanjut. Sebagai upaya untuk memberikan penilaian terhadap kegiatan/ proyek yang telah dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada penyimpangan atau keberhasilan. Penilaian ini lah yang dijadikan acuan untuk menyusun rencana tindak lanjut pada tahun berikutnya.

E. Definisi konsepsional

Dari uraian teori yang disampaikan, penulis dapat memberikan definisi konsepsional sebagai berikut :

1. *Good governance* adalah tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu adanya interaksi peran dan fungsi secara *partisipatif, transparansi, responsivitas, akuntabilitas, dan rule of law* antara pemerintah, pihak swasta, dan *civil society*.
2. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik langsung maupun tak langsung atas dasar kebebasan berasosiasi, berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif.
3. Transparansi adalah menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Responsivitas adalah mampu meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali.
5. Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
6. *Rule of law* adalah adanya komitmen dan usaha mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

7. *Block grant* adalah dana bantuan yang penggunaannya tidak memerlukan persyaratan tertentu dari pihak pemberi, atau ada pembatasan tetapi tidak ketat (penggunaannya bersifat fleksibel).
8. Pengelolaan *blok grant* adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola dana *blok grant*, mulai dari perencanaan, implementasi, pengawasan dan evaluasi, sebelum hasilnya diserahkan kepada masyarakat.
9. *Good governance* dalam Pengelolaan *blok grant* dalam penelitian ini adalah tata pemerintahan yang baik dalam mengelola dana *block grant* untuk mewujudkan pembangunan di Kelurahan, didalamnya terdapat adanya interaksi peran dan fungsi yang *partisipatif, transparansi, responsivitas, akuntabilitas* dan *rule of law* antara pemerintah, swasta dan *civil society* pada tahap perencanaan dan implementasinya.
 - a. Definisi operasional

Good Governance dalam Pengelolaan *blok grant* didefinisikan secara operasional sebagai tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat Kelurahan. Situasi ini dapat cermati melalui interaksi antara pemerintahan Kelurahan, LPMK, BKM, RT/RW, pelaku ekonomi, dan masyarakat di tingkat kelurahan pada tahap perencanaan dan implementasinya dalam mengelola dana *block grant* apakah terdapat: *transparansi, responsivitas, akuntabilitas* dan *rule of law*, dengan indikator sebagai berikut :

1) Pada tahap perencanaan , interaksi antar aktor aktor tersebut adalah :

a) Partipatif, dapat di lihat dengan tolok ukur.

(1) Pelaksanaan rapat/ musyawarah Kelurahan dalam perencanaan program-program yang akan didanai dari *block grant*.

(2) Siapa saja yang di undang dalam rapat perencanaan tersebut.

b) Transparansi, dengan tolok ukur.

Sosialisasi program *block grant* kepada masyarakat:

(1) Proses penentuan skala prioritas usulan proyek.

(2) Adanya media informasi yang memuat hasil prioritas proyek yang akan di laksanakan.

c) Responsivitas, dengan tolok ukur.

(1) mekanisme penjaringan usulan proyek dari masyarakat.

(2) Apakah prioritas proyek sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

d) Akuntabilitas.

Dengan perencanaan yang partisipatif dan transparan, secara langsung sudah menunjukkan adanya pertanggung jawaban perencana kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, tolok ukur akuntabilitasnya adalah partisipasi dan transparansi di atas.

e) *Rule of law*.

- (1) Tingkat kesesuaian program dengan alokasi dana.
- (2) Tidak pemaksaan kehendak dalam menentukan prioritas proyek

2) Implementasi, interaksi antara aktor aktor tersebut yang.

a) Partisipatif, dapat di lihat dengan tolok ukur.

- (1) Kontribusi yang di berikan pelaku ekonomi kelurahan dalam pelaksanaan proyek.
- (2) Proyek.
- (3) Keterlibatan dalam pelaksanaan proyek-proyek.

b) Transparansi, dengan tolok ukur

- (1) Sosialisasi program *block grant* kepada masyarakat.
- (2) Kemudahan akses masyarakat terhadap pelaksanaan proyek.

c) Responsivitas, dengan tolok ukur.

- (1) Tingkat komplain masyarakat terhadap pelaksanaan proyek.
- (2) Cara cara yang di tempuh pemerintah kelurahan dan LPMK dalam menyelesaikan komplain tersebut.

d) Akuntabilitas, dengan tolok ukur.

- (1) Bentuk bentuk pertanggung jawaban dari pelaksana proyek, seperti kompensasi, musyawarah kepada masyarakat yang terkena proyek.
- (2) Mekanisme pertanggung jawabannya.

- e) *Rule of law*, dengan tolok ukur.
 - (1) Konsistensi aturan antara rencana kebutuhan biaya dengan pelaksanaan proyek.
 - (2) Kejelasan tugas masing-masing pelaksana proyek.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

METHODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian Meliputi:

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan deskriptif metode kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, (1995) mendefinisikan metode kualitatif sebagai metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang di amati. Penelitian mengandung lima ciri, yaitu: *Natural setting* (dikumpulkan dari alam nyata), dalam situasi bagaimana apa adanya dengan peneliti sebagai instrumen kecil, bersifat deskriptif, lebih mengutamakan proses dari pada hasil, analisis data secara induktif dan *meaning* (makna) merupakan perhatian utama.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif artinya data yang di analisis dan hasil-hasilnya berbentuk deskripsi fenomena, tidak berupa angka angka atau koefisien tentang hubungan antar variabel. Menurut Nawawi (2003) mendeskripsikan metode deskripsi sebagai prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek yang di teliti, seperti individu, lembaga, masyarakat dan lain lain pada saat yang sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. *Interview* (wawancara)

Menurut Moleong (1995), menyatakan bahwa wawancara merupakan sesuatu kegiatan untuk memperoleh informasi dengan memberikan kerangka dari garis besar pokok-pokok yang akan di tanyakan. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang di perlukan berkaitan dengan penelitian ini.

2. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca atau mempelajari berbagai tulisan-tulisan, catatan-catatan atau arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian.

3. Observasi

Berupa pengamatan secara langsung terhadap berbagai fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam kaitannya ini peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengamati fenomena yang terjadi, selanjutnya dari hasil pengamatan ini akan di adakan evaluasi.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan *sampling* mengarah kepada *generalis* teoritis, menggunakan teknik dengan sumber data yang di pakai berasal dari :

1. Data umum

Data yang di peroleh dari data data tentang gambaran umum Kelurahan Tuatunu Indah, meliputi keadaan geografis, demografis, ekonomi, sosial dan budaya, administrasi pemerintahan, LPMK, RT/RW, kelompok pelaku ekonomi dan *civil society* di Kelurahan tersebut.

2. Data khusus, yaitu data-data yang berhubungan langsung dengan interaksi antara pemerintahan Kelurahan, LPMK, BKM, RT/RW, kelompok pelaku ekonomi dan *civil society* dalam mengelola dana *block grant*.

3. Unit anilisi, populasi dan *sampel*, yaitu unit dari mana informasi di kumpulkan sekaligus sebagai basis untuk melakukan analisis dan menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah instansi pemerintah Kelurahan termasuk di dalamnya LPMK, BKM dan RT/RW, pelaku ekonomi dan *civil society* di Kelurahan. Dengan populasi perangkat kelurahan (termasuk pengurus LPMK, BKM, RT/RW) pelaku ekonomi di Kelurahan (pemilik toko/ warung, pengusaha bangunan/ material, penyedia tenaga kerja dan *civil society*) (LSM, perkumpulan agama/ olah raga/ sosial).

Dengan sampel penelitian diambil secara *purposive sampling* karena populasinya sudah di kenal dan di tentukan sebelumnya, yaitu :

1. Pemerintah sebagai *state*, yaitu perangkat Kelurahan (lurah, sekretaris, kepala seksi, pengurus LPMK) semuanya 18 orang sesuai dengan pengambilan *sample* penelitian secara *purposive*.
2. Sektor bisnis Kelurahan di ambil dari para pemilik toko/ warung, pengusaha bangunan/ material, penyediaan tenaga kerja masing-masing 3 orang sesuai kondisi lapangan dengan pengambilan sampel secara *purposive*.
3. Sebagai *civil society* diambil dari BKM, LSM, perkumpulan agama/ olahraga/ sosial masing masing 3 orang dan RT/RW yang ada di Kelurahan Tuatunu Indah

D. Metode Anilisi Data

Metode analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisa interaktif yang meliputi :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Merupakan proses seleksi, penfokusan dan penyederhanaan data yang di peroleh di lapangan. Tahap ini akan berlangsung secara terus menerus mulai dari awal sampai akhir penelitian.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Merupakan sekumpulan informasi yang memungkinkan sesuatu kesimpulan dapat di ambil

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Merupakan analisa data yang di lakukan, di mana data tersebut semakin lama semakin jelas. Dalam proses ini landasan

landasan yang kuat sangat di perlukan agar verifikasi yang di buat dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.

E. Analisis

Analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang di peroleh dari hasil penelitian, seperti yang di kemukakan oleh Sofyan Effendi dan Cris Manning dalam Singarimbun (1995) bahwa analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di interprestasikan. Dalam penelitian ini, data yang di peroleh baik itu data primer ataupun data sekunder di sajikan dalam suatu laporan secara terinci dan sistematis yang meliputi:

- a. Data yang diperoleh dari hasil penelitian sebagai data skunder atau dokumentasi pada pemerintahan Kelurahan Tuatunu Indah.
- b. Jawaban dari hasil wawancara dengan para informan kunci.
- c. Data dari sumber lain seperti majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

Setelah data terkumpul langkah berikutnya adalah meneliti dan mengklarifikasi dan menganalisa berdasarkan jenis masalah dan diolah serta di interprestasikan secara kualitatif. Dalam analisa kualitatif penulis akan menggunakan teknik mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan hasil penelitian.

Langkah berikutnya yaitu melakukan analisis secara komparatif atau membandingkan antara dua, tiga atau lebih kejadian

dengan melihat faktor penyebabnya atau terhadap variable yang masih mandiri tetapi sampelnya lebih dari satu.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN

Kondisi Umum Kelurahan Tuatunu Indah

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Kondisi geografis Tuatunu Indah sama seperti daerah atau Kelurahan yang lain yang ada di kota Pangkalpinang. Wilayah Kelurahan tuatunu Indah berada di Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dengan luas wilayah 2500 Ha, dengan batas batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang Kota pangkal Pinang,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Duren Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka,

Sementara jumlah penduduk sampai januari 2010 meliputi Jumlah Kepala Keluarga 1950 KK dengan terbagi dalam KK laki laki sebanyak 1727 KK dan KK perempuan sebanyak 223 KK. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia berdasarkan data dari Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah adalah:

Tabel. 4.1 Jumlah penduduk Kelurahan Tua Tunu Indah berdasarkan kelompok umur;

No	Umur (Tahun)	Penduduk	Laki laki	Perempuan
1	0 – 5	579	321	258
2	5 – 15	1620	815	805
3	16- 25	1682	910	772
4	26 – 35	1475	788	687
5	36 – 45	867	484	383
6	46 – 55	617	312	307
7	56 – 60	193	105	88
8	Umur di atan 60	395	199	196
9	KTP Seumur Hidup	67	26	41

Sumber; Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah 2010

Dari table tersebut di atas di ketahui jumlah penduduk Kelurahan Tua Tunu Indah berdasarkan kelompok umur katagori usia 16–25 tahun menempati jumlah terbesar, disusul usia 5-15 tahun dan diikuti jadi usia 26-35 tahun masuk dalam usia produktif. Dengan komposisi penduduk demikian di Tua Tunu Indah memiliki potensi tenaga produktif untuk membangun, sedangkan jumlah penduduk warga Negara asing berdasarkan kelompok usia berdasarkan sumber Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah 2010 tidak ada:

Tabel. 4.2 Jumlah penduduk warga Negara asing Kelurahan Tua Tunu Indah berdasarkan kelompok umur;

No	Umur (tahun)	Penduduk	Laki-laki	Perempuan
	0 – 5			
	5 – 15			
	16- 25			
	26 – 35			
	36 – 45			
	46 – 55			
	56 – 60			
	Umur di atan 60			
	KTP Seumur Hidup			

Sumber ; Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah 2010

Berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan Tua Tunu Indah 2010 mayoritas penduduk memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar yaitu 2389 orang dan diikuti pendidikan SMTA dan berikutnya SMP. Dengan dominasi pendidikan di SD memberikan gambaran bahwasanya SDM menjadi persoalan yang serius dan harus menjadi prioritas untuk di bangun karena pendidikan formal merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam mendukung proses pembangunan wilayah.

Tabel 4.3. Jumlah penduduk menurut pendidikan.

No	Pendidikan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1.	TK	89	41	48
2.	SD	2389	1168	1221
3.	SMP	714	323	391
4.	SMTA	795	344	451
5.	PT	98	36	62

Sumber ; Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah 2010

Dari table 4.4 yang bersumber dari Kelurahan Tua Tunu diperoleh gambaran bahwasanya mayoritas masyarakat tuatunu adalah petani, diikuti sebagai buruh selanjutnya wirasawasta, ini memberikan gambaran bahwasanya profesi sebagai petani masih mendominasi, artinya di Kelurahan Tua Tunu Indah bergerak dan tergantung dengan dunia pertanian. Hal ini dapat di lihat ritme hidup yang di jalani sehari hari. Ketergantungan dengan alam sangat erat untuk memenuhi hajat hidup masyarakat di Kelurahan Tua Tunu Indah.

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencapaian.

No	Mata pencapaian	Jumlah	Laki Laki	Perempuan
1	PNS	86	56	30
2	Swasta	102	86	16
3	Wiraswasta	194	183	11
4	TNI	2	2	-
5	POLRI	17	16	1
6	Pedagang	170	143	27
7	Jasa	44	29	15
8	Nelayan	1	1	-
9	Tani	814	720	94
10	Pensiunan	11	8	3
11	Buruh	218	203	15
12	BUMN	6	6	-
13	Honor	3	2	-

Sumber ; Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah 2010

Jumlah penduduk menurut pemeluk Agama di Kelurahan Tua Tunu Indah. Mayoritas adalah beragama ISLAM yaitu sebanyak 7411 orang di ikuti agama Protestan dan katolik, komposisi ini sangat berpengaruh dalam kehidupan beragama, nuansa religius agama ISLAM yang di lakukan masyarakat Kelurahan Tua Tunu Indah.

Tabel 4.5. Jumlah penduduk menurut pemeluk Agama.

No	Pendidikan	Jumlah	Laki Laki	Perempuan
1.	ISLAM	7411	3922	3489
2.	Katolik	7	3	4
3.	Protestan	12	9	3
4.	Hindu	-	-	-
5.	Budha	-	-	-

Sumber; Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah 2010

Dari table 4.6 di peroleh gambaran bahwa masyarakat Kelurahan Tua Tunu Indah tingkat keragaman penduduk masih sangat sedikit artinya

cenderung homogen menurut kewarganegaraannya yaitu 7420 berbanding

10.

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk menurut Kewarganegaraan Indonesia.

No	Kewarganegaraan	Jumlah Penduduk	Laki laki	Perempuan
1	Warga pribumi	7420	3931	3489
2	Warga Keturunan	10	3	7

Sumber; Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah 2010

Jumlah Penduduk menurut Kewarganegaraan Asing di Kelurahan

Tua Tunu Indah Tidak ada:

Tabel 4.7. Jumlah Penduduk menurut Kewarganegaraan Asing.

No	Kewarganegaraan	Jumlah Penduduk	Laki laki	Perempuan
	Warga pribumi	-	-	-
	Warga Keturunan	-	-	-

Sumber; Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah 2010

Jumlah Lembaga perekonomian di Kelurahan Tua Tunu Indah di dominasi toko kelontong rumahan yang menyediakan kebutuhan hidup sehari hari.

Tabel 4.8. Jumlah Lembaga perekonomian di Kelurahan Tua Tunu Indah.

No	Lembaga perekonomian	Jumlah
1	Perumahan toko kelontong	69
2	Bank	
3	Asuransi	
4	Koperasi	1
6	Pabrik	
7	Industri	
8	Toko bangunan	1
9	Bengkel	
	- Motor	2
	- Mobil	1
10	Gudang	
11	Warung	

Sumber; Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah 2010

Sarana jalan di Kelurahan Tua Tunu Indah tahun 2010 terdiri jenis jalan kota yang menghubungkan Kelurahan Tua Tunu Indah kearah pusat kota pangkatpinang desa Air Duren dan jalan tanah merupakan jalan menuju ke kebun seluas 20 Km.

Tabel 4.9 Jumlah sarana jalan di Kelurahan Tua Tunu Indah tahun 2010:

No	Jenis jalan	Panjang jalan
1	Jalan Raya	-
2	Jalan Desa	-
3	Kota	10 Km
4	Tanah	20 Km

Sumber; Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah 2010

Jumlah Rumah Ibadah di Kelurahan Tua Tunu Indah tahun 2010 adalah: Untuk masjid sebanyak 3 unit dan surau adalah 6 unit sedangkan yang lainnya tidak ada. Kondisi ini sangat representative mengingat 95% Jumlah penduduk di Kelurahan Tua Tunu Indah tahun 2010 memeluk agama ISLAM.

Tabel. 4.10. Jumlah Rumah Ibadah di Kelurahan Tua Tunu Indah tahun 2010:

No	Jenis rumah ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Surau	6
3	Gereja	-
4	Vihara	-

Sumber; Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah 2010

Prasarana Kesehatan di Kelurahan Tua Tunu Indah tahun 2010 sudah cukup memadai namun jumlah sarana kesehatan anak dan ibu memerlukan perhatian yang lebih dan secara kwantitas perlu di tambah karena populasinya termasuk dominan.

Tabel 4.11. Jumlah Prasarana Kesehatan di Kelurahan Tua Tunu Indah 2010.

No	Prasarana	Jumlah
1	Rumah Sakit	
2	Puskesmas	1
3	Rumah Bersalin	
4	Balai Pengobatan	1
5	Posyandu	1
6	Dokter Praktek	
7	Pos KB	
8	Air : -PDAM -Pompa bor -Sumur -Sungai	8 12

Sumber; Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah 2010.

Sarana Pendidikan Kelurahan Tua Tunu Indah 2010 adalah; untuk sekolah SD sudah cukup, namun untuk SMP dan SMA belum memerlukan penambahan karena jarak yang dekat dengan sekolah di luar Tuatunu baik SMP 3 maupun SMU 1.

Tabel 4.12. Jumlah Prasarana Pendidikan Kelurahan Tua Tunu Indah 2010

No	Sekolahan	Jumlah
1	TK	1
2	SD Negri	4
3	SD Inpres	-
4	SD Swasta	-
5	MI	1
6	SMP	-
7	SMA	-
8	SMK	-
9	Akademi	-

Sumber; Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah 2010.

Jumlah Prasarana Hiburan Kelurahan Tua Tunu Indah 2010 adalah berupa lapangan bola kaki sebanyak 2 unit dan lapangan olahraga lainnya adalah 2 unit, namun kondisi sarana tersebut perlu di perbaiki mengingat

kualitas sarana tersebut sangat jelek dan beresiko terjadinya cedera dengan kondisi lapangan yang bergelombang.

Tabel 4.13. Jumlah Prasarana Hiburan Kelurahan Tua Tunu Indah 2010.

No	Prasarana hiburan	Jumlah
1	Gedung bioskop	-
2	Gedung Kesenian	-
3	Taman Hiburan	-
4	Lapangan Bola	2
5	Lap Olahraga lain	3

Sumber; Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah 2010.

Kondisi penerangan di Kelurahan Tua Tunu Indah 2010 masih sangat kurang, jumlah pelanggan yang begitu banyak namun orang yang memiliki KWH prosentasenya sangat sedikit sehingga mereka berbagi dengan tetangga mereka.

Tabel 4.14. Jumlah alat penerangan di Kelurahan Tua Tunu Indah 2010

No	Penerangan	Jumlah
1	PLN	-
2	Non-PLN	-
3	Generator	-

Sumber; Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah 2010.

Jumlah Sarana Perhubungan di Kelurahan Tua Tunu Indah 2010, di dominasi sepeda motor yaitu sebanyak 60 unit berikutnya adalah sepeda sebanyak 21 unit dan pik up sebanyak 15 unit sebagai sarana usaha perdagangan hasil perkebunan.

Tabel 4.15. Jumlah Sarana Perhubungan di Kelurahan Tua Tunu Indah 2010

No	Sarana Perhubungan	Jumlah
1	Truk	3
2	Bis	-

3	Pik Up	15
4	Oplet	2
5	Sepeda	21
6	Jeep	5
7	Sepeda Motor	69
8	Sedan	2

Sumber; Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah 2010.

Jumlah rumah di Kelurahan Tua Tunu Indah tahun 2010 secara umum yang telah dalam katagori permanent sebanyak 448 unit dan dan semi permanent sebanyak 429 unit dan 10 unit untuk rumah non permanent.

Tabel 4.16. Jumlah rumah di Kelurahan Tua Tunu Indah tahun 2010.

No	Jenis perumahan	Jumlah
1	Permanen	448
2	Semi Permanen	429
3	Non Permanen	10

Sumber; Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah 2010.

Jumlah Alat komunikasi di Kelurahan Tua Tunu Indah mayoritas adalah dalam bentuk televisive sebagai alat informasi dan hiburan sebanyak 877 unit.

Tabel 4.17. Jumlah Alat komunikasi diKelurahan Tua Tunu Indah.

No	Alat komunikasi	Jumlah
1	Televisi	877
2	Radio	-
3	Telfon	-
4	Radio non RRI	-

Sumber; Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah 2010.

Tabel. 4.18. Jumlah ternak yang di usahakan di Kelurahan Tua Tunu Indah adalah;

No	Jenis ternak	Jumlah (ekor)
1	Sapi	16
2	Sapi perah	-
3	Babi	-
4	Ayam petelur	--
5	Kelinci	-
6	Kerbau	-

judul tabel

7	Kambing	-
8	Ayam potong	1300
9	Itik	
10	Dll	-

Sumber; Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah 2010

Ternak yang di usahakan di Kelurahan Tua Tunu Indah adalah masih sangat terbatas yaitu untuk ayam potong sebanyak 1300 ekor sedangkan ternak sapi ada 16 ekor, Potensi ternak sebenarnya sangat potential. Namun terkendala kultur masyarakat, untuk itu di perlukan rekayasa sosial agar terbiasa dengan dunia ternak;

Tabel 4.19 Jumlah Kelembagaan Kelurahan Tua Tunu Indah adalah:

No	Kelembagaan Kelurahan	Jumlah
1	LPM	1
2	Yayasan Sosial	-
3	Karang taruna	1
4	PKK	1
5	Hansip	22
6	Pramuka	-
7	KNPI	22
8	Taman Gizi	-
9	Ormas	2
10	Jumlah Pengurus LPM	11
11	Jumlah KPD	-
12	Tim Penggerak PKK	19
13	Kader PKK	48

Sumber; Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah 2010

Jumlah Kelembagaan Kelurahan Tua Tunu Indah sudah cukup memadai hanya pada kualitas organisasi memerlukan pembinaan yang lebih baik.

Tabel. 4.20. Jumlah Eks Napi/ Tahanan G 30 S PKI adalah;

No	Jenis	Jumlah
1	ET	-
2	ETI	-
3	Napi	4

Sumber; Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah 2010

Jumlah Eks Napi yang ada di Tua Tunu adalah sebanyak 4 orang

Tabel 4.21. Jumlah Ormas di Kelurahan Tua Tunu Indah adalah:

No	Ormas	Jumlah
1	AMPI	-
2	FKPPI	-
3	KNPI	-
4	KTI	-
5	PKK	67
6	REMAS	75

Sumber; Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah 2010

Jumlah Ormas di Kelurahan Tua Tunu Indah yang ada adalah terdiri remaja masjid sebanyak 75 orang dan anggota PKK sebanyak 67 orang.

Tabel 4.22. Data klasifikasi keluarga sejahtera di Kelurahan Tua Tunu Indah adalah;

No	Klasifikasi Keluarga	Jumlah
1	Pra sejahtera	1
2	KS 1	151
3	KS 2	800
4	KS 3	198
5	KS 3 Plus	-

Sumber; Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah 2010

Data klasifikasi keluarga sejahtera di Kelurahan Tua Tunu Indah pertama di dominasi pada KS 2 yaitu sebanyak 800 KK dan di susul 198 KK dan KS 1 sebanyak 151 KK;

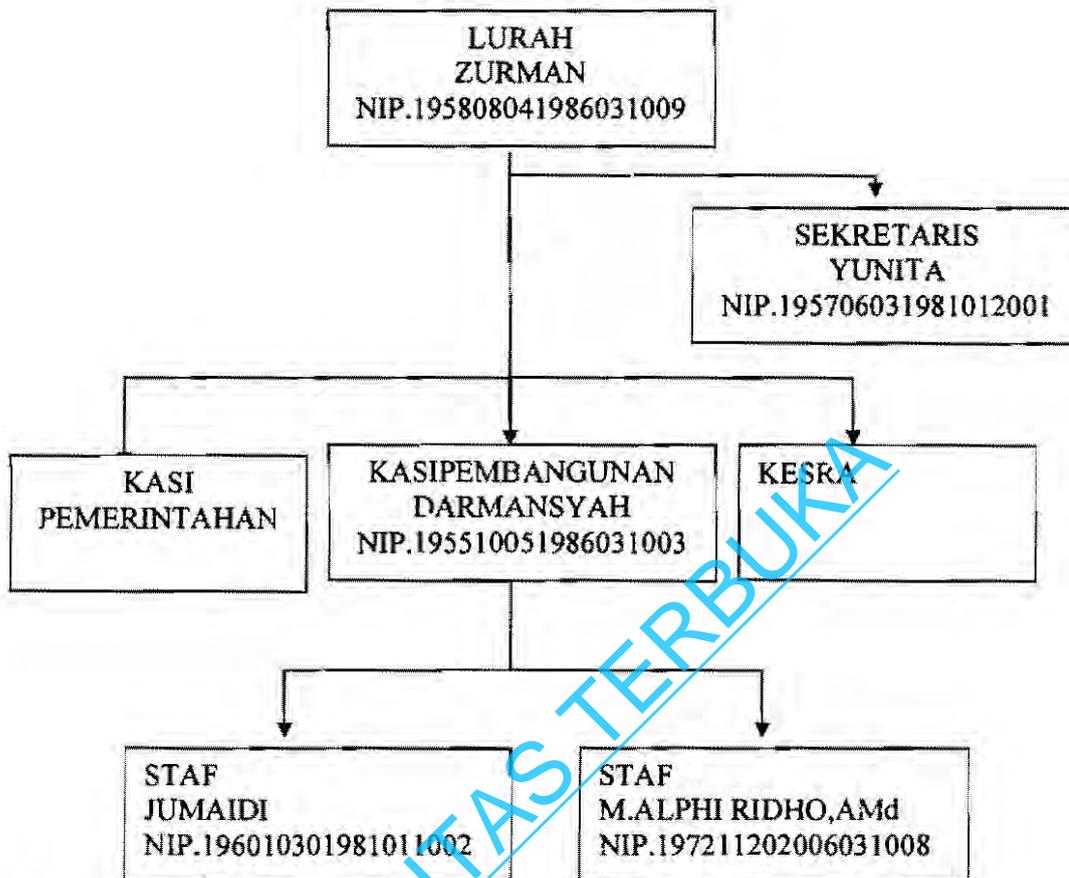
Tabel 4.23. Daftar perangkat RW dan RT di Kelurahan Tua Tunu Indah

No	Nama	Jabatan
1.	Sulaiman AR	Ketua RW. 01
2.	Jamaludin	Wakil Ketua RW 01
3.	A. Kadir.S	Sekretaris RW 01
4.	Ibrohim Yahya	Bendahara RW 01
5.	Jakpar Idris	Pembantu Umum 01
6.	Anuar Abdullah	Ketua Rt. 01
7.	Nasir	Wakil Ketua RT 01
8.	Daironi	Sekretaris RT 01
9.	Asbullah	Bendahara RT 01
10.	Hudri	Pembantu Umum 01
11.	Huzmi	Ketua RT. 02
12.	Samsul	Wakil Ketua RT 02
13.	Us Hol	Sekretaris RT 02
14.	Mentoh	Bendahara RT 02
15.	Pauzi	Pembantu Umum RT 02
16.	Junaidi	Ketua RT. 03
17.	Pendi Asin	Wakil Ketua RT 03
18.	Usman Suhaimi	Sekretaris RT 03
19.	Suhaili Ahmad	Bendahara RT 03
20.	Holid Usman	Pembantu Umum RT 03
21.	Abu Bakar	Ketua RW. 02
22.	M.Arsyad	Wakil Ketua RW 02
23.	Ibnu Arhab/Ambon	Sekretaris RW 02
24.	Muhammad HM	Bendahara RW 02
25.	A.Sani Amron	Pembantu Umum 02
26.	Rozi Ahmad	Ketua RT. 04
27.	Jakpar H.Latip	Wakil Ketua RT 04
28.	Jepriadi	Sekretaris R T04
29.	Sawaludin Thalib	Bendahara RT 04
30.	Huzmi	Pembantu Umum RT 04

No	Nama	Jabatan
31.	Ali Arsyad	Ketua RT. 05
32.	Arsyad Uyub	Wakil Ketua RT 05
33.	Zakaria	Sekretaris RT 05
34.	Sunan Bain	Bendahara RT 05
35.	Arsyad Sulaiman	Pembantu Umum RT 05
36.	Saipul Bahri	Ketua RT. 06
37.	Hotamar Rasid	Wakil Ketua RT 06
38.	Muh Zakaria	Sekretaris RT 06
39.	Umar Abas	Bendahara RT 06
40.	Ali.H Ahmad	Pembantu Umum RT 06
41.	Marsudi	Ketua RW 03
42.	M.Cholid Jais	Wakil Ketua RW 03
43.	Khailani	Sekretaris RT 03
44.	Syamsaimon	Bendahara RT 03
45.	Jakpar Idris	Pembantu Umum RT03
46.	Usman Ibrohim	Ketua RT. 07
47.	Muas Suhaimi	Wakil Ketua RT 07
48.	M.Rozi H . Latip	Sekretaris RT 07
49.	Syaiful Kamat	Bendahara RT 07
50.	Sanjaya Jarian	Pembantu Umum RT 07
51.	Yunus	Ketua RT. 08
52.	Sayadi	Wakil Ketua RT 08
53.	Mismawi	Sekretaris RT 08
54.	Kasmono	Bendahara RT 08
55.	Dahri	Pembantu Umum RT 08
56.	Munzir .ZN	Ketua Rt. 09
57.	Yusuf/Menton	Wakil Ketua RT 09
58.	Arsyad Jum	Sekretaris RT 09
59.	M. Zubir/Injul	Bendahara RT 09
60	Hendriyanto	Pembantu Umum RT 09

Sumber; Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah 2010

Struktur Organisasi Kelurahan Tua Tunu Indah



Gambar. 4.1 Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah

Sumber: Kantor Kelurahan Tua Tunu Indah 2010

Struktur Organisasi Kelurahan Tua Tunu Indah masih terjadi kekosongan pada jabatan Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesra dan kasi Pemerintahan.

B. KEBIJAKAN *BLOCK GRANT* DI KOTA PANGKAPINANG

Program Penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan,

demikian sepeggal kalimat yang di sampaikan Walikota Zulkarnaen Karim dalam forum Sosialisasi Program *Block grant* di hadapan DPRD, Kepala Dinas, Badan/Bagian, Camat dan Lurah se- Kota Pangkalpinang.

Program ini merupakan yang sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa institusi kepemimpinan masyarakat yang *representative*, mengakar dan menguat bagi perkembangan modal sosial masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan kemitraan masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli masyarakat.

Lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar *representatif* dan di percaya tersebut (secara *generic* disebut badan Keswadayaan Masyarakat atau disingkat BKM dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial (*capital social*) kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, BKM selain diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan.

Tiap BKM bersama masyarakat telah menyusun bersama masyarakat telah menyusun Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Ponarkis) secara partisipatif, sebagai prakarsa masyarakat

untuk menanggulangi kemiskinan diwilayahnya secara mandiri, Atas fasilitasi oleh pemerintah dan prakrsa masyarakat, BKM-BKM ini mulai menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Dengan cara menggali informasi dan menerima masukan dari berbagai pihak, mulai dari perangkat kecamatan, kelurahan sampai dengan tokoh masyarakat akhirnya kesimpulan awal bahwasannya.

- 1) Apabila tugas tugas dan persoalan di Kelurahan dapat di laksanakan dengan baik, sehingga segala permasalahan masyarakat dapat segera di pecahkan maka pekerjaan pemerintah kota menjadi lebih ringan.
- 2) Masyarakat setempat baik dari Kecamatan, Kelurahan, merupakan institusi yang paling tahu tentang kondisinya daerah tersebut.
- 3) Untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik, maka aparat di Kecamatan dan Kelurahan harus memperoleh sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Setelah di telaah dan masukan tersebut, seiring dengan penerapan otonomi daerah maka pemerintah Kota Pangkalpinang perlu mengadakan *desentralisasi fiscal* sampai pada level Kecamatan. *Desentralisasi fiscal* di maksud menitik beratkan pada-pola pendekatan *Community based development*, yaitu dengan cara menggali dan mengoptimalkan kekuatan/kemampuan pada komunitas masyarakat setempat . Masyarakat yang selama ini hanya sebagai obyek sekaligus penonton pembangunan daerah di wilayahnya di rubah menjadi pelaku dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat sejak awal proses pembangunan daerah menjadi perhatian dalam pendekatan ini.

Bentuk dari *desentralisasi fiscal* tersebut adalah program *block grant*, yaitu sebuah program pembangunan daerah yang menitik beratkan pada kemandirian masyarakat setempat. Dalam hal ini Pemerintah daerah sebatas memberikan alokasi dana (uang) yang akan di pergunakan untuk membiayai pembangunan tersebut. Masyarakat bersama pemerintah Kelurahan setempat lah yang lebih aktif merencanakan kebutuhan pembangunannya. Sehingga dana ini di harapkan dapat menstimulir mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kota Pangkalpinang melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat dan pihak swasta menuju *good governance* atau tata pemerintahan yang baik yaitu bagaimana menciptakan situasi yang dapat mendorong di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut semua elemen terlibat dan legitimasi hasil kegiatan dapat di percaya.

Sebagai ilustrasi pelaksanaan praktek *good governance* merupakan adopsi sistem tata kelola pemerintahan dengan di jalankan secara proporsional tergantung tingkat relasi yang dapat di lakukan. Peran yang di bawaan masing masing *stakeholders* akan melihat kapasitas yang ada pada saat itu sehingga kesisteman tersebut tidak di persoalkan. Sebagai contoh, praktek *Good Governance* yang di terapkan di Prancis, Amsterdam atau di kota Rotterdam tidak serta merta di lakukan di Pangkalpinang, di karenakan tata sosial, budaya yang berbeda namun semangatnya yang bisa di akomodir yaitu dalam kerangka mewujudkan tata pemerintah yang baik

Dengan kekeluasan dalam konsep tersebut menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri kota pangkal untuk melaksanakan program tersebut.

Apalagi dari anggota DPRD Kota Pangkalpinang juga sangat sependapat dan mendukung rencana ini, karena *setting* pembangunan yang di bangun melalui aspirasi langsung dari masyarakat. Maka dari itu ini merupakan momen tepat bagi pembngunan sistem dalam rangka pembangunan wilayah atau daerah. Sekarang momen itu telah hadir dan perlu segera mengambil langkah kongkrit untuk mewujudkan apa yang telah menjadi keinginan masyarakat untuk membngun wilayahnya sendiri.

C. Wujud Program *Block grant*

Konsep pembangunan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat tersebut di atas lebih di kenal dengan *Block grant*. Bentuk operasionalisasi dari model tersebut berada dalam bagaimana kemampuan kerjasama dalam mengelola dana pembangunan antara perangkat Kecamatan dan Kelurahan dengan BKM.

Dalam posisi ini Pemerintah kota lebih berfungsi sebagai fasilitator dan Pembina, sehingga program pembangunan yang akan di laksanakan tetap mengarah pada pedoman dasar stategi pembangunan yang tertuang dalam renstra dan kebijakan pembangunan secara umum.

Sementara untuk, pemerintah daerah memperkenalkan pendekatan *Community based development*, di mana pembangunan ini menitik beratkan pada;

- 1) Sasaran proyek pembangunan yang akan di jalankan adalah program-program yang sangat mendesak dan dapat memberikan dampak luas kepada masyarakat sekitar.

- 2) Prioritas pembangunan yang akan di laksanakan tidak boleh tumpang tindih dengan program dan proyek yang telah di rencanakan oleh perangkat daerah, departement dan sektoral;
- 3) Pada saat penentuan proyek proyek prioritas pembangunan tersebut, harus di musyawarahkan dengan tokoh masyarakat setempat.
- 4) Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek;
- 5) Apabila dalam pelaksanaannya, proyek pembangunan ini menemui masalah atau kesulitan maka dapat di konsultasikan kepada perangkat daerah.

Pada tahap pertama telah dikucurkan anggaran untuk Kelurahan Tuatunu Indah sebanyak Rp. 100.000.000,- dan tahap ke dua adalah Rp. 250.000.000,- dan tahap ketiga adalah Rp. 150.000.000,- atau secara keseluruhan berjumlah Rp. 5.00.000.000,-. Dana *block grant* diarahkan untuk kegiatan unit pengelolaan Lingkungan, Unit keuangan dan unit sosial yang menjadi kebutuhan seperti yang digariskan pada program prioritas di Kelurahan Tuatunu Indah sebagai daerah sasaran *block grant* sekaligus pelaksana program.

1. Pola pendekatan *block grant*

Dalam program ini, dipergunakan pola pendekatan *Community based development*, yang berarti lebih menitik beratkan pada kebersamaan/ gotong-royong masyarakat. Karena dengan model ini di percaya mampu menggali kekuatan yang tersembunyi dalam komunitas masyarakat Kelurahan sehingga dapat dioptimalkan, sehingga dapat menjadi sumberdaya bagi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya.

Masyarakat akan merasa memiliki setiap hasil pembangunan yang ada di sekitarnya, karena sejak awal mereka sudah di libatkan.

Dengan demikian, sebagian besar proses pengelolaan *block grant* tersebut terletak pada perangkat Kelurahan dan BKM, sedangkan institusi pemerintah lebih berfungsi sebagai fasilitator dan Pembina, agar program pembangunan yang akan dikerjakan tetap mengarah pada pedoman dasar strategi pembanguna kota Pangkalpinang.

2. Asas-asas *block grant*.

Seerti halnya program-program pemerintah yang lain, Pemerintah kota Pangkaipinang menempatkan asas-asas dalam pengelolaan dana *block grant* ini sebagai berikut;

a. Stimulan.

Dana tersebut di harapkan menjadi stimulus penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat melalui fungsi Kecamatan, Kelurahan dan BKM. Bentuk stimulir dari institusi ini dapat berupa swadaya dan partisipasi masyarakat maupun dalam bentuk kelancaran mekanisme kerja antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.

b. Mendasar, realistis dan tuntas, artinya bahwa dana *block grant* dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang mendasar, realistis dan sangat mendesak serta di lakukan dengan cara tuntas.

3. Maksud dan tujuan *block grant*

Kota Pangkalpinang meluncurkan program *block grant* ini ke tingkat Kelurahan melalui koordinator Kecamatan memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut;

- a. Mewujudkan pemberdayaan Kecamatan sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan masyarakat dengan *Spirit*, Simpati (semangat ingin maju penuh aktifitas tanpa imbalan dengan dilaksanakan dengan jujur, ikhlas, transparan, tanggungjawab dan ukhuwah).
- b. Sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang nyata dan *urgen* di masing-masing wilayah;
- c. Menciptakan rasa memiliki oleh masyarakat terhadap keberadaan proyek;
- d. Meningkatkan kemampuan aparat Kecamatan dan Kelurahan dalam mewujudkan kebutuhan pembangunan di wilayahnya masing-masing.
- e. Meningkatkan peran masyarakat kelurahan melalui keberadaan BKM;
- f. Menciptakan lapangan kerja baru sebagai upaya untuk menampung pengangguran sementara

D. Sasaran dan Ruang lingkup

Sebagai sasaran program ini adalah kebutuhan masyarakat sebagai mana diamanatkan dalam program prioritas Kota Pangkalpinang yaitu untuk kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan dasar, sarana dan prasarana umum, peningkatan perekonomian, peningkatan kebersihan dan lingkungan hidup. Dengan ruang lingkup, bahwa pada tahun 2007, 2008 *block grant* ini di arahkan pada pembangunan:

- Rehap rumah tidak layak huni;
- Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana umum yaitu sumur bor dan pemandian umum, jembatan;
- Pinjaman modal usaha;
- Santunan KK miskin;
- Beasiswa pendidikan anak kurang mampu.

E. Pengalokasian Dana *Block grant*

Sebagai program baru di kota Pangkalpinang, banyak pertimbangan dalam proses pengalokasian ke masing-masing Kecamatan. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan masukan, khususnya dari para anggota DPRD maka secara operasional pengalokasian dana *block grant* Tahun anggaran 2007/ 2008 di Kota Pangkalpinang adalah sebesar Rp. 2.300.000.000,- (Dua setengah milyar rupiah). Sementara untuk pengalokasian dana masing-masing dapat dilihat pada table berikut termasuk administrasi proyek, Perencanaan dan Pengawasan.

Tabel 4.24 Alokasi dana *Block grant* se- Kota Pangkalpinang

No	Pembagian Wilayah	Nilai Proyek (Rp)	Keterangan
	Kec. Rangkui	1.200.000.000	
	1. Kelurahan Asam	300.000.000	
	2. Kelurahan Parit Lalang	300.000.000	
	3. Kelurahan Bintang	300.000.000	
	4. Kelurahan Pasir Pagi	300.000.000	
	Kec. Gerunggang	1.100.000.000	
	1. Kelurahan Tuatunu Indah	500.000.000	
	2. Kelurahan Kc. pedang Kejaksaan	300.000.000	
	3. Kacang Pedang	300.000.000	
	Jumlah	2.300.000.000	

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Pangkalpinang

Melihat komposisi tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian pemerintah daerah dalam memberikan alokasi dananya, sehingga adanya pembagian sama rata menjadi pilihan terbaik kecuali hanya untuk Kelurahan Tuatunu Indah, kondisi ini sangat wajar, mengingat program ini adalah pertama, yang membutuhkan banyak perhatian sehingga di harapkan tidak hanya sekedar bagi-bagi uang saja. Apalagi dengan program ini akan banyak mengurangi peran Dinas/ Instansi terkait seperti Dinas Kimpraswil yang biasanya menjadi pelaksana proyek termasuk di dalamnya kesempatan para kontraktor dalam tender/lelang proyek karena semuanya terdesentralisasike Kecamatan.

Selain itu kekhususan lain dari program *block grant* ini adalah adanya keleluasaan yang di berikan pemerintah kota kepada Kecamatan terutama dalam hal pembagian alokasi dana ke masing-masing Kelurahan diwilayahnya. Tidak adanya aturan baku yang dibuat oleh

pemerintah Kota tentang persentase alokasi dana ke ke masing-masing Kelurahan, menunjukkan adanya upaya penyerahan kewenangan pengelolaan dana ke pemerintah penerima. Hal ini dapat diketahui dengan adanya perbedaan alokasi dana ke masing-masing Kelurahan yang tidak sama antara wilayah Kecamatan Gerunggang dengan Kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Rangkui di Kota Pangkalpinang.

Ada pembagian yang dilakukan jumlah Kelurahan mengalami perbedaan yaitu untuk Kecamatan Rangkui dengan 4 Kelurahan (Asam, Parit Lalang, Bintang, Pasar Pagi) sedangkan untuk Kecamatan Gerunggang adalah 3 Kelurahan (Tuatunu, Kacang Pedang Kejaksan dan Kacang Pedang).

Selanjutnya untuk pembagian dana untuk Kecamatan Rangkui dana diberikan dalam jumlah yang sama sedangkan untuk Kecamatan Gerunggang ada perbedaan yang cukup signifikan, kondisi ini semakin memperlihatkan bahwa, penggunaan dana disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa program pembangunan daerah Kota Pangkalpinang dengan nama *block grant* ini telah memberikan keluasan daerah Kota Pangkalpinang untuk pemanfaatan dana itu sendiri sesuai dengan keadaan pada setiap Kelurahan. Dana diberikan dengan berbagai pertimbangan dan kesiapan ditingkat lapangan.

F. HASIL PENELITIAN

Program Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP) adalah upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintahan daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat yang *representative*, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial masyarakat serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, *representative* dan dipercaya tersebut (*secara generic* disebut dengan Badan Keswadayaan Masyarakat atau di singkat BKM. Lembaga ini di bentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai fondasi modal sosial kehidupan masyarakat.

Keberadaan BKM diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang di jalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan.

Setiap BKM bersama masyarakat telah menyusun perencanaan jangka menengah program Penanggulangan Kemiskinan secara Partisipatif, sebagai prakarsa masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan diwilayahnya secara mandiri. Atas fasilitasi Pemerintah dan Prakarsa masyarakat, BKM ini mulai menjalin kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan kelompok peduli setempat.

Pada bagian hasil penelitian penulis berkeinginan membahas bagaimana interaksi/ kerjasama antar aktor dalam perencanaan proyek-proyek *block grant* yang ada di daerah penelitian yaitu Kelurahan Tuatunu Indah. Pada Pembahasan tahap perencanaan ini meliputi, siapa-siapa yang terlibat dan apakah interaksi yang terjadi terwujud adanya; Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, Responsivitas, dan *Rule of law*, selanjutnya peneliti akan memberikan penilaian, dan pemaknaan atas interaksi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat yang mengelola dana *block grant* tersebut memperjuangkan adanya partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, Responsivitas, dan *Rule of law*. Ini semua sebagai inti dari kajian penelitian ini.

1. Mekanisme perencanaan *block grant*

Sebagai program yang baru di Kelurahan Tuatunu Indah, melalui prosedur tetap yang ditetapkan oleh Walikota Pangkalpinang dinyatakan bahwa pimpinan proyeknya berada di Kecamatan sedangkan bagian proyeknya berada di Kelurahan Tuatunu Indah dan pelaksana proyek adalah BKM.

Oleh karena itu berdasarkan petunjuk pelaksanaannya sebelum proyek *block grant* program P2KP dilaksanakan di masing-masing Kelurahan, pemerintah Kecamatan Gerunggang mengadakan sosialisasi kepada para lurah dan BKM dalam rapat di Kecamatan Gerunggang.

Didalam forum rapat tersebut dibahas dua hal agenda pokok sebagai langkah awal pelaksanaan program *block grant* di wilayah Kecamatan Gerunggang. Agenda tersebut meliputi yang pertama mengenai pembagian alokasi dana *block grant* untuk masing masing Kelurahan, berikutnya yang kedua langkah langkah yang harus segera dilaksanakan ke masyarakat, sebelum proyek dilakukan. Dengan langkah-langkah ini diharapkan waktu yang akan datang tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat dengan alasan tidak mengetahui oleh aparat pelaksana. Secara khusus, melalui forum ini akan menjalin kerjasama dan transparansi pengelolaan dana antara pelaksana dengan pimpro di Kecamatan Gerunggang.

Untuk persoalan pertama yaitu pada masalah pembagian alokasi dana dari Kota Pangkalpinang ada 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Gerunggang dengan Kelurahan sasaran adalah Kelurahan Kacang Pedang Kejaksan, Kacang Pedang dan Kelurahan Tuatunu Indah, dan Kecamatan Rangkui dengan 4 Kelurahan sasaran sedangkan untuk Kecamatan Gerunggang ada 3 Kelurahan sasaran, adapun dana yang disetujui:

Tabel 4.25 Pembagian alokasi dana yang di setuju.

No	Kecamatan	Kelurahan	Besarnya Dana
1	Rangkui	a. Asam	300.000.000
		b. Parit Lalang	300.000.000
		c. Bintang	300.000.000
		d. Pasir Pagi	300.000.000
2.	Gerunggang	a. Tua Tunu Indah	500.000.000
		b.Kc.Pedang Kejaksaan	300.000.000
		c. Kacang Pedang	300.000.000
		Jumlah	2.300.000.000

Kekhususan dalam pengelolaan dana yang menekankan pada keleluasaan daerah untuk membagi dana yang tersedia dengan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan prioritas dari masing-masing Kelurahan. Pertimbangan yang diambil meliputi luas wilayah, jumlah warga miskin, prasarana yang kurang atau pertimbangan-pertimbangan lainnya sehingga Kelurahan yang satu dengan yang lainnya belum tentu sama.

Persoalan kenapa alokasi dana yang diberikan tidak sama diatas tidak menjadi fokus kajian, tetapi lebih pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kelurahan Tuatunu Indah setelah mengetahui besaran nilai proyek tersebut. Sebagai Pimpro dalam hal ini Lurah mengadakan sosialisasi program *block grant* kepada masyarakat melalui BKM, para ketua RW, para ketua RT, dan lembaga-lembaga yang ada di Kelurahan Tuatunu Indah, PKK, tokoh masyarakat di kantor Kelurahan Tuatunu Indah. Selain forum forum resmi yang ada di Kelurahan Tuatunu Indah, baik lurah maupun BKM sendiri secara aktif mengadakan sosialisasi program

kepada kelompok-kelompok masyarakat melalui rutinitas kegiatan seperti di masjid-masjid.

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi adalah menyampaikan kepada masyarakat bahwa Kelurahan Tuatunu Indah mendapatkan bantuan dalam bentuk *block grant*. Dari sosialisasi ini diharapkan masyarakat mengetahui apa itu *block grant*, maksudnya, tujuan dan siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan dana ini. Selain itu yang terpenting dari acara ini adalah penekanan pada apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban dari masyarakat yang menerima dana tersebut. Diharapkan dari undangan yang hadir dalam rapat sosialisasi, dapat lebih menyebarkan informasi ini, khususnya ketua RT, RW diharapkan dapat segera menyampaikan usulan proyek di wilayahnya.

Bukan persoalan yang mudah untuk dapat menghadirkan undangan tersebut dalam setiap rapat ataupun musyawarah Kelurahan, apalagi dalam kehidupan masyarakat sudah memiliki pola tertentu, namun dengan melakukan pendekatan kearifan lokal yang ada dimana walaupun masuk di wilayah perkotaan namun dalam kehidupan sehari-hari nuansa pedesaan masih sangat terasa dan dalam faktanya kehidupan masyarakatnya didominasi sebagai petani dan pedagang. Hubungan antar warga masih begitu terasa di karenakan rata-rata kekerabatan masyarakatnya masih kuat, namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kelurahan Tuatunu Indah sangat berbeda pola hidupnya dengan Kelurahan lainnya yang ada

di Kota Pangkalpinang pada umumnya. Masyarakat Kelurahan Tuatunu Indah dalam kehidupan perekonomian, tingkat pendidikan pendidikan sangat tertinggal dengan Kelurahan yang lainnya. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Soetarto, Beliau adalah tokoh masyarakat bidang pendidikan umum sebagai berikut;

"Kelurahan Tuatunu Indah ini dekat tapi terasa jauh artinya secara geografis Kelurahan Tuatunu Indah dekat sekali dengan pusat ibukota provinsi akan tetapi dalam kehidupan rialnya tidak menggambarkan pada pranata social seperti layaknya daerah dengan cirri cirri kota misalnya tingkat pendidikan yang tinggi, status ekonomi yang tumbuh akan tetapi justru yang terjadi adalah cirri ciri pedesaan yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat tuatunu Indah, sehingga untuk dapat menasejajarkan dengan masyarakat kelurahan yang lainnya masih memerlukan upaya yang kuat dan serius".(awancara tanggal 10 mei 2010)."

Melihat dari kondisi tersebut maka program-program pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Kelurahan Tuatunu Indah sangat di butuhkan salahsatunya melalui program P2KP yang ada.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebelumnya di adakan pemilihan terhadap komponen yang bakal mengurus pelaksanaan program tersebut. Mekanisme yang dilakukan adalah menggunakan cara-cara yang telah disepakati oleh masyarakat di Kelurahan Tuatunu Indah. Tehnis yang dilakukan adalah dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat ditingkat masing-masing RT untuk melakukan pemilihan antara warga di lingkup RT masing-masing. Jadi disini setiap warga memberikan pilihan terhadap perorangan berjumlah tiga orang dan dalam aturan ini individu boleh memilih namanya sendiri ataupun orang lain yang

dianggap cakap untuk mewakili dari pada RT masing-masing. Jadi dalam proses pemilihan ini di tingkat RT langsung dipimpin oleh ketua RT masing-masing. Selanjutnya hasil pilihan dari setiap warga dikumpulkan dan selanjutnya dilakukan penghitungan hasil suara yang dipilih di tingkat RT tersebut. Berikutnya hasil penghitungan tersebut dilakukan peringkat secara keseluruhan. Peringkat yang diambil adalah nama muncul yang terbanyak dari peringkat 1 sampai 15, kemudian hasil tersebut dilaporkan tingkat Kelurahan.

Dari proses pemilihan seperti diatas seorang Ketua RT 05 yaitu Ali Arsad menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

"Dengan proses yang di lakukan dengan cara setiap warga boleh memilih tiga nama dengan cara rahasia ini saya nilai sangat demokratis karena mereka boleh memilih dan di pilih sesuai pengamatannya di nilai memiliki kemampuan dan kepantasan untuk mewakili RT 05, sehingga orang yang di hasilkan dari pemilihan ini memiliki tanggung jawab moral akan kepercayaan yang di berikan oleh masyarakat di RT 05.(Wawancara tanggal 10 Mei 2010)."

Ditingkat Kelurahan selanjutnya dilakukan rekap nama-nama perwakilan dari RT satu sampai RT sembilan, jadi keseluruhan perwakilan berjumlah 165 orang. Selanjutnya ditingkat Kelurahan dilakukan pemilihan dengan mengundang seluruh perwakilan untuk menghadiri acara pemilihan anggota BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang diselenggarakan di Kelurahan Tuatunu Indah. Dari terdaftar undangan sebanyak 165 orang yang hadir sebanyak 97 orang dan yang melakukan pemilihan sebanyak 96 orang.

Dalam rapat pemilihan tersebut juga dihadiri oleh Panitia antara lain:

- (a) Ketua RT : 9 orang
- (b) Ketua RW : 3 orang
- (c) Koordinator BKM : 1 orang
- (d) Koordinator Umum : 1 orang
- (e) Lurah : 1 orang
- (f) Faskel : 1 orang
- (g) Korkot V : 1 orang

Dari rapat pemilihan yang diadakan di Kelurahan tersebut dilakukan pemilihan untuk memilih anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Adapun metodenya juga sama ketika ditingkat RT namun kalau ditingkat Kelurahan hanya diberikan hak suara masing-masing orang adalah satu. Pemilihan langsung dipimpin oleh lurah setempat. Berdasarkan hasil pemilihan masing-masing individu berikutnya dikumpulkan dan selanjutnya oleh panitia hasil pilihan peserta selanjutnya dilakukan perhitungan. Hasil perhitungan berikutnya dilakukan peringkat dan peringkat 1 sampai 13 dinyatakan sebagai anggota BKM terpilih. Berikut ini hasil perhitungan yang di peroleh;

Tabel. 4.26 Pemilihan BKM Kelurahan Tua Tunu Indah.

No	Nama	Alamat	Perolehan suara
1.	Sutarto	RT 04/RW 02	43
2.	Nurjannah bt.Amid	RT 04/RW 02	21
3.	Arsyad b.H.Usman	RT 07/RW 03	15
4.	Arsyad b. Sulaiman	RT 09/RW 03	12
5.	Tahmi b. H.Amid	RT 03/RW 01	12
6.	H.Husin b. Sya'ban	RT 03/RW 01	12
7.	Zulkarnain Badrun	RT 04/RW 02	11
8.	M.Zulhisab b.Saibi	RT 04/RW 02	11
9.	Kurnia Sutarto	RT 04/RW 02	10
10.	Misnah Bahri	RT 07/RW 03	9
11.	M.Hidayat b.Ibrahim	RT 02/RW 01	9
12.	Saipul Bahri b.Usman	RT 06/RW 03	9
13.	Kasmono	RT 08/RW 03	8

Sumber: Data Kelurahan Tua Tunu Indah.

Mengomentari dari hasil pemilihan BKM ini Lurah Kelurahan Tuatunu Indah menyampaikan sebagai berikut:

"Hasil pemilihan ini merupakan hasil yang telah di lakukan dengan kerja keras, mengingat proses yang di lakukan etelah menguras energi yang cukup besar yang diawali dari pemilihan tingkat RT dan di lanjutkan pemilihan di tingkat kelurahan yang selanjutnya hasil pemilihan tersebut merupakan anggota BKM untuk tahun 2008. Kami cukup puas atas hasil yang telah di peroleh ini selanjutnya saya ucapkan banyak terimakasih atas bantuan semua pihak atas keberhasilan proses pemilihan ini karena tanpa ada dukungan dari segenap masyarakat tuatunu Indah mustahil even ini dapat di capai dengan baik. Pelaksanaannya penuh demokratis tanpa ada gejolak di tengah masyarakat dan pada prinsipnya semua telah merasa puas atas perorangan yang duduk di dalam BKM ini."

Selanjutnya dari hasil pemilihan ini anggota terpilih anggota BKM diberikan kewenangan mengadakan rapat untuk memilih sekretaris dari BKM. Posisi sekretaris BKM memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan roda kegiatan BKM itu sendiri. Adapun mekanisme rekrutmen ini dilakukan dengan cara BKM membuat

surat edaran berupa lowongan untuk menjadi sekretaris BKM. Waktu yang di berikan sesuai kesepakatan adalah selama 15 hari kerja. Dari pendaftar yang berminat hanya ada tiga pelamar. Selanjutnya pihak BKM melakukan rapat untuk melakukan proses seleksi dengan berbagai persyaratan dan pertimbangan. Adapun persyaratan yang dijadikan ukuran adalah meliputi pendidikan minimal SLTA, dengan tujuan dengan pendidikan formal yang dimiliki dirasa cukup memiliki kompetensi. Selanjutnya orang tersebut dianggap jujur dan memiliki kecakapan didalam menjalankan roda administrasi. Dari hasil seleksi akhirnya terpilih saudara Taufik H Ali.

Langkah selanjutnya adalah pemilihan ketua UPK (Unit Pengelolaan Keuangan) Unit Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelolaan Sosial. Pemilihan ketiganya prosesnya sama dengan pemilihan sekretaris namun pendekatan yang di lakukan adalah dengan pemilihan berdasarkan latar belakang individu dengan kesesuaian dengan bidang yang akan lakukan, sehingga masing-masing memiliki kapasitas untuk mengelola setiap tanggung jawab yang diembannya.

Melihat dari proses rekrutmen yang dilakukan oleh anggota BKM salah satu anggota BKM yaitu saudara Tahmi menyatakan:

“ Pemilihan sekretaris dan ketua pengelola semua unit kegiatan yang ada merupakan orang orang terbaik dibidangnya yang kami miliki di Kelurahan Tuatunu Indah dan dari hasil pemilihan ini kami percaya figure terpilih akan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ”

Selanjutnya dari ketua RT 3 Junaidi menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

" Menurut saya apa yang di lakukan oleh para anggota BKM telah berhasil memilih orang orang yang dapat di berikan tanggung jawab di tugasnya masing masing , karena dari pengamatan saya sehari hari saya kenal benar dengan orang orang yang terpilih tersebut dan kamipun atas na,ma masyarakat RT 3 mendukung penuh atas uapaya yang akan di lakukan oleh mereka "

Tugas BKM selanjutnya adalah memiliki tugas untuk menjaring aspirasi masyarakat-masyarakat dengan melakukan sosialisasi kesetiap RT yang ada untuk menerima usulan-usulan ditingkat RT. Pola yang digunakan dengan cara jemput bola ini di lakukan dengan pertimbangan karena masyarakat belum terbiasa dengan melakukan usulan kebutuhan dilingkungannya, disamping itu sosialisasi di lakukan dengan cara menyampaikan lewat masjid, cara ini cukup efektif menjangkut jangkauan target sasaran namun karena sifatnya informasi satu arah jadi pendekatan langsung ke masing-masing RT dapat di lakukan diskusi yang intensif. Dari cara pendekatan RT dengan rapat di mushola maupun di rumah, masyarakat dapat lebih leluasa untuk menyampaikan usulan-usulannya sesuai kebutuhan yang paling mendesak atau paling prioritas. Dari usulan-usulan yang disampaikan masyarakat menyikapi dengan antusias karena disana ada harapan langsung terhadap manfaat langsung dalam kehidupannya terutama terkait dengan pembangunan insfrasturktur kelurahan yang ada dilingkungannya. Tingkat partisipasi kehadiran dari masyarakat setiap RT sangat tinggi yaitu kurang lebih 90%, artinya keinginan

masyarakat untuk berpartisipasi dalam usulan kegiatan di lingkungannya mendapatkan respon yang positif dari warga masyarakat. Seperti komentar anggota BKM yang melakukan penjangkaran aspiratif masyarakat di RT 7:

" Saya sangat gembira atas usaha pak RT untuk dapat mengajak masyarakatnya untuk melakukan musyawarah guna membahas usulan RT 7 dan saya juga gembira karena kegiatan yang di lakukan mendapatkan sambutan yang baik serta respon yang menggembirakan sebagai bahan yang dapat di bawa ketingkat rapat BKM kelurahan."

Setelah penjangkaran aspirasi dilakukan disetiap RT selanjutnya hasil dari usulan ditingkat RT dirapatkan kembali ditingkat BKM yang dilakukan sekaligus dikantor Kelurahan Tuatunu Indah. Rapat dilakukan untuk memilih prioritas kegiatan yang paling bersifat mendesak dan menjadi perhatian secara luas di tingkat Kelurahan, artinya penentuan skala prioritas didasarkan sifat dan tingkat kebutuhannya. Kegiatan yang dipilih juga akan di sesuaikan dengan besaran keuangan yang akan dikelola. Rapat pembahasan skala prioritas dilihat dari tingkat kehadiran ketika pembahasan perencanaan tersebut sebagai berikut ;

Tabel 4.27 .Tingkat Kehadiran Rapat membahas Perencanaan.

No	Stake Holder Kelurahan	Jumlah Undangan	Tingkat Kehadiran		Keterangan
			Hadir	%	
1.	Perangkat kelurahan	8	8	100	Adaacara dadakan yang tidak bisa di tinggal
2.	Pengurus LPMK	10	9	90	
3.	Ketua RT / RW	12	10	85	
4.	Tokoh Masyarakat	8	8	100	
5.	PKK	6	6	100	
6.	BKM	13	13	100	

Dari table tersebut terlihat bahwa pada tahapan perencanaan program *block grant* tersebut telah banyak dihadiri oleh undangan hanya ada beberapa orang yang tidak bisa hadir dikarenakan dengan alasan yang betul-betul tidak mampu untuk menghadiri dikarenakan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Namun apapun alasan yang muncul namun kenyataannya masyarakat Tuatunu Indah telah sepakat menerima seluruh hasil musyawarah tersebut, baik dalam menampung usulan proyek dari masing-masing wilayah RT/RW sampai dengan tahap penentuan skala prioritas proyeknya, seperti pendapat yang di sampaikan oleh ketua RT 4 Rozi Ahmad;

“Kebiasaan masyarakat tuatunu adalah adanya kebiasaan oleh masyarakat bahwasanya informasi dari kelurahan akan segera di tindak lanjuti melalui penyampaian lewat RT maupun melalui penyiaran alat pengeras suara yang ada di musholla, sehingga informasi tersebut dapat segera di terima masyarakat secara luas”.

Untuk lebih lanjut bentuk penyebaran informasi program juga dapat di lakukan melalui lurah atau ketua BKM, dimana acara sosialisasi program tersebut dilakukan dalam acara keagamaan maupun setiap ada kesempatan di tingkat RT. Kegiatan tahlilan ditingkat RT merupakan sarana strategis untuk menyampaikan informasi tersebut. Menurut ketua RT 6 dalam sebuah acara yang ditemui oleh peneliti mengatakan:

“ Penyampaian informasi secara luas mutlak untuk di sampaikan agar adanya keseimbangan informasi di tingkat masyarakat, dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap perangkat RT/RW ataupun perangkat lainnya di percaya oleh masyarakat secara luas. Bagian ini menjadi penting karena pada

dasarnya kepercayaan di peroleh kalau ada keterbukaan "(wawancara tanggal 5 Mei 2010)".

Dengan keinginan yang kuat dari kedua institusi Kelurahan, untuk melakukan sosialisasi program-program yang dimaksud dalam bentuk *block grant* keseluruhan lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sehingga tidak ada alasan lagi bahwasanya masyarakat tidak mengetahui adanya program tersebut. Langkah tersebut diambil karena kalau hanya mengandalkan prosedur didalam musyawarah Kelurahan sebagai salah satu cara atau tolak ukur adanya sosialisasi terhadap suatu program tertentu, kondisi ini akan banyak mengalami kesulitan. Dengan kesibukan masyarakatnya sehingga belum tentu ada waktu untuk hadir dalam musbangkel walaupun yang bersangkutan menerima undangan dalam acara rapat tersebut, sampai dengan adanya berbagai macam kegiatan malam hari yang secara rutin yang dilakukan oleh masyarakat Tuatunu Indah, seperti tahlilan, atau membaca yasinan/tahlilan.

Selanjutnya komitmen tersebut tidak dibatasi hanya pada awal kegiatan saja, tetapi lebih dari itu pada setiap kesempatan tetap berjalan, sekalipun program tersebut telah berjalan. Setelah musbangkel yang membahas penentuan skala prioritas rencana kegiatan, baik lurah maupun BKM yang menghadiri kegiatan rutin masyarakat, tetap menyampaikan program-program prioritas yang telah diputuskan, seperti yang disampaikan lurah Tuatunu Indah sdr. Zurman dalam meteri sosialisasinya mengatakan;

Sebagai program pemberdayaan masyarakat berbasis nilai, maka prinsip dasar dari program ini adalah, Pemberdayaan manusia seutuhnya. Untuk menumbuhkan kepedulian, kerelawanan dan perilaku yang berpihak pada masyarakat miskin dengan di landasi keikhlasan memberikan prioritas kepada warga yang lebih buruk kondisinya.

Adapun nilai dan prinsip yang melandasi pelaksanaan program P2KP ini adalah;

- Nilai-nilai luhur kemanusiaan yaitu jujur, ikhlas, peduli, serta dapat dipercaya.
- Nilai-nilai kemasyarakatan sebagai modal sosial yaitu kebersamaan, solidaritas sosial, gotong-royong, kekeluargaan serta kesatuan dalam keragaman.
- Prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pelestarian lingkungan, pembangunan ekonomi, dan pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Senada seperti yang disampaikan untuk memperjelas dari penyampaian lurah tersebut, dari wawancara dengan Faskel wilayah Tuatunu disampaikan;

Agar terwujud tujuan yang hendak dicapai dengan program P2KP ini, maka pendekatan yang akan dilakukan adalah;

- a. Melembagakan pola pembangunan pola pembangunan yang partisipatif yang berorientasi masyarakat miskin dan berkeadilan, melalui :

- 1) Pembanguna lembaga kepemimpinan masyarakat (BKM) yang representative yang berorientasi, akuntabel, dan

mampu menyuarakan kepentingan masyarakat dalam proses proses pengambilan keputusan.

- 2) Perencanaan partisipatif dalam penyusunan kegiatan.
- b. Menyediakan stimulant BLM secara transparan untuk mendanai kegiatan penanggulangan kemiskinan yang mudah dilakukan oleh masyarakat dan membuka kesempatan kerja melalui;
- 1) Pembangunan sarana/ prasarana lingkungan.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia
 - 3) Pengembangan ekonomi lokal dengan persyaratan tertentu
- c. Memperkuat keberlanjutan program dengan:
- 1) Menumbuhkan rasa memiliki dikalangan masyarakat melalui proses penyadaran kritis, partisipatif, pengelolaan hasil hasilnya dan lainnya.
 - 2) Meningkatkan kemampuan perangkat pemerintah dalam perencanaan, penganggaran, dan pengembangan pasca program.
 - 3) Meningkatkan efektifitas perencanaan dan penganggaran yang lebih berorientasi pada masyarakat miskin dan berkeadilan.

Karena pada dasarnya proyek ini milik masyarakat, pemerintah dan BKM hanya berfungsi sebagai fasilitator pelaksanaannya saja, sehingga peran dan tanggungjawab bersama masyarakat lebih ditonjolkan dalam program ini. Seperti yang

disampaikan oleh lurah Zurman dalam wawancara tanggal 5 Mei 2010:

“ Dalam block grant ini, Kelurahan lebih banyak sebagai fasilitator, sehingga masyarakat setempat melalui institusi LPMK dapat membuat dan melaksanakan program program pembangunan yang menjadi kebutuhannya.

Termasuk dalam musyawarah kedua yang membahas usulan-usulan proyek dari masing-masing RT/RW untuk dijadikan skala prioritas Kelurahan. Sama seperti pada musyawarah pembangunan Kelurahan (musbangkel) sebelumnya. Yang di undang dalam rapat ini adalah ketua RT/RW, Pengurus BKM, Tokoh masyarakat/ agama, pengurus PKK Kelurahan dan perangkat Kelurahan dimana dalam pranata sosial dimasyarakat Kelurahan Tuatunu Indah yang dianggap mampu menjembatani aspirasi masyarakat setempat.

Dari hasil rapat memutuskan untuk unit pengelolaan Keuangan (UPK) melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) kegiatan yang dilakukan terdiri.

- KSM Pencucian Motor
- KSM Perbengkelan Motor
- KSM Potong Rambut Pria
- KSM Potong Rambut Wanita

Sedangkan dari Kelompok Swadaya Masyarakat dalam Unit Pengelolaan Lingkungan terdiri dari:

- KSM Rehab Pemandian RT 1
- KSM Rehab Pemandian RT 5

- KSM Rehab Pemandian RT 6
- KSM Pembuatan Sumur Bor RT 4
- KSM Pembuatan Sumur Bor RT RT 6
- KSM Pembuatan Sumur Bor RT 9
- KSM Rehab Bangunan rumah tidak layak huni RT 1-9
- Pemasangan tali listrik RT 9
- Pembuatan jalan Setapak RT 1 dan 6

Sedangkan dari Unit pengelolaan Sosial (UPS) kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyantunan anak yatim piatu serta dalam bentuk pinjaman bergulir.

Setelah kegiatan tersebut disetujui oleh rapat dalam musyawarah di Kelurahan, kemudian dilakukan pembuatan RAB (Renca Anggaran Biaya) dimana RAB dibuat oleh masing-masing dari kegiatan yang akan di lakukan. Pembuatan RAB ini dibuat dengan tujuan untuk perhitungan anggaran yang akan di salurkan, sehingga dapat dilihat nilai yang di ajukan untuk dievaluasi dan selanjutnya disetujui untuk dilaksanakan masing-masing oleh penanggungjawabnya.

RAB yang telah dibuat selanjutnya disosialisasikan kepada ketua RT/RW dan selanjutnya disampaikan kepada masyarakat RT/RW setempat. Secara pribadi melalui kepemimpinan bersama BKM juga melakukan sosialisasi baik itu dalam arena yasinan ataupun dalam even yang lainnya setiap ada kesempatan. Apalagi

kegiatan ini merupakan masalah/ kegiatan baru, baik bagi masyarakat mampu bagi pemerintah Kelurahan.

Seluruh usulan proyek dari masing-masing RT/RW yang dibawa dalam draf usulan proyek RT tersebut akhirnya dibawa dalam musbangkel tahap kedua. Dalam musyawarah tahap kedua ini, akan dibahas semua usulan tersebut untuk dibuat prioritas pembangunan tingkat Kelurahan. Dari prioritas pembangunan Kelurahan ini untuk dijadikan proyek *block grant* Kelurahan Tuatunu tahun 2007-2008. Mengingat alokasi dana *block grant* untuk Kelurahan Tuatunu sangat terbatas, maka dengan adanya skala prioritas akan memudahkan penentuan sasaran proyek berikutnya.

Oleh karena itu, terhadap usulan pembangunan oleh RT/RW yang belum menjadi prioritas *block grant* tahun ini akan dijadikan usulan prioritas pembangunan Kelurahan tahun berikutnya. Sehingga di masa-masa yang akan datang diharapkan usulan proyek yang belum terlaksana tersebut sudah dapat menjadi prioritas pembangunan. Karena seluruh proses penentuan prioritas pembangunan tersebut sudah dilakukan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada. Mulai dari RT/RW, Tokoh Agama, Pengurus BKM, karang taruna dengan perangkat Kelurahan sudah terlibat.

Untuk mengetahui usulan-usulan proyek pembangunan dari masing-masing RT/RW tersebut yang menjadi prioritas

pembangunan *block grant* Kelurahan Tuatunu Indah Tahun 2008

dapat di lihat pada table berikut;

Tabel 4.28 Prioritas Proyek Blok grant tahun 2007-2008 Kelurahan Tuatunu Indah

No	Nama Proyek	Nilai (Rp)	Ket
	KSM Rehab Pemandian RT 1	4.100.000	
	KSM Rehab Pemandian RT 5	5.000.000	
	KSM Rehab Pemandian RT 6	4.100.000	
	KSM Pembuatan Sumur Bor RT 2	12.000.000	
	KSM Pembuatan Sumur Bor RT 3	12.000.000	
	KSM Pembuatan Sumur Bor RT 4	12.000.000	
	KSM Pembuatan Sumur Bor RT RT 6	12.000.000	
	KSM Pembuatan Sumur Bor RT RT 7	12.000.000	
	KSM Pembuatan Sumur Bor RT RT 8	12.000.000	
	KSM Pembuatan Sumur Bor RT 9	12.000.000	
	KSM Pencucian Motor RT 5	9.181.000	
	KSM Perbengkelan motor RT 4	8.919.000	
	KSM Potong Rambut Pria RT 5	5.365.000	
	KSM Potong rambut wanita RT 3	5.365.000	
	KSM Rehab Rumah tidak layak huni RT 1-9	81.990.000	
	KSM Jembatan Salim + Penembokan	45.000.000	
	KSM Pemasangan Tali kabel RT 9	8.000.000	
	KSM Santunan KK Miskin RT 1-9	10.000.000	
	KSM Beasiswa anak kurang mampu RT 1-9	39.000.000	
	KSM Jalan setapak RT 6	6.000.000	
	Pinjaman modal RT 1-9	122.500.000	
	Pembangunan TPA	50.000.000	
	Pembuatan Jalan setapak RT 7	7.000.000	
	BOP	10.000.000	
	PPn PPh	12.500.000	
		500.000.000	

Berdasarkan table tersebut, terlihat bahwa aspek pemerataan sebagaimana asumsi awal pendistribusian dana dari tingkat Kecamatan ke Kelurahan dibuat sesuai kondisi yang paling mendesak menurut hasil musyawarah. Sementara bagi masyarakat yan lain di RT/RW lainnya belum kebagian tentunya akan ada pertanyaan kenapa dilingkungannya belum dilakukan pembangunan. Bukankah pada dilakukan sosialisasi, program

block grant ini diperuntukkan bagi pembangunan masyarakat di wilayahnya, memang pada awalnya pertanyaan-pertanyaan itu mengemuka baik didalam pertemuan rutin antar warga dalam acara yasinan atau tahlilan, di Kelurahan, ataupun di BKM.

Namun demikian masyarakat akhirnya mulai dapat memahami alasan kenapa kebijakan pemilihan tempat yang di bangun dan adanya kesadaran bahwa dana *block grant* itu sangat terbatas, sementara rencana kebutuhan pembangunan masyarakat kita jauh lebih banyak. Oleh karena itu dibutuhkan penataan prioritas proyek-proyek pembangunan tersebut. Ada beberapa alasan utama kenapa lokasi-lokasi tersebut dipilih, seperti yang disampaikan oleh Pak Sutarto ketua BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat).

- a) Untuk Kelompok Swadaya masyarakat unit pengelolaan lingkungan antara lain berupa Pembangunan sarana pemandian umum di beberapa titik dimaksudkan karena sarana ini sangat di perlukan dan jangkauan penggunaanya bersifat semua kalangan masyarakat.
- b) Pembuatan jembatan Salim, ditujukan untuk mempermudah akses transportasi bagi masyarakat, karena hampir semua masyarakat Tuatunu itu kegiatan usaha kebunnya harus melewati jembatan ini sehingga dengan pembangunan jembatan mobilitas masyarakat ke kebun lebih lancar.

- e) Pembangunan Sumur Bor, ini dalam rangka menyediakan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
 - d) Untuk Kelompok Swadaya masyarakat unit Pengelolaan Keuangan kegiatan yang diperuntukkan perekonomian produktif.
2. Interaksi antar aktor dalam perencanaan proyek *block grant*

Untuk mempermudah didalam penilaian dan pemaknaan adanya interaksi yang partisipatif, transparansi, akuntabilitas, responsifitas dan *rule of law* dalam perencanaan proyek -proyek *block grant* di Kelurahan Tuatunu Indah, dapat dilihat dari indikator masing-masing sebagai berikut;

- a. Partisipasi, Untuk dapat mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan proyek *block grant* tersebut tolak ukur yang di gunakan adalah;
 - 1) Pelaksanaan Rapat/ musyawarah Kelurahan (musbangkel) yang membahas perencanaan program program *block grant*. Dalam proses musyawarah Kelurahan (musbangkel) perencanaan proyek-proyek yang akan didanai dari *block grant* telah dilakukan dengan cara yang intensif, baik itu ditingkat Kelurahan maupun langsung pada masyarakat disekitar lokasi, proyek. Bahkan dalam setiap kesempatan secara personal kepemimpinan Lurah dan Ketua BKM selalu aktif turun ke kelompok-kelompok masyarakat

memberikan penjelasan dalam bentuk penyuluhan mengenai program *block grant* tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran keduanya dalam berbagai forum yang telah berjalan rutin dalam masyarakat seperti yasinan/tahlilan atau event yang lainnya. Seperti yang disampaikan oleh ketua BKM SIMPATI Bapak Sutarto;

“Pelaksanaan rapat untuk perencanaan telah di lakukan dengan baik baik itu di lakukan di tingkat kelurahan maupun di tingkat RT/RW bahkan kadang kadang melalui pengeras suara yang ada di Masjid”.

- 2) Siapa saja yang diundang dalam perencanaan tersebut.
 - (a) Kalau berbicara perihal siapa saja yang terlibat dalam perencanaan proyek-proyek *block grant* di Kelurahan Tuatunu Indah, hampir semua unsur masyarakat baik dari unsur pemerintahan kelurahan sendiri, kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan yang ada sampai dengan peleku ekonomi dan pengurus lembaga sosial kemasyarakatan seperti kelompok pengajian, koperasi, karang taruna, olahraga, kelompok tani dan lain-lain adalah juga termasuk didalam BKM. Seperti yang disampaikan oleh Zulkarnaen dari wawancara tanggal 7 Mei 2010 mengatakan

“ Tradisi masyarakat di Tuatunu, karena orang orang yang memiliki kemampuan di bidang tata kelola masyarakat masih sangat terbatas jadi orang orang yang duduk di kepengurusan dalam lembaga

lembaga sosial di kelurahan ya orang orang di seputaran lembaga yang lainnya."

(b) Memang dalam satu sisi, kondisi ini akan semakin memudahkan pemerintahan Kelurahan dalam menampung aspirasi masyarakat. Selain sudah terwakili hampir seluruh *stakeholders* yang ada dalam masyarakat mudah untuk diundang untuk di libatkan dalam perencanaan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka benar-benar memperjuangkan kelompoknya, seperti orang-orang sebagai ketua jemaah Yasinan/Tahlilan yang kebetulan juga duduk di BKM, kebetulan didalam anggotanya ada yang membutuhkan suntikan dana segar untuk modal usaha keluarganya karena nadi kehidupannya berasal dari usaha kecilnya. Tetapi ketua tadi hadir dalam rapat karena statusnya juga sebagai pengurus BKM, apakah akan menyampaikan permasalahan ini atau sebaliknya sibuk dengan lembaganya sekalipun sebenarnya persoalan ini adalah agenda utama kegiatannya.

b. Transparansi, untuk mengetahui adanya transparansi dalam perencanaan proyek *block grant*, dapat di lihat melalui tolok ukur sebagai berikut :

1) Sosialisasi program *block grant* kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan sosialisasi program *block grant* kepada masyarakat misalnya, baik pemerintah kelurahan maupun BKM secara aktif melakukan sosialisasi dengan cara mendatangi masyarakat program *block grant* atau kelompok-kelompok masyarakat melalui kegiatan rutin yang berkembang dimasyarakat. Seperti yang di sampaikan Lurah dan Anggota BKM dalam wawancara tanggal 7 Mei 2010 ketika ditemui di kantor lurah;

“Strategi yang kami kembangkan pada saat sosialisasi kami lakukan dengan cara mendatangi langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat, kondisi ini kami tempuh karena dengan melakukan cara demikian apa yang menjadi keinginan kita dapat segera di pahami oleh masyarakat, seterusnya masyarakat akan mengerti akan program block grant yang akan di laksanakan di Kelurahan Tua Tunu Indah”.

Sehingga masyarakat sendiri merasa praktis, karena untuk mendengarkan program *block grant* mereka tidak harus bersusah payah meninggalkan rutinitas kegiatan malam dalam tahlilan/ yasinan. Akan tetapi dengan sekali jalan, selain kegiatan rutin jalan juga mendapatkan penjelasan dari pihak pemerintah.

Merujuk dari kebiasaan masyarakat Kelurahan Tuatunu Indah dengan cara demikian tujuan dari sosialisasi akan lebih mudah dicapai. Seperti yang disampaikan oleh Fasilitator Kelurahan Tuatunu Indah

menyampaikan pendapatnya dalam wawancara tanggal 8 Mei 2010.

“ Masyarakat Kelurahan Tua Tunu Indah agak berbeda dengan kelurahan kelurahan yang lain yang ada di Kota Pangkal Pinang, Karakteristik masyarakat yang religius sangat kental jadi strategi dengan pendekatan kegiatan keagamaan akan lebih mudah sebagai sarana untuk sosialisasi” Nuansa agamis sangat terasa dalam kehidupan sehari hari , sebagai indikatornya adalah dalam kelurahan dengan penduduk yang tidak begitu banyak masjidmemiliki 7 Masjid / Musholla.Dan dalam menjalankan kegiatan sholat lima waktu dapat di lakukan dengan tertib dengan berjamaah, kondisi ini tentu sangat berbeda apabila di bandingkan dengan di luar Masyarakat Kelurahan Tua Tunu Indah”.

Justru, dengan metode jemput bola seperti inilah akan dicapai hasil yang optimal, karena hampir seluruh masyarakat dapat hadir dalam kegiatan rutusnya. Bagaimana dapat di bayangkan, jika tetap memaksakan pertemuan harus dilakukan di Balai Kelurahan, yang bisa hadir biasanya hanya tokoh-tokohnya saja, Jangankan bagi masyarakat biasa, bagi ketua RT/RW atau disebut saja ketua BKM sendiri, kalau ada acara di Kelurahan dan kebetulan berbarengan dengan ada acara lain dalam keluarga misalnya pasti yang menjadi prioritas adalah diselesaikan dahulu acaranya, baru untuk Kelurahan, oleh karena itu, dengan teknik jemput bola melalui keterlibatan langsung dari Kelurahan dan BKM ketempat tempat acara/ kegiatan rutin masyarakat

akan menjadi pilihan yang sangat tepat untuk menyukseskan program *block grant*.

2) Proses penentuan skala prioritas usulan proyek.

Sementara dalam proses penentuan skala prioritas usulan proyek-proyek yang akan dijalankan usulan proyek-proyek yang akan dijalankan, masyarakat Tuatunu Indah sangat menghormati peran seorang ketua BKM karena kebetulan *figure* tersebut merupakan tokoh pendidikan yang ada di Kelurahan Tuatunu Indah disamping ketua RT/RW juga masih sangat menonjol. Artinya masyarakat tidak terlalu mempersoalkan dan memiliki kepercayaan perihal program-program yang menjadi prioritas. Karena mereka juga akan menyadari toh nantinya program itu akan disosialisasikan kepadanya. Apalagi dalam masyarakat sudah ada kebiasaan bahwa apapun program melalui kelembagaan masyarakat akan ada sosialisasikan melalui kegiatan rutin yang berlaku di tengah masyarakat Tuatunu Indah dan selanjutnya dari pihak BKM akan meminta masukan masukan dari masyarakat dalam pelaksanaannya.

Memang selama ini tidak ada persoalan dalam hal ini, tetapi akan menjadi masalah yang serius jika nantinya kekhasan masyarakat berubah. Apa jadinya

kalau pengurus BKM dan RT/RW tersebut tidak memiliki kepekaan untuk tetap menjalankan fungsinya, yaitu secara aktif menyampaikan program-program pemerintah dalam rutinitas kegiatan yang ada dalam masyarakat apakah dapat berjalan baik. Untuk itu yang perlu di tata adalah melibatkan secara aktif *stakeholders* yang ada meskipun jika diundang jarang hadir, tetapi selalu diundang dengan tetap mempertahankan adapt kebiasaan masyarakatnya.

- 3) Adanya media informasi yang memuat hasil prioritas proyek yang akan dilaksanakan.

Dengan adanya pola jemput bola dari lurah dan BKM, seolah olah media informasi untuk memuat hasil prioritas proyek tersebut kurang diperlukan. Karena tanpa media informasi inipun , masyarakat sudah mendapatkan kemudahan mengakses secara langsung dari narasumbernya, dan mereka pun dapat secara langsung pula memberikan apresiasi dan tanggapannya. Namun demikian, memang media informasi akan tetap menjadi penting, karena dengan pertimbangan tidak semua masyarakat hadir juga dalam rutinitas sehari-harinya. Selain dari pada itu, Lurah dan BKM itu juga manusia biasa di mana sewaktu-waktu dapat mengalami sakit, atau dalam

psikologi yang tidak tentu, sehingga kadang-kadang juga dapat tidak hadir dalam kegiatan rutinitas masyarakatnya.

c. Resposifitas, untuk mengetahui tingkat kepekaan dari para perencanaan program *block grant* terhadap aspirasi masyarakatnya, dapat di lihat melalui tolok ukur sebagai berikut;

1). Mekanisme Penjaringan Usulan Proyek dari masyarakat didalam proses Penjaringan Usulan Proyek dari masyarakat, pemerintah Kelurahan sudah meminta setiap RT untuk menyerahkan daftar usulan proyek yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat dilingkungannya. Sehingga secara langsung dapat terjaring seluruh usulan kebutuhan masyarakat di tingkat RT/RW masing masing. Apalagi dengan kebiasaan masyarakat Tuatu Indah dengan acara rutin yasinan/ tahlihan proses ini dapat dilakukan dengan mudah. Seperti yang di sampaikan ketua RT 7 Usman Ibrahim Sebagai berikut;

"Ketika dari pihak Kelurahan dan BKM meminta aspirasi pembangunan di tingkat RT 7, segera kami tindak lanjuti dengan adanya pertemuan pas acara yasinan, awalnya yasinan dilaksanakan dan selanjutnya di lakukan pembahasan dan kami sepakat untuk usulan dalam bentuk rehap rumah layak huni dan perbaikan sarana kamar mandi serta untuk pembuatan jalan setapak di lingkungan RT 7 .

Untuk untuk RT/RW yang lain juga melakukan hal sama namun dalam pelaksanaannya *event* tayang digunakan agak berbeda. Sehingga apapun yang di usulkan oleh masyarakat dapat segera di rekap oleh BKM melalui BKM-BKM yang ada di Kelurahan Tuatunu Indah.

- 2) Apakah prioritas proyek-proyek tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Sekalipun usulan proyek dari RT/RW tersebut telah berusaha untuk menjangkau masyarakat *grass root* yang ada diwilayahnya namun belum seluruh usulan tersebut menjadi prioritas proyek *block grant* Kelurahan, dengan kata lain masih kurang mencerminkan adanya kesesuaian dengan usulan masyarakat yang di bawa oleh RT/RW. Hal ini dapat dilihat belum tersentuhnya sektor usaha kecil masyarakat. Apalagi kalau sektor usaha yang dilakukan oleh masyarakat merupakan usaha bidang pertanian ataupun usaha perdagangan. Seperti terlihat pada bab deskripsi wilayah telah dapat dilihat mayoritas masih di sektor tersebut. Yaitu sektor pertanian dan perdagangan. Tuatunu dikenal sebagai penghasil buah nenas dan kualitasnya di kenal baik, namun dalam kegiatan ekonomi tidak menyentuh akan upaya produk ini. Memang masyarakat tidak ada yang mempersoalkan

tentang prioritas yang telah disepakati, karena masyarakat melakukan aktifitas ekonomi bidang pertanian berupa kebun karet dan kegiatan yang lainnya adalah kegiatan perdagangan, untuk perdagangan masyarakat dari Kelurahan Tuatunu Indah mendominasi untuk kegiatan jual beli yang ada di Pasar Pagi terutama dalam pemenuhan kebutuhan primer. Dominasi masyarakat Tuatunu sangat terasa dan aktifitas ini merupakan salah satu nadi masyarakat Tuatunu. Seperti yang di sampaikan oleh Soleh RT 5. Masyarakat kami itu kebanyakan pada hidup dari kebun, dari pasar atau pun sebagai pedagang keliling. Untuk kebun mereka dari tanaman karet dan tanaman Nanas. Sedangkan untuk kegiatan di pasar mereka kebanyakan menjual hasil bumi dan yang berjualan keliling bahan yang dijual adalah bermacam-macam namun masih tetap pada sektor pertanian, mereka berkeliling ke seuruh pulau Bangka sesuai dengan peluang yang ada dan dapat dimanfaatkan.

- d. Akuntabilitas, di dalam perencanaan *block grant* ini yang sudah partisipatif dan transparan tersebut, secara otomatis sudah ada pertanggungjawaban atas perencanaan proyek kepada masyarakat Tuatunu Indah, oleh karena itu, tolaok ukurnya adalah apa yang sudah partisipatif dan transparan tersebut.

e. Rule of Low, untuk mengetahui ada atau tidaknya komitmen yang kuat dari para perencana proyek *block grant* tersebut, dapat di lihat dengan tolok ukur sebagai berikut;

1). Tingkat Kesesuaian Program dengan alokasi dana.

Tingkat kesesuaian prioritas proyek dengan alokasi anggaran sudah sesuai dengan pagu anggaran. Bahkan, adanya istilah prioritas proyek penyesuaian yaitu di rehapnya rumah tidak layak huni masing-masing RT mendapatkan bagian, pembuatan jalan setapak, pembuatan sumur Bor, pembangunan tempat pemandian umum, jembatan salim dan penembokan jalan salim, pembuatan drainase, pinjaman modal usaha, pengadaan listrik untuk jalan Kampak, santunan KK miskin dan bea siswa bagi anak dari keluarga kurang mampu. Berikut ini komentar salah satu anggota BKM simpati yaitu saudara Rizal sebagai berikut;

“ Dalam pelaksanaan dalam menentukan skala prioritas pada dasarnya sudah mengakomodir semua aspirasi dengan apa yang telah di usulkan oleh RT/RW walaupun ada beberapa usulan dari masing masing RT/RW tersebut belum seluruhnya di jadikan proyek”.

2). Ada atau tidaknya tindakan pemaksaan kehendak dalam menentukan prioritas proyek.

Meskipun masih ada prioritas proyek tersebut yang belum sesuai dengan usulan RT/RW, namun setelah di berikan penjelasan kenapa proyek ini yang menjadi

prioritas Kelurahan akhirnya secara keseluruhan masyarakat menyetujuinya dan tidak ada pemaksaan kehendak dalam penentuan skala prioritas proyek. Selain itu dapat dilihat adanya acara turun ke bawah yaitu penjelasan langsung ke masyarakat yang dilakukan oleh pihak Kelurahan dan BKM dalam rangka menggali seanyak mungkin informasi dan penjelasan, menunjukkan tidak adanya pemaksaan tersebut.

Seperti yang di sampaikan oleh anggota BKM Saudara Usman mengatakan;

"Kami di bagi dalam beberapa kelompok untuk turun ke RT/RW dalam rangka menyampaikan penjelasan tentang alasan pemilihan proyek tersebut agar di tingkat RT/RW tidak muncul mis persepsi menyangkut skala prioritas yang di pilih. Dan akhirnya mereka bisa menerima atas apa maksud dan tujuannya atan skala prioritas tersebut."

Dengan penentuan skala prioritas metode yang telah di jalankan sedemikian rupa berarti telah memnuhi rasa keadilan bagi semua kalangan di Kelurahan Tuatunu Indah.

G. Implementasi Proyek Proyek Block Grant Di Kelurahan Tuatunu Indah

Setelah mengetahui proses perencanaan proyek-proyek yang akan di danai *block grant* seperti yang diatas, maka fokus dari bab ini adalah bagaimana implementasi proyek-proyek tersebut di Kelurahan Tuatunu Indah. Setelah mengetahui implementasinya, selanjutnya

peneliti melakukan pembahasan untuk memberikan pemaknaan hasil penelitian ke dalam pola interaksi yang memperjuangkan *values good governance*. Artinya bahwa peneliti akan memberikan penilaian dan pemaknaan atas interaksi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat yang mengelola dana *block grant* tersebut apakah terdapat; partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsifitas dan *rule of law*.

1. Implementasi proyek *block grant*

Setelah ditetapkan menjadi prioritas proyek *block grant* pekerjaan tersebut langsung diserahkan kepada KSM-KSM yang untuk mengelola antara lain KSM ekonomi, KSM Lingkungan dan KSM Sosial. Tidak adanya sistem lelang/ tender, karena memang dalam prosedur tetapnya sendiri sebagai pelaksana proyek adalah KSM-KSM itu sendiri namun ditingkat pelaksanaannya masing-masing unit kegiatan yang diterapkan untuk kegiatan ekonomi, penetapan sebagai calon penerima mengajukan proposal dengan difasilitasi oleh Fasilitator Kelurahan karena didalam pembuatan proposal masyarakat tidak terbiasa dengan administrasi atau dalam penyusunan redaksional. Sedangkan untuk kegiatan KSM lingkungan kegiatan dilakukan langsung penanggung jawab masing masing kegiatan. Dengan demikian secara langsung akan membuka kesempatan kepada warga setempat untuk terlibat dalam pengerjaannya. Selain itu dengan posisinya sebagai pelaksana proyek, KSM yang tidak lain adalah anggota masyarakat setempat,

maka akan semakin memudahkan pelaksanaan dan control dari *stakeholders* yang ada terhadap hasil proyeknya.

Dan memang benar adanya, ketua BKM bersama pelaksana proyek dalam sosialisasinya ke warga sekitar lokasi proyek membuka kesempatan untuk terlibat sebagai pekerja dan mendapatkan upah sebagaimana seorang yang bekerja, meskipun tidak ada papan informasi yang memuat hal itu. Namun demikian, sebenarnya dari pihak Kelurahan sendiri juga telah membuat surat pemberitahuan hal ini kepada masing-masing ketua RT/RW, agar menyebarkan informasi ini. Hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Zurman lurah di Kelurahan Tuatnu Indah sebagai berikut :

" Dalam setiap kegiatan yang membutuhkan keterlibatan masyarakat, kelurahan selalu meneruskan pemberitahuan tersebut keketua RT/RW melalui surat maupun secara lisan, termasuk masalah adanya lapangan kerja baru dalam program block grant (wawancara tanggal 5 Mei 2010). "

Sementara perhatian khusus bagi KSM-KSM selaku pelaksana adalah pada prinsipnya mereka sudah memiliki tenaga ahli yang telah teruji dengan baik dalam mengerjakan pekerjaannya. Namun dalam prakteknya disamping ada tenaga ahli masyarakat sekitar secara sukarela membantu pekerjaan dengan cara gotong-royong.

Mengingat dana yang dialokasikan dengan tujuan hasil yang diharapkan tidak sepadan sehingga diperlukan upaya dan strategi untuk mewujudkan hasil seperti yang diharapkan, jadi keberadaan

para tenaga kerja dari masyarakat setempat lebih berfungsi sebagai tenaga bagi tukang aslinya, walaupun kadang-kadang ada warga yang statusnya tukang namun sebagai bagian warga mereka ikut bergotong-royong. Seperti yang disampaikan salah satu anggota BKM secara kebetulan dipercaya untuk memimpin pelaksanaan pembuatan jembatan Salim, berikut ini penjelasan yang diberikan;

"Ketika saya di tunjuk untuk memimpin proyek jembatan salim, di mana jembatan ini memiliki fungsi strategis bagi masyarakat tuatunu baik untuk akses ke kebun maupun sebagai jalan pintas untuk ke Universitas Bangka Belitung, jadi saya mengajukan persyaratan, yaitu mengingat dana yang di perlukan menurut saya untuk membangun jembatan dengan ukuran 3 meter kali 12 meter dana yang di perlukan adalah kurang lebih 200 jutaan sedangkan dana tersedia hanya 25 juta apakah masyarakat mau melakukan gotong royong untuk secara bergiliran membantu tukang yang menjadi penanggung jawab teknis, ternyata masyarakat setuju dan di mulailah pekerjaan tersebut".(wawancara tanggal 6 Mei 2010)".

Dari informasi masyarakat pada umumnya ketika peneliti menanyakan tanggapan atas pekerjaan ini mereka menyampaikan komentarnya, yaitu saudara Laila menyatakan;

" Pekerjaan pembuatan jembatan salim ini merupakan upaya yang sudah lama kami idam-idamkan, namun kondisi keterbatasan kami mengakibatkan kami harus menahan diri dan dengan adanya proyek ini kami melalui rapat di tingkat RW dan berkerjasama dengan kelurahan mencoba untuk melakukan upaya yang kongkrit untuk mewujudkan impian kami yaitu jembatan yang bisa di lalui oleh mobil, karena selama ini kami hanya bisa lewat dengan kendaraan motor saja, padahal fungsi jembatan ini bagi saya merupakan jalan yang setiap hari saya lewati, dengan di bangun jembatan yang lebih besar maka mobilitas ekonomi akan lebih lancer, terutama untuk membawa hasil pertanian berupa karet ataupun buah nanas.kami bersemangat untuk melakukan gotong royong secara bergiliran sampai jembatan selesai. Terlebih lagi dengan adanya Universitas Bangka Belitung yang di bangun di Desa Balunujuk maka jalan ini akan menjadi ramai karena jarak ke desa Balunujuk menjadi lebih dekat. Untuk itu kami sangat

antusias dengan adanya rencana pembangunan tersebut dan sekarang mimpi itu telah terwujud dengan di Bantu oleh pemerintah walaupun bantuan itu jauh dari biaya yang akan di perlukan, tetapi yang terpenting tekad kami sekarang telah membuahkan hasil, kami menjadi lebih lancer dan jalan tersebut lebih ramai dari sebelumnya. "

Adapun dari penjelasan tukang yang mengerjakan pekerjaan ini mereka menyampaikan komentarnya sebagai berikut ;

"Saya senang menerima kepercayaan warga masyarakat tuatunu untuk melakukan pekerjaan itu, karena secara pribadi saya mendapatkan upah dari pengerjaan ini namun juga di karenakan pekerjaan ini ini bagi saya juga merupakan amal dan sumbangan saya kepada masyarakat di mana saya tinggal, jadi menyangkut upah saya tidak mematok tarif yang biasanya tetapi yang terpenting dapur saya tetap bisa berasep karena tidak mungkin saya melupakan kebutuhan keluarga saya. Pemikiran ini juga karena saya melihat semangat besar masyarakat dengan melakukan gotong-royong membantu pekerjaan saya sehingga jembatan yang di idamkan dapat di selesaikan.(wawancara tanggal 6 Mei 2010) "

Dengan kenyataan seperti ini, menunjukkan adanya komitmen dari pelaksanaan proyek sendiri untuk menjaga transparansi keuangan. Paling tidak, kondisi ini diharapkan dapat menghindari terjadinya mis komunikasi masalah keuangan *block grant* sendiri. Karena selama ini ada pandangan masyarakat bahwa yang namanya proyek dari pemerintah itu pasti banyak uangnya, sehingga dengan bekerja seadanya akan tetap mendapatkan keuntungan atau upah. Oleh karena itu, sejak awal pelaksanaan proyek telah di tegaskan bahwa proyek ini milik kita, masyarakat Kelurahan Tuatunu Indah, artinya bahwa kita yang merencanakan, dikerjakan sendiri, sekaligus manfaat proyek yang merasakan adalah masyarakat Kelurahan Tuatunu Indah, Kelurahan Tuatunu

Indah sehingga dituntut adalah pekerja yang betul-betul ingin bekerja.

Bentuk-bentuk pemberdayaan lain dari pelaku ekonomi kelurahan setempat, seperti penyedia material bangunan adalah adanya komitmen awal bahwa menyangkut pembayaran dapat dilakukan ketika uang dari Kelurahan Tuatunu Indah kegiatan proyek sudah cair dan harga yang diberikan pun tergolong miring, karena kebetulan orang tersebut juga orang Tuatunu sendiri, contohnya dalam penyediaan pasir, biasanya satu truknya 250 ribu cukup di bayar 200 ribu untuk setiap truknya, berikut ini pendapat yang di sampaikan;

"Ketika masyarakat tuatunu memulai kegiatan proyek ini saya juga tahu persoalan yang di hadapi oleh masyarakat kelurahan tuatunu Indah, karena saya sebagai warga tuatunu juga turut mendengar dan tahu konsep yang di bawa dalam pemberdayaan ini. Saya yang kesehariannya sebagai penyedia jasa transport sekaligus pemborong penyediaan pasir khususnya, kontribusi yang dapat saya berikan kepada masyarakat kelurahan tuatunu Indah melalui kegiatan ini. Toh akhirnya saya juga ikut menikmati hasil dari pembangunan yang di lakukan melalui proyek ini".

Sedangkan untuk pengadaan material lain melalui toko bangunan dari wawancara dengan dengan penjual material di Tua Tunu Indah mengatakan;

"Saya sebagai bagian masyarakat tua tunu turut mendukung dengan adanya kegiatan proyek ini, bukan karena persoalan semata mata bisnis namun saya merasa ikut untuk membangun Tua Tunu Indah sehingga saya memberikan potongan harga dan pembayaran di sesuaikan dengan pencairan yang telah di lakukan".

Hal ini terjadi dikarenakan pertimbangan teknis, yaitu adanya proses pencairan dana *block grant* yang tetap mengikuti aturan bakuanggaran daerah. Kebakuan anggaran ini menyangkut proses cairnya dana dilakukan secara bertahap atau pertermin. Setiap termin dapat cair, jika hasil proyek lebih dari nominal yang di ajukan dengan uang muka sebagai modal kerja awal sebesar 30% dari nilai proyek. Modal kerja ini dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan sampai dengan nilai fisik proyek mencapai 40%. Jika sudah terealisasi, maka pada tahap pencairan selanjutnya dapat mengajukan dana 65% untuk mencapai nilai proyek fisik final 100%.

Dengan kondisi seperti ini, sangat riskan dan kecil kemungkinan para pemilik toko bahan-bahan yang ada di Kelurahan tersebut mau menjual barang dagangannya kepada pelaksana *block grant*, kalau tidak ada ikatan hubungan baik sebelumnya, karena uang pembayarannya akan diberikan menyusul di belakang hari, menunggu sampai dengan cairnya dana proyek. Oleh karena itu, dalam masalah ini yang menjadi bahan pertimbangan pemborong adalah boleh saja di siapkan toko yang ada, asal harga lebih murah .

Adapun bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat dilihat dapat lihat sebagai berikut;

1. Adanya bantuan minum dan makanan kecil bagi para pekerja proyek, biasanya diberikan pagi dan saat istirahat siang.

2. Adanya kerelaan warga untuk melepaskan sebagian tanah hak miliknya untuk di fungsikan sebagai fasilitas umum, seperti pelebaran jalan;
3. Adanya kerelaan warga untuk menghilangkan haknya demi kepentingan umumnya

Untuk mengetahui bentuk bentuk-bentuk partisipasi masyarakat tuatunu Indah dalam pelaksanaan proyek *block grant* dapat dilihat pada table berikut ini;

Tabel 4.29 Rekapitulasi Partisipasi masyarakat tuatunu Indah dalam pelaksanaan blok grant tahun 2007-2008

No	Bentuk Partisipasi	Di Rp kan	Ket
1.	Kerja Bakti dalam pembuatan jembatan salim selama 2 bulan x 5 orang a. Rp 25.000	7.500.000	Jalan menuju kebun
2.	Penimbunan jalan Salim sepanjang 600 meter x 4 meter dengan 20 orang x 60 hari x 50.000	60.000.000	Jalan menuju kebun
3.	Alat berat 30 hari x Rp.1.500.000	45.000.000	Jalan menuju kebun
4.	Kerja bakti Rehap rumah 18 rumah 5 x 3 bulan x 50.000	1.250.000	Jalan menuju kebun
5.	Pembuatan jalan 2,5 meter x 500 meter 10 orang x 5 hari x 25.000	1.500.000	Di semua RT 1-9
6.	Pembuatan sumur Bor 5 unit 3 orang x 20 hari x 25.000	400.000	RT 07
7.	Kerja bakti rehap pemandian umum 3 tempat 5 x 10 orang x 25.000	400.000	RT 1,3, 4,7,8
8.	Pembuatan tempat pencucian motor 4 hari x 4 orang x 25.000	400.000	Rt.2,6,9
9.	Pembuatan tempat bengkel motor 4 hari x 4 orang x 25.000	750.000	Rt 05
10.	Pembuatan tempat potong rambut pria		RT 04
11.			Rt 05

	4 hari x 4 orang x 25.000 Pembuatan tempat potong rambut wanita 4 hari x 4 orang x 25.000 Kerja Bakti pemasangan tali kabel 5 orang x 3 hari x 50,000		RT 03
--	---	--	-------

Dengan melihat table diatas tampak bahwa antusiasme dan kepedulian masyarakat setempat untuk terlibat dalam pelaksanaan proyek proyek *block grant* rata-rata cukup tinggi. Dengan kondisi perekonomian yang kurang bagus namun masyarakat dengan antusiasme melakukan kegiatan gotong-royong. Dengan keterbatasan yang dimiliki justru menumbuhkan semangat untuk melakukan aktifitas pembangunan dengan melakukan kegiatan gotong-royong dengan acara melakukan kerja bakti.

Kalau melihat nilai nominal sumbangan masyarakat walaupun dalam bentuk tenaga sungguh suatu upaya yang tidak kecil apalagi ini di lakukan dalam situasi yang serba terbatas, tetapi nilai dan manfaatnya sungguh luar biasa, terutama pembangunan jembatan salim dan penembokan jalan salim tersebut, Dengan dilakukan pekerjaan ini maka akses masyarakat lebih mudah, ada yang menarik didalam proses penembokan jalan ini karena ada pribadi yang bergerak dibidang konstruksi meminjamkan alat berat untuk mempermudah dan mempercepat kurang lebih selama 30 hari. Kontribusi ini sangat signifikan mengingat pekerjaan penembokan pekerjaan berat dan harus dilakukan dengan alat berat karena tenaga manual tidak mungkin dapat

melakukan pekerjaan ini, tenaga manusia hanya untuk melakukan pemasangan kayu penahan lumpur.

Bantuan ini akan terlihat lebih terlihat menonjol, apabila dari masing-masing lokasi proyek diadakan perbandingan antara pagu dana yang di berikan dengan besaran swadaya masyarakatnya.

Untuk melihat besaran perbandingan antara bantuan dengan swadaya masyarakat tersebut dapat dilihat seperti pada table berikut;

Tabel 4.30. Perbandingan antara Pagu Dana dengan swadaya Masyarakat Dalam Pelaksanaan Block Grant Tahun 2007-2008

No	Nama Proyek	Perbandingan (Dlm Rp)		% Swadaya dg pagu
		Pagu Dana	Swadaya	
1	Kegiatan ekonomi			
	Pinjaman Modal KSM	122.500.000	-	
	Pencucian Motor	9.481.000	400.000	
	Perbengkelan Motor	8.919.000	4.000.000	
	Potong rambut pria	5.365.000	400.000	
	Potong rambut wanita	5.365.000	400.000	
	Kegiatan Lingkungan			
	Rehab Pemandian umum			
	3 unit			
	Pembuatan Sumur Bor 4	13.200.000	1.250.000	
	unit			
	Pengadaan Listrik			
	Kampak	46.000.000	1.500.000	
	Rehab Rumah tidak	8.000.000	750.000	
	layak huni 18 unit	81.000.000	13.500.000	
	Pembangunan jembatan			
	dan penembokan jalan			
Pembuatan jalan setapak	45.000.000	112.500.000		
Kegiatan Sosial				
Santunan untuk KK	11.000.000	1.250.000		
miskin				
Beasiswa pendidikan	10.000.000	-		
anak kurang mampu	39.000.000	-		

Dari persentase perbandingan antara swadaya masyarakat yang di berikan dengan dana pagu yang disiapkan oleh pemerintah rata-rata kontribusi swadaya cukup tinggi bahkan ada yang lebih dari 250% yaitu untuk pengerjaan pembangunan jembatan dan penembokan jalan Salim, sehingga secara keseluruhan tingkat kelurahan, partisipasi masyarakatnya dalam pelaksanaan pembangunan cukup tinggi. Meskipun memang ada sebagian yang prosentasenya agak rendah, namun secara umum dan apabila dirata-rata masih tergolong tinggi. Kontribusi terbesar yaitu dalam pelaksanaannya pembangunan jembatan dan penembokan jalan salim. Terkait dengan ini ketua KSM Sempati Usman mengatakan;

"Saya merasa bahagia ketika pekerjaan ini berjalan dengan baik, masyarakat sangat antusias untuk turut membantu dalam pelaksanaan pekerjaan ini, bantuan yang di berikan bermacam macam cara ada yang memberikan tenaga, atau sekedar air minum maupun snake, masyarakat memiliki alasan kenapa pekerjaan ini menjadi penting, yaitu jalan ini merupakan jalur utama dalam mobilitas ekonomi pada umumnya."

Melihat fenomena ini, jika ditarik kebelakang mengenai tujuan dari *block grant* adalah untuk memberdayakan masyarakatnya. Tingkat keberdayaan masyarakat, salah satu tolok ukurnya adalah adanya partisipasi masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu yang perlu mendapat kajian lebih jauh dari program ini adalah bagaimana agar masyarakat merasa memiliki program ini, dan untuk selanjutnya mendorongnya untuk terlibat di dalamnya. Dengan kondisi seperti ini, maka proses seleksi prioritas kembali terhadap rencana-rencana proyek yang sudah diprioritaskan dalam musbangkel tetap di jalankan.

Kalau dalam masyarakatnya sudah terpolakan melalui rutinitas kegiatan yang ada, seperti yasinan/ tahlilan atau yang lainnya, maka Kelurahan dan LPMK harus lebih proaktif lagi untuk lebih menyelaraskan program programnya.

2. Interaksi aktor dalam implementasi proyek *block grant*

Sama seperti pada tahapan perencanaan tersebut, untuk mengetahui interaksi. Yang partisipatif, transparansi, akuntabilitas, responsivitas dan *rule of law* dalam implementasi proyek proyek *block grant*, dapat di lihat melalui indikator sebagai berikut:

- a) Partisipasi, untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya proyek *block grant*, dapat lihat melalui tolak ukur Kontribusi yang di berikan masyarakat Kelurahan setempat dalam pelaksanaan proyek-proyek. Masyarakat Tuatunu Indah secara umum sangat mendukung pelaksanaan proyek *block grant* ini. Dari pagu dana sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) masyarakat memberikan dukungan yang cukup *significant* . Dukungan yang diberikan oleh masyarakat dapat dalam bentuk tenaga, makan dan minum, maupun pelepasan hak hak milik, jika diuangkan mencapai nilai Rp. 132.350. 000 Atau 26,47 %.

Bahkan pada pekerjaan pembuatan jembatan dan penembokan jalan Salim, masyarakat pada umumnya memberikan partisipasinya mencapai lebih dari 200%, namun

demikian lebih lanjut dalam table tersebut juga terlihat bahwa khusus proyek pekerjaan pembuatan jembatan dan penembokan jalan dan untuk proyek-proyek lain partisipasi juga cukup besar apabila di rata-ratakan yaitu sebesar 26.47%.

Kondisi ini juga di sampaikan oleh Fasilitator Kelurahan Sdr. Iqbal sebagai berikut ;

“ Selama saya menjadi fasilitator untuk kelurahan Tuatunu Indah saya melihat tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi. Kondisi ini di luar dugaan kami, dengan kondisi sebagai wilayah perkotaan, ternyata dalam proses pelaksanaan proyek block grant rasa kegotongroyongan sangat tinggi, kondisi ini sangat berbeda dengan kelurahan kelurahan yang lain yang ada di kota pangkal Pinang. Dengan kontribusi yang besar dari masyarakat menjadikan pekerjaan cepat selesai dan hasil pekerjaan volumenya bisa lebih besar dan yang lebih penting lagi kegiatan ini sebagai perekat emosi atas hasil pembangunan tersebut. “

b) Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan proyek-proyek

Dengan adanya penunjukan pekerjaan dilakukan oleh KSM dan dikerjakan masyarakat lokal, menunjukkan tidak ada sistem lelang, karena memang dalam proatap sendiri telah di tetapkan sebagai pelaksana proyek oleh BKM. Artinya kalau yang mengerjakan BKM secara langsung akan membuka kesempatan kepada warga lokal untuk terlibat dalam pengerjaannya. Salah satu diantaranya adalah sebagai penyedia material bangunan, seperti pasir, batu bata dan batu gunung menjadi bagian proyek disiapkan oleh pelaksana kegiatan.

Sementara itu dalam pengadaan semen, cat, kawat, besi, dan jenis-jenis bahan bangunan pabrik yang hanya ada di

took-toko bahan bangunan, belum dapat diserahkan kepada pelaksana proyek tersebut. Karena terbentur adanya aturan pencairan dana secara bertahap atau termin, sangat prosedural dan memekan birokrasi yang panjang, sehingga dalam beberapa kasus proyek sudah jalan 100% namun pencairan dana baru sebesar 40%. Menyangkut persoalan ini menurut Yusrizal dari KSM Lingkungan menyampaikan komentarnya;

"Kami melakukan pekerjaan ini mengalami tantangan dari segi pencairan dana, di karenakan terkendala ada aturan main yang harus di ikuti, namun kami cukup tertolong dengan adanya partisipasi masyarakat yang menyumbangkan tenaganya untuk bergotong royong sehingga persoalan anggaran menjadi lebih mudah sehingga upah tenaga kerjanya dapat di minimalis. Sedangkan masyarakat tidak membantu maka keadaan menjadi lain, untuk itulah saya sangat berterimakasih atas partisipasi tersebut, sehingga semuanya menjadi lebih mudah".

Dari apa yang disampaikan di atas memberikan gambaran adalah bahwa di dalam pelaksanaan untuk kegiatan lingkungan terjalin kerjasama sangat yang baik antara pelaksana, masyarakat maupun kalangan dunia usaha.

Untuk kegiatan dari KSM Sosial di program yang di lakukan adalah dalam bentuk santunan kepada KK miskin dan santunan berupa beasiswa bagi anak dari keluarga tidak mampu, dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik tanpa ada kendala berarti, seperti apa yang disampaikan oleh Ali Suhaimi;

"Saya di berikan tanggung jawab dalam pelaksanaan dari KSM Sosial, untuk pelaksanaannya langkah yang di ambil adalah menyeleksi calon-calon penerima

berdasarkan usulan yang di sampaikan oleh anggota BKM, jadi setelah di tetapkan saya tinggal mendistribusikan sumbangan yang di anggarkan, yaitu untuk santunan kepada KK Miskin dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk sebanyak 50 KK. Dan untuk beasiswa bagi anak anak kurang mampu sebesar Rp.39.000.000 (Tiga puluh sembilan juta)untuk 78 anak dan sudah saya distribusikan sesuai peruntukannya."

Untuk kegiatan dari KSM Ekonomi, ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam KSM ini yaitu memberikan fasilitasi untuk usaha pencucian motor, perbengkelan, potong rambut pria dan potong rambut wanita dan bantuan modal usaha. Dalam oprasionalnya kegiatan produktif dibangun sesuai alokasi yang di setuju oleh BKM berdasarkan proposal yang disampaikan. Berikut ini komentar dari KSM Ekonomi atau keuangan yaitu Saudara Cholid Jais;

"Dari KSM Ekonomi atau keuangan awalnya proposal yang di ajukan oleh masyarakat atau kelompok di seleksi oleh BKM dan selanjutnya di tetapkan sebagai calon penerima bantuan modal berupa sarana untuk di operasionalkan berupa usaha pencucian motor, perbengkelan, potong rambut pria dan potong rambut wanita. Dalam pelaksanaannya usaha yang dapat berjalan baik adalah untuk usaha potong rambut pria dan perbengkelan sedangkan untuk kegiatan potong rambut wanita mengalami kendala kultur masyarakat karena masyarakat tua tunu untuk wanita jarang melakukan kegiatan perawatan rambut, kalupun ada sangat sedikit dan cenderung melakukan ke salon dipasar. Sedangkan untuk pencucian motor belum mendapatkan pelanggan yang banyak. Sehingga usaha tersebut di anggap tidak ekonomis apa bila di bandingkan kalau melakukan memotong karet."

Menanggapi atas persoalan tersebut dari keterangan pengelola KSM Abang Simpati di RT 05 yaitu saudara Muh Arsyad menyampaikan pendapatnya;

“ Usaha pencucian motor ini saya jalankan dengan sungguh sungguh tetapi karena masyarakat Tuatunu dalam melakukan perawatan motornya untuk kegiatan mencuci motor masih di lakukan oleh masing masing jadi kami menungguinya usaha ini tidak dapat menghasilkan seperti apa yang di harapkan , akhirnya usaha ini saya tinggalkan dan saya menekuni kembali usaha ke kebun karet.

Untuk kegiatan Ekonomi dalam bentuk pinjaman modal untuk kegiatan ekonomi dari wawancara dengan Saleh salah satu anggota BKM di sampaikan :

“ Pinjaman modal di alokasikan sebesar Rp.122.500.000 di mana dari hasil kesepakatan sebagian dana di alihkan untuk kegiatan pembangunan jembatan Salim dan penembokan jalan Salim sejumlah 45.000.000 dengan rincian 25.000.000 untuk membuat jembatan dan 20.000.000 untuk penembokan sedangkan uang sisanya sejumlah 77.500.000 di pinjamkan ke masyarakat dan sebagian dari kesepakatan anggota BKM di belikan kebun karet untuk kas masyarakat.namun untuk pinjaman masyarakat mengalami hambatan , mengingat kesadaran peminjam yang memiliki anggapan bahwa uang tersebut merupakan bantuan jadi dana bergulir di maksud tidak dapat berjalan seperti yang di harapkan.”

3) Transparansi.

Untuk mengetahui adanya transparansi dalam pelaksanaan proyek *block grant* Kelurahan Tuatunu Indah, dapat di lihat melalui tolak ukur sebagai berikut :

- (a) Sosialisasi program blok grant kepada masyarakat. Walaupun proyek *block grant* sudah dikerjakan Kelurahan dan LPMK terus mengadakan sosialisasi pelaksanaan proyek. Hal ini dapat dilihat dari setiap kegiatan atau acara rutinitas masyarakat melalui yasinan atau tahlilan rukun kematian dan lain-lain, baik lurah maupun LPMK selalu

menyampaikan program-program ini. Termasuk sebagai evaluasi sampai dimana pelaksanaan proyeknya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta apa yang menjadi kendala-kendalanya. Berikut ini pandangan salah satu anggota BKM Jamaludin;

“ Kegiatan sosialisasi dari Kelurahan dan BKM rutin di laksanakan mengingat kegiatan ini di lakukan secara langsung oleh masyarakat, kami selalu memmantau atas apa dan sampai dimana pekerjaan itu di laksanakanjadi dengan kata lain sosialisasi kepada masyarakat tetap di jalankan walaupun pekerjaan telah di laksanakan”.

- (b) Kemudahan akses masyarakat terhadap pelaksanaan proyek.

Dengan pertimbangan bahwa masyarakat telah memiliki adat kebiasaan sendiri di tingkat lokal berupa acara yasinan atau tahlilan, merupakan arena yang strategis di dalam penyampaian informasi baik oleh BKM maupun oleh Lurah, sehingga komunikasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat terjalin dengan baik. Informasi dapat diterima secara langsung dan dapat berjalan dengan komunikasi dua arah. Berikut ini komentar salah satu warga RT 05 Ahmad ;

“Pak lurah dalam setiap kesempatan pertemuan memberikan informasi bagi masyarakat di sampaikan secara langsung kepada kami dan kamipun mendapatkan informasi yang luas tentang pelaksanaan program yang dilakukan. Dengan pola penyampaian dengan pendekatan langsung maka terjalin komunikasi yang baik sehingga ini dapat sebagai strategi meminimalisasi konflik.”

4) Akuntabilitas, untuk mengetahui ada atau tidaknya pertanggungjawaban pelaksana proyek *block grant* kepada masyarakat dapat di ketahui melalui tolak ukur sebagai berikut;

(a) Bentuk bentuk pertanggung jawaban dari pelaksana proyek

Adanya pengurus BKM dan RT/RW yang berasal dari berbagai unsur masyarakat, membawa konsekuensi pada bentuk pertanggungjawaban pelaksana proyek kepada masyarakat dan para pelaku ekonomi setempat, dimulai dari ketua kelompok yasinan/ tahlilan, pengusaha material dan lain lain mencerminkan adanya keterwakilan dari lapisan masyarakat setempat, belum lagi dari organisasi sosial kemasyarakatan semi pemerintah yang ada yaitu RT/RW, hampir seluruh ketuanya tersebut tidak lain adalah representasi dari masyarakatnya.

Maka dari itu pertanggungjawaban yang dapat dilihat adalah semua kegiatan proyek sudah mendapat persetujuan dari BKM dan RT/RW. Artinya bahwa, jika kedua lembaga ini telah menyetujui apa yang menjadi kegiatan dalam *block grant* ini berarti masyarakat sudah setuju. Kalau masyarakat dianggap setuju, berarti pelaksanaan proyek *block grant* dapat dipertanggungjawabkan, meskipun secara langsung tidak ada musyawarah Kelurahan yang khusus membahas akan hal ini. Misalnya ada musyawarah yang didalamnya

terdapat evaluasi pelaksanaan proyek, biasanya dalam bentuk turun kebawahnya lurah dan BKM kerutinitas kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat, seperti do'a bersama, rukun kematian, yasin/Tahlilan dan sebagainya. Seperti komentar Lurah Zurman.

"Bentuk pertanggung jawaban setiap pelaksanaan kegiatan biasanya kita lakukan dengan melihat kelokasi secara berkala saya dengan anggota BKM, tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan setiap fase kegiatan dengan tujuan agar setiap kegiatan dapat berjalan sesuai keinginan atau target."

Dengan control langsung perkembangan dari masing-masing kegiatan dapat diketanui hasil kegiatan proyek tersebut. Sehingga situasi dalam kondisi dalam ambang kendali.

(b) Mekanisme pertanggung jawabannya.

Melihat perkembangan dilapangan, berarti mekanisme pertanggungjawaban pelaksana proyek *block grant* bersifat informal, dengan kata lain pertanggungjawaban tersebut secara prosedur formal tidak dilaksanakan, Artinya bahwa masyarakat secara informal, melalui kepemimpinan lurah dan BKM yang aktif hadir sekaligus memberikan sosialisasi dalam kegiatan rutinitas kelompok kelompok masyarakat, turut andil dalam mekanisme ini.

Seperti yang di sampaikan oleh Ketua KSM pengerjaan rehab pemandian umum Sdr Nasir Idris dalam wawancara tanggal 8 Mei 2010;

"Dengan kunjungan pak lurah dan anggota BKM kami respon dengan baik karena dengan kunjungan ini sekaligus sebagai komunikasi tentang hasil pekerjaan sehingga dapat kerja sama tentang hasil pekerjaan yang kami lakukan saat itu apakah sudah memenuhi kriteria yang di inginkan."

5) Responsifitas

Untuk mengetahui tingkat kepekaan para pelaksana kegiatan yang terlibat dalam pelaksanaan proyek *block grant* terhadap aspirasi masyarakatnya, dilihat dengan tolak ukur masyarakat.

(a) Tingkat komplain (ketidakpuasan) masyarakat terhadap pelaksanaan proyek. Selama pelaksanaan sampai dengan proyek tersebut diserahkan tidak ada komplain masyarakat yang sifatny prinsip. Hal ini dapat dilihat seperti dalam RAB, proyek yang akan dikerjakan pembuatan jembatan lebar 3 meter dengan panjang 12 meter dari biaya 45 Juta justru nilai yang di peroleh lebih dari 250% .

Sementara dalam sosialisasinya disampaikan bahwa proyek ini merupakan kegiatan yang sifatnya padat karya, ternyata hasilnya lebih besar. setelah di telusuri ternyata di dalam pekerjaan tersebut obyek yang dibangun merupakan fasilitas strategis dan memenuhi hajat masyarakat Tuatunu pada umumnya, sehingga masyarakat tidak segan-segan

untuk turut bergotong-royong untuk membangun jembatan tersebut. Hasilnya persentase nilai yang di peroleh bisa bernilai 250% lebih.

- (b) Cara-cara yang ditempuh pemerintahan Kelurahan dan BKM dalam menyelesaikan masalah atau komplain tersebut. Dalam rangka mendorong ketertban dari kegiatan pelaksanaan proyek *block grant*, bila mana ada sedikit kesalah pahaman antara pelaksana proyek dengan pekerja terutama menyangkut upah tenaga kerja maka upaya yang di lakukan adalah dengan melakukan pendekatan personal dan rasa kekeluargaan dengn memberikan pemahaman agar masing-masing pihak dapat menempatkan diri sesuai hak dan kewajibannya. Biasanya pendekatan tokoh masyarakat akan lebih efektif dengan karakteristik masyarakat Tuatunu yang sangat menghormati tokoh keagamaan dimana tokoh keagamaan juga termasuk sebagai anggota BKM.

- 6) *Rule of law*, Untuk mengetahui adanya komitmen kuat dari para pelaksanaan proyek *block grant* terhadap penegakan aturan main, dapat di lihat melalui tolok ukur sebagai berikut;

- (a) Konsistensi pada aturan main antara rencana kebutuhan biaya dengan pelaksanaa proyek.

Lurah, BKM dan pelaksana masing-masing KSM dan pelaksana lapangan secara konsisten melakukan semua kegiatan dilapangan yang telah ditetapkan dalam skala

prioritas. Pada pengerjaan fisik hasilnya dapat lebih dirasakan terutama pada bagian KSM lingkungan, sedangkan pada KSM untuk kegiatan ekonomi mengalami hasil yang kurang menggembirakan terutama dari kegiatan KSM pada potong rambut wanita dan pencucian motor. Kondisi ini disebabkan karena ruang ekonomi bidang tersebut belum menjadi prioritas cara orang tuatunu yang menyangkut adat kebiasaan. Bidang cukur rambut wanita belum menjadi kebiasaan orang Tuatunu untuk dilakukan di kelurahan tuatunu dan cenderung apabila mau melakukan potong rambut mereka mencari ke salon di pusat kota atau pasar pagi, sedangkan untuk pencucian motor juga demikian, mengingat alokasi waktu yang masih banyak mereka biasanya melakukan pencucian motor dilakukan di sungai sambil acara mandi di waktu siang hari atau sore hari, sehingga jasa pencucian motor kurang mendapat pelanggan akhirnya pengelola usaha ini keberatan karena minimnya pendapatan yang diperoleh dan akhirnya memilih pekerjaan lain yang dianggap lebih produktif yaitu memotong karet atau berdagang buah-buahan.

Untuk kegiatan ekonomi yang lain berupa peminjaman modal usaha mengalami banyak kendala artinya uang yang dipinjamkan tidak dikelola sesuai harapan. Modal pinjaman bergulir tersebut tidak bisa

dilakukan sesuai mekanisme yang diharapkan ini menyangkut persepsi yang salah dari masyarakat peminjam.

Modal yang dia pinjam dari pemerintah tersebut tidak perlu dikembalikan, akibatnya tingkat pengembalian rendah, untuk menjaga supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi dari pihak BKM membuat keputusan tentang penggunaan anggaran tersebut yaitu digunakan untuk pembangunan TPA yang ada di Kelurahan Tuatunu Indah.

Untuk kegiatan sosial pola pelaksana lebih mudah karena ketentuan yang telah diatur baik itu siapa yang berhak menerima maupun jumlah yang harus disalurkan dilakukan dengan hasil dari identifikasi BKM dan di tetapkan selanjutnya didistribusikan oleh KSM yang menangani bidang .

(b) Kejelasan tugas masing-masing pelaksana proyek

Didalam pelaksanaannya, sudah ada kejelasan tugas dari masing-masing pelaksana, yaitu seluruh material bangunan yang berasal dari bahan non pabrikan seperti pasir, kayu, batu gunung, diserahkan pengadaannya bekerjasama dengan masyarakat lokal, sementara untuk bahan-bahan yang lain diserahkan kepada penanggung jawab kegiatan masing-masing dengan belanja di took-toko yang ada di Kelurahan Tuatunu Indah.

Termasuk adanya kejelasan pembagian tugas disini, juga dapat dilihat pada sistem penyediaan tenaga kerja. Dari sejak awal telah disampaikan bahwa tenaga kerja yang ada dalam proyek ini adalah memberdayakan tenaga lokal yang dianggap memiliki kompetensi dalam pekerjaan ini, dan telah teruji di tingkat Kelurahan Tuatunu, dan telah diketahui watak dan sifat kerjanya sehingga pelaksana lebih mudah mengatur pembayaran upah tenaga kerjanya. Apalagi proses pencairan dana proyeknya panjang birokrasinya, namun untuk tenaga pembantu yang dilakukan masyarakat melakukan gotong-royong agar pekerjaan dapat segera di selesaikan dengan biaya yang lebih efisien artinya telah ada upaya untuk melakukan sinkronisasinya dari tujuan proyek tersebut.

(c). Kendala kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan untuk dapat di laksanakan lima nilai *good governance* adalah sebagai berikut;

1) Sumberdaya manusia yang masih rendah.

Kondisi ini dapat dilihat pada saat penyusunan pelaporan hasil kegiatan dilapangan, lemahnya pengetahuan tentang administrasi pelaporan kegiatan, tertib administrasi menjadi kendala sehingga laporan yang disampaikan selalu mengalami keterlambatan, untuk itu peran pendamping atau fasilitator harus

berupaya untuk dapat membimbing terus menerus dalam menyusun pelaporan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dilapangan.

2) Persepsi yang keliru tentang pinjaman modal

Pada kegiatan ekonomi dalam bentuk pemberian pinjaman modal usaha kepada masyarakat telah terjadi persepsi yang keliru oleh sebagian besar masyarakat peminjam, di mana mereka beranggapan bahwa uang yang mereka terima dianggap tidak perlu di kembalikan. Persepsi ini terbentuk didalam masyarakat karena banyak kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pinjaman, contoh KUT (Kredit Usaha Tani) ternyata pemerintah melakukan pemutihan atau di hapuskan . Psikologi yang terbentuk di tengah masyarakat seperti ini menjadikan masyarakat menjadi enggan untuk melakukan pembayaran atau pengembalian pinjaman, aakibatnya tingkat pengembalian menjadi rendah, sehingga pengurus BKM mengalihkan sebagian dana untuk kegiatan lingkungan untuk menambah biaya pembangunan fasilitas umum

3) Kurang selektifnya memilih jenis usaha

Dari beberapa kegiatan dari KSM ekonomi pemilihan jenis usaha belum dilakukan pertimbangan yang

matang, artinya keputusan yang diambil kurang memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat, akibatnya dari beberapa kegiatan ekonomi bagi kelompok-kelompok usaha tidak dapat berkembang, bahkan malah menjadi bubar. Kondisi ini dikarenakan pertimbangan yang kurang matang di dalam memutuskan prioritas usaha tanpa di dahului oleh analisa sosial ekonomi masyarakat, kultur Tuatunu Indah selama ini . Sebagai contoh adalah usaha bidang potong rambut wanita , dengan kultur masyarakatnya yang religius cenderung persoalan rambut belum menjadi kebutuhan apalagi dalam kesehariannya wanita tuatunu kebanyakan menggunakan jilbab. Contoh lain adalah usaha pencucian motor, di mana masyarakat memiliki kebiasaan mandi di sungai dan biasanya sekaligus mencuci kendaraan bermotornya.

4) Terbatasnya dana

Terbatasnya dana mengurangi keleluasaan dalam melaksanakan kegiatan di lapangan, sehingga menuntut pemikiran ekstra dalam upaya mengakomodir usulan kegiatan dari masyarakat, namun ada hal yang membanggakan dari sifat dan karakter masyarakat Tuatunu Indah, di mana mereka memiliki perhatian yang baik dalam sisi kepentingan umum, mereka akan

terbuka untuk memberikan bantuan baik dalam bentuk materi, tenaga, pemikiran dalam memperbaiki fasilitas umum, bahkan kontribusinya cukup besar guna suksesnya kegiatan ini, sebagai contoh dalam pembangunan jalan dan jembatan salim.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Adapun hasil dari lapangan dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

Values Good Governance dalam interaksi yang paling menonjol dari pelaksanaan *block grant* ini adalah tingkat perhatian dan keterlibatan masyarakatnya, untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan program ini cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian, bahwa tingkat swadaya masyarakat dalam pelaksanaan proyek-proyek *block grant* tersebut ada yang mencapai sampai lebih dari 250% yaitu dalam melaksanakan proyek pembuatan jembatan dan penembokan jalan Salim. Hal ini menunjukkan bahwa program *block grant* di Kelurahan Tuatunu Indah memang benar-benar dibutuhkan masyarakat, dengan demikian masyarakat merasa memiliki yang tinggi, sehingga hasil pembangunan dari proyek inipun semakin bermanfaat dan akan lebih terawat.

Sedangkan terhadap *variable good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan *rule of law* dapat disampaikan sebagai berikut;

1. Transparansi

Nilai-nilai transparansi dalam pengelolaan *block grant* di kelurahan sudah di lakukan dengan baik , hal ini dapat di ketahui oleh

semua kegiatan telah diketahui oleh *stakeholder* dimulai dari perencanaan sampai pada tingkat pelaksanaan. BKM dan Kelurahan melakukan inisiatif agar semua kegiatan diinformasikan secara terbuka baik itu mengenai apa skala prioritas, berapa anggaran dan siapa pelaksana .selanjutnya anggota BKM menyampaikan laporan tiap bulan tentang kemajuan proyek kepada camat dan diketahui oleh lurah.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas proyek *block grant* dijalankan melalui laporan pertanggung jawaban BKM pada akhir tahun anggaran, dalam rapat Kelurahan yang dihadiri oleh para ketua RT/RW, pengurus BKM dan tokoh masyarakat dan berjalan dengan baik.

3. Responsivitas

Para pengelola *block grant* telah merespon tuntutan kebutuhan masyarakatnya, hal ini ditunjukkan dari proses penentuan skala, prioritas telah mencerminkan kebutuhan masyarakat, sebagaimana yang telah diusulkan oleh para ketua RT/RW baik itu dalam kegiatan lingkungan, ekonomi dan sosial. Masyarakat Tuatunu sebagian besar bergerak di sektor pertanian dan usaha perdagangan kecil produk pertanian, kedua mata pencaharian tersebut diperlukan sarana prasarana jalan yang memadai untuk mendukung mobilitas masyarakat kekebun maupun untuk membawa hasil kebun karet maupun kebun nanas.

4. Rule of law

Proses penegakan aturan main yang terlihat dalam pelaksanaan *block grant* adalah kepatuhan pada prosedur keuangan. Walaupun

program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat, kepatuhan dari para pengelola *block grant* di sini di maknai sebagai upaya mentaati peraturan penggunaan keuangan Negara, yaitu adanya biaya perencanaan, PPh, dan PPn dalam proyek dan telah di lakukan dengan baik

Dari lima indikator *good governance* yang di tawarkan , kenyataan di lapangan menunjukan bahwa untuk partisipasi di dalam pelaksanaan *block grant* untuk bidang lingkungan atau pembangunan fisik menunjukkan tingkat partisipatif yang tinggi, sedangkan kegiatan sosial partisipasi sangat baik namun untuk kegiatan ekonomi mengalami persoalan dalam pemilihan sektor usaha dan persepsi yang keliru dari masyarakat yang mengelola dana bergulir, sedangkan untuk transparansi telah di lakukan dengan baik, akuntabilitas secara umum telah di lakukan dengan baik namun masih ada persoalan untuk kegiatan pada kegiatan ekonomi, berupa rendahnya tingkat pengembalian dana bergulir dan responsibilitas dari ketiga pilar *governance* telah menunjukkan respon yang baik.

5. Faktor penghambat penerapan *Good Governance* dalam pelaksanaan Program P2KP di Kelurahan Tuatunu Indah secara umum sangat kecil , yaitu ;
 - a. Pada kegiatan dari KSM usaha potong rambut dan cuci motor belum dipertimbangkan aspek sosial budaya masyarakat, sehingga dari kegiatan ini tidak dapat berjalan sesuai harapan.

- b. Pada Kegiatan pinjaman modal kepada masyarakat adanya persepsi yang keliru oleh masyarakat. Sebagian dari mereka memiliki asumsi kalau uang dari pemerintah tidak perlu di kembalikan.
- c. Faktor kualitas SDM menjadi permasalahan sendiri, berupa rendahnya kemampuan berfikir *visioner* dan dalam tata pembukuan kegiatan.
- d. Terbatasnya dana, mengurangi keleluasaan pelaksanaan kegiatan di lapangan

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini agar interaksi antara pemerintah kelurahan ,BKM, RT/RW dan kalangan swasta lokal dalam mengelola dana *block grant* mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya terdapat nilai nilai *good governance* yaitu adanya partisipasi , transparansi, akuntabilitas, responsivitas dan *rule of law*, peneliti memberikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut ;

1. Saran dan Rekomendasi kepada pemerintah daerah

Kalau memang kegiatan *block grant* ini ditujukan sebagai pemberdayaan masyarakat agar memiliki kepedulian dan peduli dalam pembangunan maka peneliti menyarankan kepada pemerintah Kota Pangkal pinang sebagai berikut;

- a. Pemerintah melakukan evaluasi atas kegiatan *block grant* selanjutnya lebih selektif dalam pemilihan jenis kegiatan khususnya di Kelurahan Tuatunu Indah lebih di tekankan pada kegiatan lingkungan

- b. Pemerintah melanjutkan kegiatan pembangunan sarana umum atau fisik, agar manfaatnya lebih di rasakan kalangan yang lebih luas

2. Saran dan Rekomendasi kepada pemerintahan Kelurahan

- a. Lebih aktif dalam memfasilitasi program dan selektif pemilihan kegiatan yang memberikan manfaat paling besar dan jangkauan lebih luas.
- b. Selalu mendorong partisipasi masyarakat lebih dinamis dan partisipatif dalam merencanakan kegiatan yang lebih bermanfaat.

3. Saran dan Rekomendasi kepada BKM

- a. Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan lebih memprioritaskan kegiatan lingkungan, dengan pertimbangan melihat karakteristik masyarakat Tuatunu Indah
- b. Penjangkauan Aspirasi lebih ditingkatkan agar mendapatkan prioritas kegiatan dengan jangkauan yang lebih luas bagi masyarakat Tuatunu Indah.
- c. Evaluasi kegiatan yang lebih memberikan manfaat terbesar dan maksimalkan potensi untuk pemberdayaannya

4. Saran dan Rekomendasi untuk RT/RW

- a. Lebih mampu memerankan fungsinya, terutama dalam memperjuangkan aspirasi warganya agar dapat menjadi program yang diprioritaskan.
- b. Intensitas pertemuan lebih di perbanyak agar masyarakat lebih cepat mendapatkan informasi

- c. Masyarakat lebih dapat memilih kegiatan ekonomi berbasis karakteristik daerahnya.

5. Saran dan Rekomendasi kepada pengusaha lokal

- a. Untuk mampu berkontribusi positif dalam memainkan perannya baik dalam melakukan pekerjaan teknis maupun dalam penyediaan material
- b. Lebih mengedepankan nilai social dalam rangka turut membangun daerahnya

Demikianlah kesimpulan yang dapat di berikan dalam pelaksanaan proyek *block grant* di Kelurahan Tuatunu Indah Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dengan harapan dapat memberikan masukan bagi pelaksanaan kegiatan proyek *block grant* dimana saja.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Davey, Kenneth J, 1982, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, UI Press, Jakarta
- Eko,Sutoro dkk, 2003, "*Naskah Pembaharuan Pemerintahan Desa : Program Pengembangan Good Governance Dalam Konteks Otonomi Desa*",IRE Press, Yogyakarta.
- Fuady, Ahmad Helmi , dkk, 2002, *Memahami Anggaran Publik*, Idea Press, Yogyakarta
- Halim,Abdul, 2002, *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Hadi,Sutrisno,1984, *Metodologi Research Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Desertasi*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta
- Hikam, Muhammad AS, 1996, *Demokrasi dan Civil Society*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta
- Kaho Josef Riwo,1988, *Prospek Otonomi Daearah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Mardiasmo,2002, *Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta
- Mandar, Agus , 2003 , *Concencus Sebagai Pilar Utama Local Good Governance, Tesis Pasca Sarjana Politik Lokan dan Otonomi Daerah* UGM, Yogyakarta
- Manullang, M, 1983, *Managemen Personalia*, Aksara Baru, Jakarta
- Muchsin ,M Bahori,, et al,2000, *Pesantren Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan, dalam wacana jurnal Penelitian Ilmu Ilmu Sosial*, PPSUniversitas Brawijaya, Malang
-, 2000, *Modul Pembekalan Teknis Manajemen Stratejik, Teknik Penganggaran / Keuangan Bagi Anggota DPRD dan Pejabat Pemda. Kerjasama Menteri Negara Otonomi Daerah dengan PAU- Studi Ekonomi UGM* , Yogyakarta

- Nugroho, Heru, *Good Governance di Tingkat Desa sebagai Solusi, Ekonomi Desa di tengah ekspansi Pasar Global , Tantangan mewujudkan Kesejahteraan di tingkat Lokal, Makalah pada Work shop Desentralisasi dan Good Governance di Tingkat Desa, Kerjasama S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah dengan Patnership for Governance Reform in Indonesia*, Yogyakarta, 2001
- Rohidi, Tjetjep Rohendi , 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Siagian, Sondang P, 1975, *Organisasi, Kepemimpinan dalam Prilaku Administerasi*, Gunung Agung , Jakarta
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (eds), 1995, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Jakarta
- Sulaiman, Anwar, 2000, *Pengantar Keuangan Negara dan Daerah*, STIA LAN Press, Jakarta
- Sumanto, 1990, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Andi Offset, Yogyakarta
- Suhardono, Edy dkk, 2001, *Good Governance : Untuk Daulat Siapa?*, Forum LSM DIY- Yappika, Yogyakarta
- Swasta, Basu dan Ibnu Sukotjo, 1988, *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*, Liberty, Yogyakarta
- Syaukani, Afan Gaffar dan Pyas Rasyid, 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* , Pustaka Pelajar , Yogyakarta.
- Tjkroamidjojo, Bintoro, 2002, *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, LAN , Jakarta
- Widodo, Joko, 2001, *Good Governance*, Insan Cendekia, Surabaya.

L

A

M

P

I

R

A

N

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN WANCARA DARI JUDUL TESIS :

**PENERAPAN PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
DANA BLOK GRANT MELALUI PROGRAM P2KP DI TINGKAT KELURAHAN
TUATUNU INDAH
(Study Perencanaan dan Implementasi)**

I. Pada Tahap Perencanaan

1. Partisipatif

a. Siapa saja yang hadir dalam rapat pertemuan membahas program yang mau di lakukan?

Sebutkan !

Yang hadir dalam rapat perencanaan adalah Pemerintah kelurahan, BKM , RT, Fasilitator
Kelurahan

b. Bagaimana peran peserta rapat dalam pelaksanaan rapat tersebut ? jelaskan !

Peserta rapat dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik dalam proses perencanaan

2. Transparansi

a. Apakah dalam penentuan hasil rapat sesuai skala prioritas yang di sepakati peserta rapat?

Jelaskan !

Transparansi dapat di lakukan dengan baik , dengan di sampaikan secara terbuka terkait skala
prioritas yang di pilih.

b. Apakah semua peserta rapat memahami akan hasil penentuan skala prioritas program yang
akan di laksanakan ? jelaskan

Semua peserta memahami atas apa yang di bicarakan dalam rapat perencanaan tersebut.

3. Responsifitas

a. Apakah usulan program yang akan di sampaikan merupakan keinginan masyarakat secara
luas? Berikan penjelasan

Semua usulan berangkat dari usulan RT sehingga benar benar merupakan keinginan
masyarakat.

b. Apakah prioritas yang di ambil sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ? jelaskan!

PEDOMAN WANCARA DARI JUDUL TESIS :

**PENERAPAN PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
DANA BLOK GRANT MELALUI PROGRAM P2KP DI TINGKAT KELURAHAN
TUATUNU INDAH
(Study Perencanaan dan Implementasi)**

I. Pada Tahap Perencanaan

1. Partisipatif

a. Siapa saja yang hadir dalam rapat pertemuan membahas program yang mau di lakukan?

Sebutkan !

Yang hadir dalam rapat perencanaan adalah Pemerintah kelurahan, BKM , RT, Fasilitator

Kelurahan

b. Bagaimana peran peserta rapat dalam pelaksanaan rapat tersebut ? jelaskan !

Peserta rapat dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik dalam proses perencanaan

2. Transparansi

a. Apakah dalam penentuan hasil rapat sesuai skala prioritas yang di sepakati peserta rapat?

Jelaskan !

Transparansi dapat di lakukan dengan baik , dengan di sampaikan secara terbuka terkait skala prioritas yang di pilih.

b. Apakah semua peserta rapat memahami akan hasil penentuan skala prioritas program yang akan di laksanakan ? jelaskan

Semua peserta memahami atas apa yang di bicarakan dalam rapat perencanaan tersebut.

3. Responsifitas

a. Apakah usulan program yang akan di sampaikan merupakan keinginan masyarakat secara luas? Berikan penjelasan

Semua usulan berangkat dari usulan RT sehingga benar benar merupakan keinginan masyarakat.

b. Apakah prioritas yang di ambil sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ? jelaskan!

PEDOMAN WANCARA DARI JUDUL TESIS :

**PENERAPAN PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
DANA BLOK GRANT MELALUI PROGRAM P2KP DI TINGKAT KELURAHAN
TUATUNU INDAH
(Study Perencanaan dan Implementasi)**

I. Pada Tahap Perencanaan

1. Partisipatif

a. Siapa saja yang hadir dalam rapat pertemuan membahas program yang mau di lakukan?

Sebutkan !

Yang hadir dalam rapat perencanaan adalah Pemerintah kelurahan, BKM , RT, Fasilitator

Kelurahan

b. Bagaimana peran peserta rapat dalam pelaksanaan rapat tersebut ? jelaskan !

Peserta rapat dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik dalam proses perencanaan

2. Transparansi

a. Apakah dalam penentuan hasil rapat sesuai skala prioritas yang di sepakati peserta rapat?

Jelaskan !

Transparansi dapat di lakukan dengan baik , dengan di sampaikan secara terbuka terkait skala prioritas yang di pilih.

b. Apakah semua peserta rapat memahami akan hasil penentuan skala prioritas program yang akan di laksanakan ? jelaskan

Semua peserta memahami atas apa yang di bicarakan dalam rapat perencanaan tersebut.

3. Responsifitas

a. Apakah usulan program yang akan di sampaikan merupakan keinginan masyarakat secara luas? Berikan penjelasan

Semua usulan berangkat dari usulan RT sehingga benar benar merupakan keinginan masyarakat.

b. Apakah prioritas yang di ambil sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ? jelaskan!

PEDOMAN WANCARA DARI JUDUL TESIS :

**PENERAPAN PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
DANA BLOK GRANT MELALUI PROGRAM P2KP DI TINGKAT KELURAHAN
TUATUNU INDAH
(Study Perencanaan dan Implementasi)**

I. Pada Tahap Perencanaan

1. Partisipatif

a. Siapa saja yang hadir dalam rapat pertemuan membahas program yang mau di lakukan?

Sebutkan !

Yang hadir dalam rapat perencanaan adalah Pemerintah kelurahan, BKM , RT, Fasiilitator

Kelurahan

b. Bagaimana peran peserta rapat dalam pelaksanaan rapat tersebut ? jelaskan !

Peserta rapat dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik dalam proses perencanaan

2. Transparansi

a. Apakah dalam penentuan hasil rapat sesuai skala prioritas yang di sepakati peserta rapat?

Jelaskan !

Transparansi dapat di lakukan dengan baik , dengan di sampaikan secara terbuka terkait skala prioritas yang di pilih.

b. Apakah semua peserta rapat memahami akan hasil penentuan skala prioritas program yang akan di laksanakan ? jelaskan

Semua peserta memahami atas apa yang di bicarakan dalam rapat perencanaan tersebut.

3. Responsifitas

a. Apakah usulan program yang akan di sampaikan merupakan keinginan masyarakat secara luas? Berikan penjelasan

Semua usulan berangkat dari usulan RT sehingga benar benar merupakan keinginan masyarakat.

b. Apakah prioritas yang di ambil sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ? jelaskan!

PEDOMAN WANCARA DARI JUDUL TESIS :

**PENERAPAN PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
DANA BLOK GRANT MELALUI PROGRAM P2KP DI TINGKAT KELURAHAN
TUATUNU INDAH
(Study Perencanaan dan Implementasi)**

I. Pada Tahap Perencanaan

1. Partisipatif

a. Siapa saja yang hadir dalam rapat pertemuan membahas program yang mau di lakukan?

Sebutkan !

Yang hadir dalam rapat perencanaan adalah Pemerintah kelurahan, BKM , RT, Fasilitator

Kelurahan

b. Bagaimana peran peserta rapat dalam pelaksanaan rapat tersebut ? jelaskan !

Peserta rapat dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik dalam proses perencanaan

2. Transparansi

a. Apakah dalam penentuan hasil rapat sesuai skala prioritas yang di sepakati peserta rapat?

Jelaskan !

Transparansi dapat di lakukan dengan baik , dengan di sampaikan secara terbuka terkait skala prioritas yang di pilih.

b. Apakah semua peserta rapat memahami akan hasil penentuan skala prioritas program yang akan di laksanakan ? jelaskan

Semua peserta memahami atas apa yang di bicarakan dalam rapat perencanaan tersebut.

3. Responsifitas

a. Apakah usulan program yang akan di sampaikan merupakan keinginan masyarakat secara luas? Berikan penjelasan

Semua usulan berangkat dari usulan RT sehingga benar benar merupakan keinginan masyarakat.

b. Apakah prioritas yang di ambil sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ? jelaskan!

Prioritas yang terpilih merupakan keputusan bersama dengan azas kesetaraan antar lingkungan masing masing RT

4. Akuntabilitas

a. Apakah hasil rapat penentuan skala prioritas kegiatan dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat secara luas? Jelaskan !

Hasil rapat dapat di pertanggung jawabkan melalui kegiatan sosialisasi yang di lakukan oleh lurah dan anggota BKM

5. Rule Of Law

a. Apakah keputusan kegiatan yang diambil sudah sesuai dengan alokasi dana yang tersedia? Berikan komentar ?

Alokasi dana yang di salurkan telah sesuai kesepakatan walaupun jumlah tersebut kurang memadai apabila akan di lakukan untuk titu di tuntut peran masyarakat untuk dapat berkontribusi agar kegiatan dapat berjalan dengan baik

II. Tada Tahap Implementasi (interaksi antara actor yang terlibat dalam kegiatan program)

1. Partipatif

a. Bagaimana peran dari Pihak Pemerintah, kalangan swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan program ini? Jelaskan !

Masing masing stake holders telah berperan dengan baik sesuai kapasitas yang melekat dalam dirinya dalam pelaksanaan Program P2KP

b. Bagaimana kontribusi dari Pihak Pemerintah, kalangan swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan program ini? Jelaskan !

Kontribusi yang di berikan cukup besar dalam rangka mensukseskan program P2KP

2. Transparansi

a. Apakah dalam pelaksanaan program di lakukan sosialisasi ke masyarakat? Jelaskan !

Sosialisasi di lakukan oleh pihak kelurahan maupun BKM kepada seluruh lapisan masyarakat

- b. Apakah masyarakat diberikan kemudahan dalam mendapatkan akses dan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan kegiatan? Jelaskan ?

Dalam implementasi di tingkat lapangan masyarakat di berikan keleluasaan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Program P2KP

3. Responsifitas

- a. Apakah masyarakat menyampaikan keluhan atas pelaksanaan program tersebut?

Jelaskan!

Pada dasarnya masyarakat mempercayai atas prakarsa yang di lakukan oleh upaya BKM di dalam memfasilitasi kepentingan masyarakat di dalam pelaksanaan Program P2KP

- b. Bagaimana upaya yang di lakukan dalam menanggapi keluhan yang di sampaikan oleh Masyarakat ? jelaskan!

Apabila terjadi keluhan masyarakat dapat segera menyampaikan langsung ataupun melalui ketua RT masing masing

4. Akuntabilitas

- a. Bagaimana bentuk tanggung jawab dan kompensasi kepada masyarakat yang terkena program? jelaskan!

Masyarakat dengan sungguh sungguh turut berpartisipasi dan memberikan kerjasama yang baik dengan pelaku atau pemborong pekerjaan namun masih ada sebagian belum mampu memberikan rasa tanggung jawab yang besar terutama dalam pengelolaan pinjaman permodalan usaha.

- b. Bagaimana caranya dalam penyelesaian masalah yang timbul akibat dari pelaksanaan program ini? Uraikan secara jelas ?

Masalah di selesaikan dengan jalan musyawarah baik di tingkat RT ataupun kelurahan

PEDOMAN WANCARA DARI JUDUL TESIS :

**PENERAPAN PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
DANA BLOK GRANT MELALUI PROGRAM P2KP DI TINGKAT KELURAHAN
TUATUNU INDAH
(Study Perencanaan dan Implementasi)**

I. Pada Tahap Perencanaan

I. Partisipatif

a. Siapa saja yang hadir dalam rapat pertemuan membahas program yang mau di lakukan?

Sebutkan !

Yang hadir dalam rapat perencanaan adalah Pemerintah kelurahan, BKM , RT, Fasilitator
Kelurahan

b. Bagaimana peran peserta rapat dalam pelaksanaan rapat tersebut ? jelaskan !

Peserta rapat dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik dalam proses perencanaan

2. Transparansi

a. Apakah dalam penentuan hasil rapat sesuai skala prioritas yang di sepakati peserta rapat?

Jelaskan !

Transparansi dapat di lakukan dengan baik , dengan di sampaikan secara terbuka terkait skala
prioritas yang di pilih.

b. Apakah semua peserta rapat memahami akan hasil penentuan skala prioritas program yang
akan di laksanakan ? jelaskan

Semua peserta memahami atas apa yang di bicarakan dalam rapat perencanaan tersebut.

3. Responsifitas

a. Apakah usulan program yang akan di sampaikan merupakan keinginan masyarakat secara
luas? Berikan penjelasan

Semua usulan berangkat dari usulan RT sehingga benar benar merupakan keinginan
masyarakat.

b. Apakah prioritas yang di ambil sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ? jelaskan!

Prioritas yang terpilih merupakan keputusan bersama dengan azas kesetaraan antar lingkungan masing masing RT

4. Akuntabilitas

a. Apakah hasil rapat penentuan skala prioritas kegiatan dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat secara luas? Jelaskan !

Hasil rapat dapat di pertanggung jawabkan melalui kegiatan sosialisasi yang di lakukan oleh lurah dan anggota BKM

5. Rule Of Law

a. Apakah keputusan kegiatan yang diambil sudah sesuai dengan alokasi dana yang tersedia? Berikan komentar ?

Alokasi dana yang di salurkan telah sesuai kesepakatan walaupun jumlah tersebut kurang memadai apabila akan di lakukan untuk itu di tuntut peran masyarakat untuk dapat berkontribusi agar kegiatan dapat berjalan dengan baik

II. Tada Tahap Implementasi (interaksi antara actor yang terlibat dalam kegiatan program)

1. Partipatif

a. Bagaimana peran dari Pihak Pemerintah, kalangan swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan program ini?. Jelaskan !

Masing masing stake holders telah berperan dengan baik sesuai kapasitas yang melekat dalam dirinya dalam pelaksanaan Program P2KP

b. Bagaimana kontribusi dari Pihak Pemerintah, kalangan swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan program ini? Jelaskan !

Kontribusi yang di berikan cukup besar dalam rangka mensukseskan program P2KP

2. Transparansi

a. Apakah dalam pelaksanaan program di lakukan sosialisasi ke masyarakat? Jelaskan !

Sosialisasi di lakukan oleh pihak kelurahan maupun BKM kepada seluruh lapisan masyarakat

- b. Apakah masyarakat diberikan kemudahan dalam mendapatkan akses dan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan kegiatan? Jelaskan ?

Dalam implementasi di tingkat lapangan masyarakat di berikan keleluasaan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Program P2KP

3. Responsifitas

- a. Apakah masyarakat menyampaikan keluhan atas pelaksanaan program tersebut?

Jelaskan!

Pada dasarnya masyarakat mempercayai atas prakarsa yang di lakukan oleh upaya BKM di dalam memfasilitasi kepentingan masyarakat di dalam pelaksanaan Program P2KP

- b. Bagaimana upaya yang di lakukan dalam menanggapi keluhan yang di sampaikan oleh Masyarakat ? jelaskan!

Apabila terjadi keluhan masyarakat dapat segera menyampaikan langsung ataupun melalui ketua RT masing masing

4. Akuntabilitas

- a. Bagaimana bentuk tanggung jawab dan kompensasi kepada masyarakat yang terkena program? jelaskan!

Masyarakat dengan sungguh sungguh turut berpartisipasi dan memberikan kerjasama yang baik dengan pelaku atau pemborong pekerjaan namun masih ada sebagian belum mampu memberikan rasa tanggung jawab yang besar terutama dalam pengelolaan pinjaman permodalan usaha.

- b. Bagaimana caranya dalam penyelesaian masalah yang timbul akibat dari pelaksanaan program ini? Uraikan secara jelas ?

Masalah di selesaikan dengan jalan musyawarah baik di tingkat RT ataupun kelurahan

a. Bagaimana konsistensi aturan antara rencana kebutuhan biaya dengan pelaksanaan program kegiatan? Jelaskan

Dalam penggunaan alokasi dana di lakukan dengan sangat baik untuk kegiatan KSM sosial dan lingkungan namun pada KSM keuangan mengalami berbagai kendala

b. Apakah dalam pelaksanaan program pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini menjalankan sesuai perannya? Jelaskan!

Peran yang di bawakan oleh masing masing stake holder sangat baik hanya pada pelaksanaan KSM keuangan pada pinjaman modal mengalami masalah karena persepsi yang keliru atas penggunaan dana tersebut.

Mengetahui ;

Lurah Tuatunu Indah



.....
Lurah

Nip. 195808041986031009

UNIVERSITAS TERBUKA